



**POLITISASI ANTI-MENARA MASJID DI SWISS DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP OPINI PUBLIK INTERNASIONAL**

*(THE POLITICIZATION OF ANTI-MOSQUE MINARET IN SWITZERLAND  
AND ITS IMPLICATION ON INTERNATIONAL PUBLIC OPINION)*

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nur Dina Camelia  
NIM 110910101022**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**



**POLITISASI ANTI-MENARA MASJID DI SWISS DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP OPINI PUBLIK INTERNASIONAL**

*(THE POLITICIZATION OF ANTI-MOSQUE MINARET IN SWITZERLAND  
AND ITS IMPLICATION ON INTERNATIONAL PUBLIC OPINION)*

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

**Oleh:**

**Nur Dina Camelia  
NIM 110910101022**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, limpahan kasih sayang dan kesempatan untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini;
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan lentera ilmu dan kebajikan kepada seluruh umat manusia;
3. Ummi Dra. Hj. Waqi'atul Masruroh M.Si. dan Abi H. Syaifullah Farid Wadjdi SH. MH. yang selama ini tiada lelah menyayangi dan mendampingi serta selalu melantunkan doa untuk kebaikan penulis;
4. Keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan yaitu nenek penulis Nur Hayati, Bibi Fadilah, serta adik-adik penulis tersayang Rahmat Wildan Safari Abdi, Nur Wilda Farah Diba dan Moh. Ghiyats Rizky Safari Abdi;
5. Kedua dosen pembimbing skripsi penulis yang tiada lelah membimbing dan memberikan banyak pengetahuan baru kepada penulis, sehingga dapat membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih banyak Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D dan Bapak Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos, M. Si.;
6. Dosen pembimbing akademik (DPA) penulis selama kuliah, Bapak Drs. M. Nur Hasan, M. Hum. yang selama ini telah banyak membimbing penulis;
7. Dosen pembimbing untuk lomba Mahasiswa Prestasi (MAWAPRES) Bapak Drs. Djoko Susilo, Msi, yang telah membimbing penulis hingga penulis meraih Juara II Mahasiswa Prestasi tingkat Universitas Jember pada tahun 2014;
8. Seluruh dosen di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember, terima kasih tak terhingga atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis
9. Almater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember.

## MOTTO

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.

( Terjemahan Surat *Al-Alaq* ayat 1)<sup>1</sup>

Rahasia masa depan ada pada masa sekarang. Kalau kau menaruh perhatian pada masa sekarang kau bisa memperbaikinya. Dan kalau kau memperbaiki saat sekarang ini, apa yang akan datang juga akan lebih baik.<sup>2</sup>

*Ever forward!* Maju terus!

*Ever onward!* Meningkatkan terus!

*Never retreat!* Pantang mundur!<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya : CV. Pustaka Agung Harapan.

<sup>2</sup> Paulo Coelho. 2005. *Sang Alkemis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Halaman 133.

<sup>3</sup> Hendro Sumartono (Ed). 2000. *Rekonstruksi Sejarah dan Kebangsaan Indonesia*. Jember: Universitas Jember. Halaman 10.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Dina Camelia

NIM : 110910101022

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “POLITISASI ANTI-MENARA MASJID DI SWISS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP OPINI PUBLIK INTERNASIONAL” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 Juni 2015

Yang menyatakan,

Nur Dina Camelia  
NIM 110910101022

**SKRIPSI**

**POLITISASI ANTI-MENARA MASJID DI SWISS DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP OPINI PUBLIK INTERNASIONAL**

Oleh

Nur Dina Camelia  
NIM 110910101022

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos, M. Si.

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul **“Politisasi Anti-Menara Masjid di Swiss dan Implikasinya Terhadap Opini Publik Internasional”** telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 01 Juni 2015  
waktu : 09.00 WIB  
tempat : Ruang LKPK FISIP-UNEJ

Tim Penguji:  
Ketua

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D  
NIP. 196108281992011001

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph. D  
NIP. 196802291998031001

Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos, M.Si  
NIP. 197212041999031004

Anggota I

Anggota II

Fuat Albayumi, S.IP, MA  
NIP. 197404242005011002

Honest Dody Molasy, S.Sos, MA  
NIP. 197611122003121002

Mengesahkan  
Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.  
NIP. 195207271981031003

## RINGKASAN

**Politisasi Anti-Menara Masjid di Swiss dan Implikasinya Terhadap Opini Publik Internasional**, Nur Dina Camelia, 110910101022; 2015: 124 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Swiss merupakan negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, terbukti dengan masih diterapkannya sistem demokrasi di Swiss hingga saat ini. Sistem demokrasi langsung di Swiss menerapkan beberapa instrumen yaitu: referendum *mandatory*, referendum opsional, dan inisiatif populer. Inisiatif populer merupakan sebuah sarana yang paling sering digunakan oleh masyarakat Swiss, karena melalui inisiatif tersebut masyarakat dapat mengajukan proposal mengenai berbagai permasalahan terkait politik.

Pada tahun 2008 terdapat sebuah proposal inisiatif populer yang menyudutkan sebuah kelompok masyarakat di Swiss. Proposal tersebut berkaitan dengan pelarangan bangunan menara masjid baru di Swiss. Hal ini menimbulkan berbagai perdebatan panas terkait bagaimana eksistensi menara masjid di Swiss dikaitkan dengan keberadaan komunitas muslim di Swiss. Komunitas Muslim di Swiss mayoritas merupakan imigran dari berbagai negara yang mulai memasuki Swiss pada tahun 1960-an. Pada awalnya penduduk muslim Swiss dapat berintegrasi dengan masyarakat asli Swiss dengan baik. Hal tersebut dikarenakan Swiss memang dikenal sebagai negara multikulturalisme dan menghargai perbedaan. Namun kemudian terjadinya polemik mengenai eksistensi menara masjid di Swiss pada tahun 2005 mengakibatkan diajukan sebuah inisiatif populer anti-menara masjid pada tahun 2007. Kasus yang mengejutkan dan selama ini tidak pernah terjadi di Swiss ini bertentangan dengan nilai-nilai dasar konstitusi Swiss dan komitmennya terhadap prinsip demokrasi. Oleh karena itu politisasi anti-menara masjid di Swiss ini memperoleh berbagai reaksi dari publik internasional.

Inisiatif populer mengenai anti-menara masjid tersebut pertama kali terjadi di kanton Solothurn yang kemudian terus memicu berbagai resistensi di berbagai kanton lainnya. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh partai haluan kanan Swiss, SVP dan EDU, untuk menjadikannya isu yang diusung melalui inisiatif populer. Mereka mengajukan inisiatif tersebut pada tanggal 8 Juli 2008, yang kemudian diputuskan untuk dilaksanakan referendum pada tanggal 29 November 2009. Meski demikian inisiatif tersebut mendapat perlawanan dari berbagai pihak seperti aktifis HAM, kelompok organisasi gereja, serta pemerintah Swiss sendiri yang mengeluarkan rekomendasi resmi untuk menolak inisiatif tersebut. Namun ternyata rekomendasi pemerintah tersebut tidak berhasil, terbukti dengan hasil referendum yang menyatakan bahwa 57,5% masyarakat Swiss mendukung larangan menara masjid baru di Swiss tersebut.

Dalam penelitian ini digunakan metode triangulasi yaitu metode yang menggunakan perpaduan antara metode *library research* (kualitatif) dan metode *content analysis* (kuantitatif). Penggunaan metode ini digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana proses politisasi anti-menara masjid di Swiss dan kecenderungan opini publik internasional terkait kasus tersebut secara objektif.

Setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa upaya pelarangan menara masjid di Swiss tersebut merupakan sebuah upaya politisasi terkait sentimen anti-menara masjid dengan memanfaatkan sistem demokrasi langsung yang selama ini telah diterapkan di Swiss. Jika diamati lebih lanjut inisiatif tersebut mengindikasikan tindakan xenofobia yang kemudian dilegalkan kedalam konstitusi Swiss. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan komitmen Swiss yang selama ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi terkait kesetaraan dan multikulturalisme. Oleh karena itu respons publik internasional sangatlah masif terkait larangan tersebut. Sebesar 80% opini publik internasional menentang larangan menara masjid di Swiss tersebut, sedangkan 13,3% opini publik internasional mendukung dan 6,7% bersifat netral.

## PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang diberikan olehNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Politisasi Anti-Menara Masjid di Swiss dan Implikasinya Terhadap Opini Publik Internasional. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos, M. Si., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan perhatian untuk penulis sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini;
2. Drs. M. Nur Hasan, M. Hum., selaku Dosen pembimbing akademik (DPA) penulis yang selama ini telah banyak membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis;
3. Tim Penguji Ujian Skripsi; Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA. Ph.D., Fuat Albayumi, S.IP, MA., dan Honest Dody Molasy, S.Sos, MA.
4. Orang tua penulis, H. Syaifullah Farid Wadjdi SH. MH. Dan Dra. Hj. Waqi'atul Masruroh M.Si. yang selalu memberikan dukungan moril dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Nenek penulis, Nur Hayati, dan bibi penulis, Fadilah, yang telah memberikan dukungannya melalui doa yang tanpa henti.
6. Imam Syafi'ie yang telah menemani dan menyemangati penulis selama ini sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Sahabat terbaik penulis selama ini, Prama Esty Mulyantini, yang selalu meluangkan waktu untuk mendampingi dan mendengarkan berbagai keluh kesah penulis selama ini.

8. Teman-teman sejawat dan seperjuangan penulis yaitu Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember angkatan 2011, yang telah memberikan semangat perjuangan dan persahabatan dan berbagai ilmu positif lainnya kepada penulis.
9. Teman-teman KKN penulis, Yayang Pradiatama, Debby Ismira, Iin Isnaini dan Alifah Rodliyah, yang selama ini telah saling menyemangati dan memberikan berbagai hal positif kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat terbaik 11 tahun ini; Karmila Andriana, S. Nurul Hidayati, Trisna Puji Astuti, Eva Mutafarriqoh, Nur Khofifah, Ummu Hanifah Robi'ah Afsa dan Nurul Hanifah, yang selama ini telah menjadi sahabat hati terbaik penulis.
11. Saudari dan pendiri Rumpun Aksara Panti-Jember, mbak Yuli, yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalaman baru selama ini kepada penulis.
12. Adik-adik di Rumpun Aksara yang sangat giat belajar, Waroh, Lusi, Ana, Icha, Ilmi, Agung, Robi, Fira, Fifin, Dwi, Gita, Ifa, dan yang lainnya yang mampu menyemangati dan menginspirasi penulis, sehingga penulis semakin giat dan bersemangat untuk terus melanjutkan pendidikan penulis.
13. Seluruh *civitas* akademika Universitas Jember terutama *civitas* akademika FISIP Universitas Jember.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, terima kasih kepada berbagai pihak yang telah disebutkan. Penulis menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 01 Juni 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Ruang Lingkup Pembahasan .....</b>	<b>7</b>
1.2.1 Batasan Materi .....	7
1.2.2 Batasan Waktu .....	8
<b>1.3 Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>1.4 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>1.5 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
1.5.1 Manfaat Metodologis .....	9
<b>1.6 Kerangka Dasar Pemikiran .....</b>	<b>10</b>
1.6.1 Konsep Xenofobia .....	10
1.6.2 Konsep Politisasi ( <i>Politicization</i> ) .....	17
1.6.3 Konsep Referendum .....	20

1.6.4	Prinsip Demokrasi .....	22
1.6.5	Konsep Opini Publik Internasional .....	25
<b>1.7</b>	<b>Argumen Utama .....</b>	<b>28</b>
<b>1.8</b>	<b>Metode Penelitian.....</b>	<b>28</b>
1.8.1	Teknik Pengumpulan Data .....	32
1.8.2	Teknik Analisis Data .....	33
<b>1.9</b>	<b>Sistematika Penulisan .....</b>	<b>34</b>
<b>BAB 2.</b>	<b>GAMBARAN UMUM DEMOKRASI LANGSUNG SWISS ..</b>	<b>36</b>
<b>2.1</b>	<b>Sistem Politik Pemerintahan Swiss.....</b>	<b>36</b>
2.1.1	Badan Pemerintahan Swiss .....	38
2.1.2	Partai-partai di Swiss .....	41
<b>2.2</b>	<b>Demokrasi Langsung Swiss .....</b>	<b>42</b>
2.2.1	Proses Implementasi Demokrasi Langsung di Swiss ..	45
2.2.2	Proses Pengajuan Inisiatif Populer .....	48
<b>BAB 3.</b>	<b>DINAMIKA POLITISASI ANTI-MENARA MASJID DI</b>	
	<b>SWISS .....</b>	<b>50</b>
<b>3.1</b>	<b>Kondisi Kaum Muslim di Swiss .....</b>	<b>50</b>
<b>3.2</b>	<b>Hakikat Menara dan Kaitannya dengan Tempat</b>	
	<b>Beribadah Umat Islam .....</b>	<b>52</b>
<b>3.3</b>	<b>Peningkatan Sentimen Anti-Menara Masjid di Swiss .....</b>	<b>55</b>
3.3.1	Pihak-pihak dibalik Politisasi Anti-Menara Masjid di	
	Swiss .....	59
3.3.2	Proses Politisasi Anti-Menara Masjid di Swiss .....	63
<b>3.4</b>	<b>Respons Domestik Terhadap Larangan Menara Masjid ..</b>	<b>72</b>

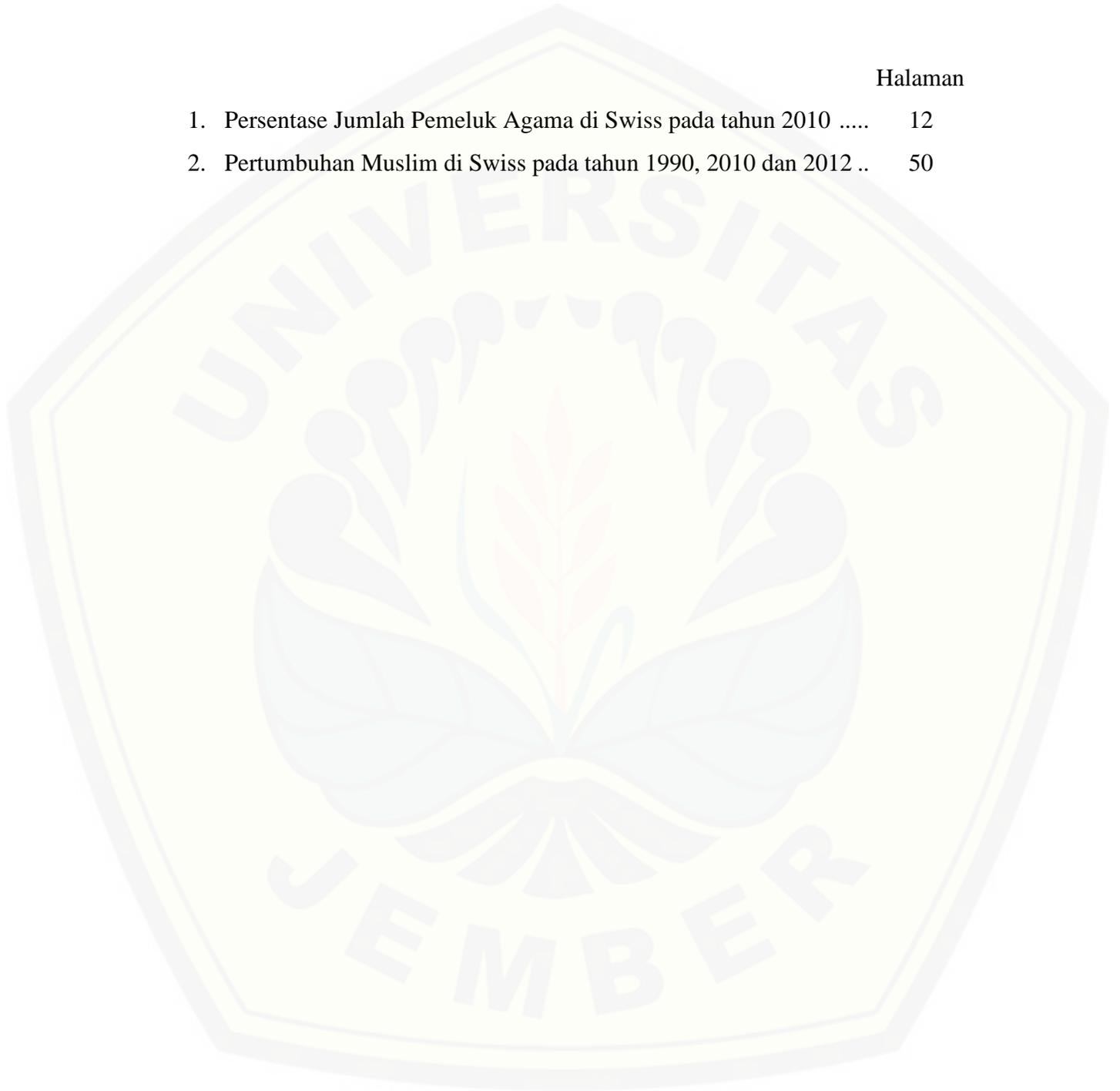
<b>BAB 4. OPINI PUBLIK INTERNASIONAL TERKAIT LARANGAN MENARA MASJID DI SWISS .....</b>	<b>82</b>
<b>4.1 Renspons Publik Internasional Terhadap Larangan     Menara Masjid di Swiss .....</b>	<b>82</b>
<b>4.2 Sumber Opini Publik Internasional Mengenai Larangan     Menara Masjid di Swiss .....</b>	<b>86</b>
<b>4.3 Isu Opini Publik Internasional Mengenai Larangan     Menara Masjid di Swiss .....</b>	<b>88</b>
<b>4.4 Arah Opini Publik Internasional Mengenai Larangan     Menara Masjid di Swiss .....</b>	<b>91</b>
<b>4.5 Analisis Keseluruhan Opini Publik Internasional     Mengenai Larangan Menara Masjid di Swiss .....</b>	<b>94</b>
4.5.1 Opini Organisasi Internasional Mengenai Larangan Menara Masjid di Swiss .....	94
4.5.2 Opini Institusi Media Internasional Mengenai Larangan Menara Masjid di Swiss .....	101
4.5.3 Opini Berbagai Negara Mengenai Larangan Menara Masjid di Swiss .....	104
 <b>BAB 5. KESIMPULAN .....</b>	<b>111</b>
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Jumlah Warga Asing di Swiss Berdasarkan Wilayah dan Asal Negara Non- Uni Eropa pada tahun 2007 .....	13
2. Tipologi Referendum .....	21
3. Sumber Pengumpulan Data Opini Publik Internasional .....	33
4. Referendum dan Populer Inisiatif yang telah berhasil dilaksanakan (1848-2009) .....	44
5. Data pemungutan Suara ( <i>vote</i> ) terpilih .....	46
6. Data hasil pelaksanaan Referendum Anti-Menara Masjid Swiss ...	71
7. Sumber Opini Publik Internasional Mengenai Larangan Menara Masjid di Swiss .....	87
8. Isu Opini Publik Internasional Mengenai Larangan Menara Masjid di Swiss .....	89
9. Isu Opini berdasarkan Sumber Opini Publik Internasional Mengenai Larangan Menara Masjid di Swiss.....	90
10. Arah Opini Publik Internasional Mengenai Larangan Menara Masjid di Swiss .....	92
11. Arah Opini berdasarkan Isu Opini Publik Internasional Mengenai Larangan Menara Masjid di Swiss.....	92
12. Arah Opini Publik Internasional Mengenai Larangan Menara Masjid di Swiss Berdasarkan Sumber Opini.....	93

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
1. Persentase Jumlah Pemeluk Agama di Swiss pada tahun 2010 .....	12
2. Pertumbuhan Muslim di Swiss pada tahun 1990, 2010 dan 2012 ..	50



**DAFTAR SINGKATAN**

AoC	= <i>Alliance of Civilizations</i>
BBC	= <i>British Broadcasting Corporation</i>
BDP	= <i>Bürgerlich-Demokratische Partei / Conservative Democratic Party</i>
CR	= <i>Coeffisien Reliability</i>
CSP	= <i>Christian Social Party</i>
CVP	= <i>Christlichdemokratische Volkspartei / Christian Democrat People's Party</i>
DDPS	= <i>Department of Defence, civil Protection and Sport</i>
DETEC	= <i>Department of the Environment, Transport, Energy and Communications</i>
EAER	= <i>Economic Affair, Education and Research</i>
EDU	= <i>Eidgenössisch-Demokratische Union / Federal Democratic Union</i>
EVP	= <i>Evangelische Volkspartei / Evangelical People's Party</i>
FDF	= <i>Federal Department of Finance</i>
FDFA	= <i>Federal Department of Foreign Affairs</i>
FDHA	= <i>Federal Department of Home Affairs</i>
FDJP	= <i>Federal Department of Justice and Police</i>
FIS	= <i>Front Islamic du Salut</i>
GLP	= <i>Green Liberal Party</i>
ILO	= <i>International Labour Organization</i>
IRLA	= <i>International Religious Liberty Association</i>



MCG	= <i>Mouvement Citoyens Genevois / The Geneva Citizens' Movement</i>
OKI	= <i>Organisasi Kerjasama Islam</i>
OSCE	= <i>Organization for Security and Co-operation in Europe</i>
PBB	= <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
SCR	= <i>The Swiss Council of Religions</i>
SP	= <i>Sozialdemokratische Partei / Social Democratic Party</i>
SVP	= <i>Schweizerische Volkspartei / Swiss People's Party</i>
UNHCR	= <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
WHO	= <i>World Health Organization</i>

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Swiss merupakan sebuah negara dengan sejarah demokrasi yang panjang. Selama ini Swiss dikenal sebagai sebuah negara netral dengan sistem pemerintahan demokrasi yang telah berlangsung lama. Kenetralan negara Swiss dikarenakan Swiss tidak pernah terlibat dalam perang terhadap pemerintahan asing sejak tahun 1815.<sup>1</sup> Oleh karena itu, Swiss dijadikan tuan rumah berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *International Labour Organization* (ILO), *World Health Organization* (WHO) dan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR).

Sistem pemerintahan demokrasi Swiss merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Sebagai sebuah Negara Konstitusional, Swiss menerapkan sistem semi-demokrasi langsung dikarenakan sistem pemerintahan Swiss menggabungkan elemen dari demokrasi representatif (dalam bentuk sebuah parlemen pilihan yang berkuasa untuk menyetujui peraturan) dengan mekanisme demokrasi langsung.<sup>2</sup> Sistem pemerintahan tersebut yang membuat sistem demokrasi Swiss berbeda dengan demokrasi negara-negara barat lainnya. Demokrasi Swiss sangat berbeda dari sistem lain di dunia karena dalam demokrasi langsung Swiss, rakyat berdasarkan inisiatif dan referendum, dapat menyelesaikan sejumlah besar kebijakan yang mempengaruhi hidup mereka melalui pemilihan suara langsung. Oleh karena itu menurut Alfred R. Berkeley III dalam prakata buku *Direct Democracy in Switzerland*, demokrasi Swiss

---

<sup>1</sup> Bill Walker. 2005. "They Didn't Attack Switzerland". Civil Liberties Bureaucracy. dikutip dari <http://www.strike-the-root.com/51/walker/walker1.html> (05 November 2014).

<sup>2</sup> Daniel Moeckli. 2011. Of Minarets and Foreign Criminals: Swiss Direct Democracy and Human Right. *Human Rights Law Review*. Vol. 11. No. 4. Inggris: Oxford University Press. Halaman 776.

dapat berfungsi sebagai sebuah laboratorium demokrasi karena demokrasi Swiss mencakup ide murni demokrasi dengan sejarah demokrasinya yang panjang.<sup>3</sup>

Demokrasi Swiss menjadi berbeda karena pada demokrasi negara-negara Barat atau demokrasi di negara-negara lainnya seperti di Asia, rakyat hanya terlibat sedikit sekali dalam pembuatan keputusan tentang kebijakan ekonomi dan sosial untuk diri mereka sendiri. Biasanya mereka menggunakan para ahli dan wakil terpilih untuk membuat banyak keputusan bagi rakyat. Swiss juga menggunakan beberapa perangkat tersebut, tetapi berbeda dengan demokrasi lainnya, rakyat Swiss memiliki keleluasaan yang lebih besar sebagai pemilih sehingga dapat membuat puluhan bahkan ratusan keputusan tertentu sendiri. Penerapan demokrasi langsung di Swiss dilakukan melalui referendum atau *popular initiative* sebagai instrumen. Penggunaan instrumen tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pelaksanaan demokrasi langsung di Swiss. Semua warga Swiss memiliki hak untuk mengajukan hukum baru dengan mengajukan sebuah inisiatif, meskipun inisiatif-inisiatif tersebut biasanya diusulkan oleh *pressure groups* dari pada individual.<sup>4</sup> Berdasarkan ketentuan dalam pasal 139 Swiss, sebuah inisiatif yang diajukan harus memperoleh minimal 100.000 tanda tangan warga dalam jangka waktu 18 bulan. Jika telah terpenuhi maka akan diadakan pemilihan umum di tingkat nasional.

Masih diterapkannya sistem demokrasi langsung di Swiss karena masyarakat Swiss percaya bahwa prinsip-prinsip demokrasi dalam demokrasi Swiss dijamin dalam sebuah bentuk pemerintahan yang menjunjung tinggi kebebasan dan martabat individu, oleh karena itu sistem kekuasaan tetap berada di tangan rakyat dan tidak bisa diwakili. Jika hal tersebut dilanggar maka dianggap telah melanggar kehendak dan hak rakyat. Berdasarkan implementasinya selama ini menunjukkan bahwa Parlemen Swiss sangat berhati-hati dalam pelaksanaan pemilihan suara melalui

---

<sup>3</sup> Grogery A. Fossedal. 2002. *Direct Democracy in Switzerland*. New Jersey: Transaction Publishers. Halaman IX.

<sup>4</sup> Johannes Matyassy & Seraina Flury. 2011. *Challenges for Switzerland's Public Diplomacy: Referendum on Banning Minarets*. Los Angeles: Figueroa Press. Halaman 16.

inisiatif populer karena prinsip demokrasi di Swiss mendapat prioritas mutlak sebelum aturan hukum.<sup>5</sup>

Meski pelaksanaan demokrasi langsung Swiss melalui inisiatif populer selama ini dipandang sebagai sebuah sistem yang mampu memenuhi keinginan partisipasi politik masyarakat, namun terkadang hal tersebut juga mampu menimbulkan polemik. Dalam dua dekade terakhir, jumlah inisiatif populer di Swiss yang dikritik karena tidak mematuhi hak asasi manusia secara signifikan meningkat.<sup>6</sup> Salah satu inisiatif yang menimbulkan polemik adalah kasus kontroversial mengenai pencetusan inisiatif “Anti-Menara”. Inisiatif mengenai anti-menara ini ditujukan kepada pembangunan menara masjid sebagai bagian arsitektur tempat beribadah umat Islam di Swiss. Tindakan ini dilihat sebagai suatu hal yang berlebihan dan cenderung menyudutkan posisi kaum muslim di Swiss. Pada dasarnya terdapat 350.000 sampai 400.000 kaum Muslim yang tinggal di Swiss dan dapat terintegrasi dengan baik. Saat inisiatif tersebut diajukan terdapat 150 tempat beribadah, berupa masjid atau musholla, bagi kaum Muslim di Swiss dan hanya empat masjid yang memiliki menara.<sup>7</sup> Dari empat masjid yang memiliki menara tidak ada satupun dari menara tersebut yang digunakan untuk menyuarakan adzan karena selama ini adanya larangan di Swiss terkait larangan adzan dengan pengeras suara lewat menara masjid demi alasan kenyamanan.<sup>8</sup>

Kasus ini bermula ketika terdapat usulan dari beberapa masjid besar di Swiss, seperti masjid-masjid di kanton Solothurn, Bern dan St. Gallen untuk mendirikan menara masjid. Usulan ini kemudian dijadikan sebagai bahan inisiatif publik oleh partai kanan - *Schweizerische Volkspartei / Swiss People's Party* (SVP) sebagai

---

<sup>5</sup> Christmann, Anna. 2009. “Do Voters Care About Rights? Protection of Rights and the Rule of Law in a (semi-) Direct Democracy”. *Working paper for presentation at the ECPR General Conference. Center for International and Comparative Studies Institute for Political Science. Swiss: University of Zurich.* Halaman 01.

<sup>6</sup> *Ibid.* Halaman 1.

<sup>7</sup> Johannes Matyassy & Seraina Flury. *Op. cit.* Halaman 17.

<sup>8</sup> Ismatillah N. Nuad. 2010. Bukan Sentimen Atau Diskriminasi. *Reformata.* Edisi 122 Tahun VII. Halaman 04.

kampanye politik mereka. Partai SVP memanfaatkan sistem demokrasi langsung untuk membangun sentimen anti-menara masjid tersebut.<sup>9</sup>

Anggota partai SVP meluncurkan inisiatif ‘melawan pembangunan menara’ (*against the construction of minarets*) pada tahun 2007. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2008 diajukan tandatangan pendukung sejumlah 114.137. Inisiatif ini didukung oleh partai *Eidgenössisch-Demokratische Union / Federal Democratic Union* (EDU), sebuah partai kecil konservatif Kristen. Sedangkan pemerintah, mayoritas parlemen, partai politik lainnya, organisasi gereja dan organisasi masyarakat lainnya menyarankan untuk menolak inisiatif tersebut.<sup>10</sup> Berdasarkan pada inisiatif yang diajukan pada hari Minggu tanggal 29 November 2009, masyarakat Swiss melakukan pemungutan suara dalam sebuah referendum populer mengenai larangan pembangunan menara di wilayah Swiss. Hasil dari pemungutan suara tersebut adalah 57,5% mendukung dan hanya 42,5% yang menolak referendum tersebut.<sup>11</sup> Hasil dari referendum tersebut mengejutkan banyak pihak, dikarenakan berdasarkan polling yang dilakukan sebelum referendum diprediksikan hanya 35% dari warga yang akan mendukung referendum tersebut.<sup>12</sup>

Hasil referendum tersebut menghasilkan berbagai perdebatan di tingkat domestik dan menarik perhatian masyarakat dunia. Perdebatan dalam negeri pasca referendum berlangsung sengit. Para ahli dan pengamat membahas secara terperinci mengenai kasus ini. Debat antara pendukung partai kiri-liberal dan partai-kanan konservatif juga belum berakhir. Pendukung partai kiri-liberal yang melihat kasus ini sebagai sebuah pelanggaran hak asasi berpandangan bahwa dalam sebuah negara yang berlandaskan hukum, rakyat tetap harus tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk menghormati hak asasi manusia yang tercantum dalam prinsip-prinsip

---

<sup>9</sup> Martin Sinaga. 2010. Dipicu Sentimen Politik. *Reformata*. Edisi 122 Tahun VII. Halaman 4.

<sup>10</sup> Jean-Francois Mayer. 2011. ‘Switzerland Without Minaret’ dalam Patrick Haenni dan Stephane Lathion (Ed). *The Swiss Minaret Ban: Islam in Question*, Swiss: Religioscope Institute. Halaman 07.

<sup>11</sup> Website Resmi Konfederasi Swiss. 2009. “Vorlage Nr. 547 Übersicht”. Dikutip dari <http://www.admin.ch/ch/d/pore/va/20091129/det547.html> (16 Oktober 2014).

<sup>12</sup> Martin Baumann. 2009. *Anxieties, Banning Minarets and Populist Politics in Switzerland – a Preliminary Analysis*. Swiss: University of Lucerne. Halaman 1.

demokrasi universal. Oleh karena itu jika terdapat sebuah hukum yang melanggar hak asasi manusia maka tidak seharusnya hukum tersebut dilaksanakan. Sedangkan partai kanan-konservatif melihat bahwa rakyat sebagai kedaulatan absolut yang memiliki kehendak tanpa batas.<sup>13</sup> Oleh karena itu menurut mereka jika sebuah norma konstitusi yang telah disetujui rakyat tidak ditetapkan karena adanya larangan dari pengadilan maka hal tersebut dapat dilihat sebagai ejekan terhadap demokrasi (*mockery of democracy*).<sup>14</sup> Oleh karena itu pelarangan anti menara sampai saat ini masih diberlakukan karena mereka melihat hal ini sebagai sebuah kesepakatan yang telah disetujui oleh rakyat. Para pendukung inisiatif anti-menara melihat bahwa ini bukanlah pelanggaran hak asasi manusia, mereka menganggap bahwa menara sebagai simbol politik islamisasi oleh karena itu mereka merasa perlu untuk menghentikannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Toni Brunner, Ketua SVP, setelah dilaksanakannya referendum sebagai berikut: “*Voters had clearly rejected the idea of parallel societies and the further expansion of Islam – including radical, political Islam – in Switzerland*” (Para pemilih jelas menolak ide masyarakat paralel dan ekspansi lebih lanjut oleh Islam – termasuk politik Islam radikal – di Swiss).<sup>15</sup>

Meskipun referendum ini hanya terkait pelarangan pembangunan menara masjid namun referendum ini dapat diidentifikasi mengandung unsur xenofobia terhadap Islam di Swiss atau lebih sering dikenal dengan Islamofobia. Referendum tersebut juga dinilai sebagai sebuah tindakan diskriminasi terhadap kaum muslim di Swiss. Oleh karena itu kasus yang terjadi di Swiss ini menarik banyak perhatian publik internasional. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh *Swiss Federal Department of Foreign Affairs* (FDFA) ketertarikan media internasional terhadap referendum anti-menara masjid ini sangatlah besar.<sup>16</sup> Hal tersebut membuat referendum anti-menara masjid menjadi sebuah inisiatif populer yang paling banyak

---

<sup>13</sup> Daniel Moeckli. *Op. Cit.* Halaman 775.

<sup>14</sup> *Ibid.* Halaman 784.

<sup>15</sup> Swiss Info. 2009. “Minaret Result Seen as Turning Point”. SWI. Dikutip dari <http://www.swissinfo.ch/eng/minaret-result-seen-as--turning-point-/7793740> (20 November 2014).

<sup>16</sup> Johannes Matyassy & Seraina Flury. *Loc. Cit.* Halaman 27.

memperoleh respons internasional. Swiss mendapatkan ulasan pemberitaan media secara masif dan menghadapi kritikan terbuka dari berbagai pihak internasional baik pemimpin negara, organisasi internasional dan para akademisi yang memusatkan perhatian mereka pada kasus larangan menara di Swiss.

Tidaklah mengherankan jika peristiwa domestik terkait inisiatif anti-menara di Swiss tersebut memperoleh banyak sorotan dari masyarakat internasional. Hal tersebut dikarenakan sejak munculnya kontroversi mengenai menara masjid di Swiss pada tahun 2005, masyarakat internasional juga sedang menghadapi meningkatnya sentimen anti-Islam secara global pasca terjadinya serangan WTC pada September 2001. Terlebih setelah itu juga terjadi berbagai tindakan anti-Islam lainnya di berbagai negara seperti meningkatnya sentimen anti-hijab di Prancis pada tahun 2003-2004<sup>17</sup>, munculnya film *Submission* mengenai wanita muslim di Belanda pada tahun 2004<sup>18</sup> dan menyebarnya kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW di 17 surat kabar Denmark pada tahun 2008<sup>19</sup>.

Kasus Islamofobia di Swiss ini juga semakin menjadi perhatian dikarenakan selama ini Swiss terkenal dengan sejarahnya yang panjang terkait demokrasi dan multikulturalisme. Swiss seringkali menjadi percontohan sebagai sebuah negara yang berhasil mengintegrasikan pluralisme kebudayaan menjadi suatu kesatuan yang stabil dan harmonis.<sup>20</sup> Oleh karena itu pelaksanaan referendum anti-menara yang terjadi pada tahun 2009 tersebut mengejutkan berbagai kalangan internasional. Berbagai reaksi dari kalangan internasional tentu akan mempengaruhi citra dan perilaku Swiss di kancah dunia. Setelah selama ini Swiss selalu dikenal sebagai negara demokrasi dan multikultural, serta selalu bersifat netral dalam politik luar negerinya, kini Swiss menghadapi respons khalayak internasional terkait fenomena domestik yang dimiliki.

---

<sup>17</sup> International Helsinki Federation for Human Rights. 2005. *Intolerance and Discrimination against Muslims in the EU, Developments since September 11*. Wickenburg: IHF. Halaman 66.

<sup>18</sup> *Ibid.* Halaman 105.

<sup>19</sup> OKI. 2010. "Third OIC Observatory Report on Islamophobia". *Report presented to The 37<sup>th</sup> Council of Foreign Ministers*. Tajikistan: Organisasi Kerjasama Islam. Halaman 1.

<sup>20</sup> Kurt Mayer. Cultural Pluralisme and Linguistic Equilibrium in Switzerland. *American Sociological Review*. Vol. 16. No. 2. Rhode Island: Brown University. Halaman 157.

## **1.2 Ruang Lingkup Pembahasan**

Dalam suatu penelitian ilmiah dibutuhkan pembatasan serta ruang lingkup yang jelas terhadap masalah yang menjadi inti bahasan. Batasan ruang lingkup pembahasan berisi hal-hal yang ingin penulis bahas dalam tulisannya. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk membatasi permasalahan agar tidak berkembang terlalu luas atau keluar dari topik pembahasan. Oleh karena itu untuk mempermudah pembahasan dan penelitian dalam karya tulis ilmiah ini, batasan yang akan digunakan dalam tulisan ini ialah batasan materi dan batasan waktu.

### **1.2.1 Batasan Materi**

Batasan materi berguna untuk menunjukkan ruang pembahasan sebuah peristiwa atau obyek yang akan dianalisis, yaitu cakupan kawasan atau obyek studinya. Penulis membatasi permasalahan penelitiannya pada proses politisasi anti-menara dan implikasinya terhadap opini publik internasional. Alasan Penulis memilih untuk menganalisis proses politisasi anti-menara Swiss dikarenakan hal ini merupakan sebuah isu yang menarik terkait upaya yang dilakukan SVP dalam upaya menjadikan sentimen anti-menara sebagai sebuah isu politik. Selain itu penulis juga menganalisa implikasinya terhadap opini masyarakat internasional mengenai referendum tersebut yang dianggap cenderung melanggar prinsip-prinsip demokrasi universal.

Opini publik internasional di sini menjadi penting karena dengan semakin terintegrasinya negara-negara di era globalisasi ini sebuah masalah dalam negeri suatu negara dapat menjadi perhatian dan memberi dampak kepada negara lain di belahan dunia lainnya. Opini publik internasional terkait referendum anti-menara tersebut akan mempengaruhi citra Swiss di kancah internasional. Sedangkan yang dimaksud masyarakat internasional disini akan dipilih dari opini media internasional, organisasi-organisasi internasional serta beberapa negara terkait opini mereka mengenai larangan pembangunan menara masjid baru di Swiss.

### 1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu diperlukan untuk mengkaji rentang waktu yang dikaji penulis dalam karya ilmiahnya. Rentang waktu dalam karya tulis ini dimulai pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Penulis memilih tahun 2005 karena pada tahun tersebut merupakan awal munculnya konflik terkait sentimen anti menara masjid di Swiss oleh partai SVP. Tahun 2010 menjadi akhir batasan waktu karena pelaksanaan referendum anti-menara yang dilaksanakan pada bulan November 2009 menimbulkan berbagai respon dari masyarakat internasional yang terus menjadi pembahasan dan perdebatan panjang di berbagai forum internasional. Oleh karena itu tahun 2010 dianggap cukup mewakili beragam opini masyarakat internasional terkait referendum anti-menara di Swiss. Walaupun penulis telah menetapkan batasan waktu dalam penelitian ini, penulis juga akan menambahkan beberapa data faktual lainnya guna memperkuat argumen penulis terkait dengan kepentingan penulisan karya tulis ini.

### 1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan proses menuju kristalisasi dari berbagai hal yang terdapat dalam latar belakang.<sup>21</sup> Rumusan masalah dijadikan sebagai dasar pijakan bagi peneliti untuk menentukan desain dan strategi penelitian. Selanjutnya, dari rumusan masalah akan dapat diketahui tujuan yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Selain itu, dapat juga diturunkan menjadi argumen utama, juga metode penelitian serta teknik mengumpulkan dan menganalisis data. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan yang nantinya akan dijawab dalam skripsi ini yaitu:

**“Bagaimana proses politisasi anti-menara masjid di Swiss dan implikasinya terhadap opini publik internasional?”**

---

<sup>21</sup> Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press. Halaman 21.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan merupakan arahan jawaban dari deskripsi sementara dari asumsi. Tujuan penelitian mengemukakan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan.<sup>22</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui proses politisasi anti-menara masjid di Swiss dan implikasinya terhadap opini publik internasional terkait larangan menara masjid di Swiss.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian disebut juga signifikansi penelitian. Manfaat penelitian memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah, maupun masyarakat luas.<sup>23</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, manfaat dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga hal, yaitu manfaat metodologis, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dalam penelitian ini hanya akan dijelaskan mengenai manfaat metodologis dari penelitian ini.

##### 1.5.1 Manfaat Metodologis

Menjadi salah satu masukan dalam diskursus penelitian di bidang ilmu hubungan internasional, dimana dalam penelitian ini menggunakan metode perpaduan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini nantinya akan disertakan sebuah metode yang meminjam metode dari disiplin ilmu lainnya yaitu disiplin ilmu komunikasi, namun tetap dapat memberikan kontribusi nyata bagi disiplin ilmu hubungan internasional.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

## 1.6 Kerangka Dasar Pemikiran

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini digunakan beberapa teori atau konsep untuk menjelaskan dan menganalisa permasalahan yang ada. Pemilihan teori atau konsep disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini digunakan beberapa konsep untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Konsep adalah unsur pokok daripada penelitian. Penentuan dan perincian konsep ini dianggap sangat penting agar persoalan-persoalan utamanya tidak menjadi kabur. Konsep yang terpilih perlu ditegaskan, agar tidak terjadi salah pengertian mengenai konsep tersebut.<sup>24</sup>

Dalam upaya menganalisa dan meneliti implikasi referendum anti-menara di Swiss terhadap opini masyarakat internasional, maka penulis menggunakan beberapa konsep dalam menulis penelitian ini, antara lain:

- (1) Konsep Xenofobia (*Xenophobia*)
- (2) Konsep Politisasi (*Politicization*)
- (3) Konsep Referendum
- (4) Prinsip Demokrasi
- (5) Opini Publik Internasional

### 1.6.1 Konsep Xenofobia (*Xenophobia*)

Awalnya kata xenofobia berasal dari bahasa Yunani *Xenos* yang berarti 'orang asing' dan 'tamu' dan *Phobos* yang berarti 'takut'. Dengan demikian, xenofobia berarti 'takut orang asing', tetapi biasanya istilah ini diartikan sebagai 'kebencian terhadap orang asing'. Xenofobia dapat dipahami sebagai orientasi sikap permusuhan terhadap non-pribumi dalam masyarakat tertentu.<sup>25</sup> Sedangkan dalam Kamus Merriam-

---

<sup>24</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmadi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. Halaman 140-141.

<sup>25</sup> UNESCO. (Tanpa Tahun). "Xenophobia". UNESCO. Dikutip dari <http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/xenophobia/> (29 November 2014).

Webster, xenofobia diartikan sebagai ketakutan dan kebencian terhadap orang asing atau sesuatu yang aneh atau asing.<sup>26</sup>

Xenofobia juga dapat didefinisikan sebagai ketakutan atau kebencian terhadap orang asing yang dirasakan oleh penduduk negara-negara penerima (*host countries*) imigran. Xenofobia akan semakin dirasakan oleh penduduk negara-negara penerima terutama ketika imigrasi terjadi secara tiba-tiba dan dalam jumlah yang besar. Timbulnya xenofobia tersebut membuat penduduk dari negara penerima menganggap para pendatang baru akan menimbulkan ancaman terbesar bagi mereka, baik ancaman secara aktual ataupun ancaman yang hanya dapat dirasakan.<sup>27</sup>

Dalam buku Ray Taras yang berjudul *Europe Old and New: Transnationalism, Belonging, Xenophobia* dijelaskan bahwa terdapat sebuah studi pelopor mengenai xenofobia di Uni Eropa yang memaparkan satu temuan bahwa orang asing seringkali dipandang sebagai pembawa budaya yang berbeda, perbedaan budaya tersebut berpotensi mengancam integritas bangsa negara penerima. Adanya keyakinan bahwa negara atau bangsa adalah tempat dimana berbagai nilai kritis dan kepercayaan disebarkan kepada anggota masyarakat, menghasilkan asumsi bahwa bangsa mewujudkan budaya. Beragam budaya yang berbeda masing-masing memiliki sebuah perpaduan unik yang merupakan hasil dari berbagai campuran dari orientasi yang berbeda. Oleh karena itu orang asing diyakini pasti akan memberikan ancaman dengan mengubah budaya domestik melalui pengenalan berbagai orientasi baru. Keanggotaan dalam suatu bangsa seringkali dikaitkan dengan warisan etnis yang kemudian disebut sebagai identitas budaya nasional, oleh karena itu karakter suatu budaya dengan budaya lainnya pasti akan berbeda. Identitas budaya nasional inilah

---

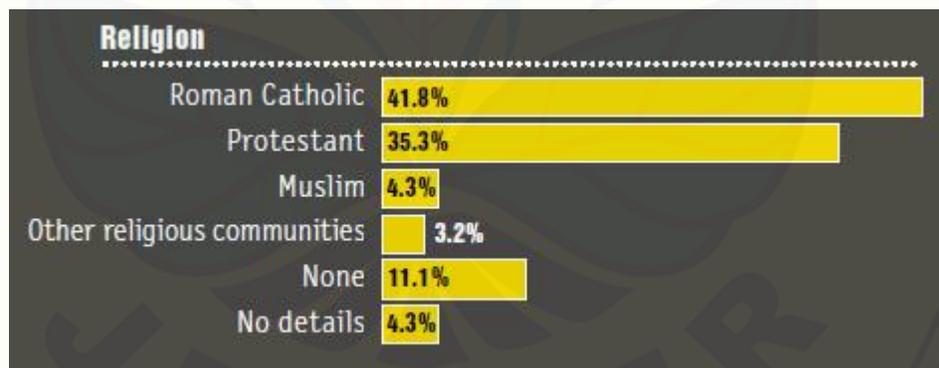
<sup>26</sup> Lihat Kamus Merriam Webster *online* melalui <http://www.merriam-webster.com/dictionary/xenophobia> (18 Oktober 2014).

<sup>27</sup> Silvana Claudia Barbali. 2009. *Coping with Xenophobia: Senegalese Migrants in Port Elizabeth*. Afrika Selatan: Rhodes University. Halaman 1.

yang kemudian memberikan kontribusi terhadap persepsi xenofobia terhadap berbagai kelompok budaya yang berbeda secara kaku.<sup>28</sup>

Kontribusi identitas budaya nasional tersebut seringkali membuat banyak orang sulit membedakan antara xenofobia dan rasisme. Xenofobia dan rasisme seringkali saling terkait, tetapi keduanya merupakan fenomena yang berbeda. Rasisme biasanya mengacu pada perbedaan berdasarkan perbedaan karakteristik fisik, seperti warna kulit, jenis rambut, wajah, dan karakteristik biologis lainnya, sedangkan xenofobia menyiratkan perilaku yang didasarkan pada gagasan bahwa yang lainnya adalah asing atau berasal dari luar masyarakat atau bangsa.<sup>29</sup>

Kasus yang terjadi di Swiss sangat berkaitan dengan perbedaan latar belakang dan pemahaman antar masyarakat asli Swiss dengan masyarakat pendatang yang kemudian menetap di Swiss. Berdasarkan data tahun 2010 agama mayoritas penduduk Swiss adalah Kristen dengan 41,8% katolik dan 35,3% protestan, sedangkan 21,4% lainnya beragama. Islam menjadi agama minoritas terbesar di Swiss dengan jumlah sekitar 4,3% dari total penduduk Swiss, dibandingkan dengan agama minoritas lainnya seperti Hindu, Budha dan Yahudi yang hanya sekitar 3,2%.<sup>30</sup>



Gambar 1. Persentase Jumlah Pemeluk Agama di Swiss pada tahun 2010

Sumber: Federal Chancellery. 2010. *The Swiss Confederation a Brief Guide 2010*. Bern: Federal Palace West Wing. Halaman 8.

<sup>28</sup> Ray Taras. 2009. *Europe Old and New: Transnationalism, Belonging, Xenophobia*. Amerika Serikat: Rowman & Littlefield Publisher. Halaman 83.

<sup>29</sup> UNESCO. "Xenophobia". *Loc. Cit.*

<sup>30</sup> Federal Chancellery. 2010. *The Swiss Confederation a Brief Guide 2010*. Bern: Federal Palace West Wing. Halaman 8.

Kasus referendum anti-menara di Swiss menyerang pihak kaum muslim di Swiss yang mayoritas dari mereka adalah imigran. Pada tahun 2007 terdapat 679,232 warga asing non-EU/EFTA, dimana sekitar 196.078 berasal dari Serbia dan Montenegro, 109.113 dari Asia, 75.382 dari Turki dan 66.599 dari Afrika. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Warga Asing di Swiss Berdasarkan Wilayah dan Asal Negara Non-Uni Eropa pada tahun 2007

<b>Kewarganegaraan</b>	<b>Jumlah Warga Asing</b>	<b>Total dalam persentase</b>
Total	1.703.744	100
EU-27/EFTA	1.024.542	60,1
non-EU-27/EFTA	679.232	39,9
<b>Regional</b>		
Eropa	1.454.077	85,3
Asia	109.113	6,4
Afrika	66.599	3,9
Amerika Latin	44.740	2,6
Amerika Utara	24.270	1,4
Oceania	3.777	0,2
<i>Stateless/Unknown</i>	1.198	0,1
<b>Negara Non-EU</b>		
Serbia dan Montenegro	196.078	11,5
Turki	75.382	4,4
Makedonia	60.509	3,6
Bosnia dan Herzegovina	41.654	2,4
Kroasia	38.114	2,2

Sumber: <http://www.migrationpolicy.org/article/switzerlands-non-eu-immigrants-their-integration-and-swiss-attitudes>.

Kelompok imigran terbesar di Swiss berasal dari Italia, Jerman, bekas negara Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) dan Albania, Portugal dan Turki (Turki dan Kurdi). Kelima kelompok tersebut mencapai sekitar 1,5 juta orang. Jumlah penduduk Swiss mencapai 7,7 juta jiwa, 1,7 juta (atau 22%) di antaranya adalah orang asing.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Daniel Ammann. 2011. "The Real Reasons Why the Swiss Voted to Ban Minarets". The World Post. Dikutip dari [http://www.huffingtonpost.com/daniel-ammann/the-real-reasons-why-the\\_b\\_373947.html](http://www.huffingtonpost.com/daniel-ammann/the-real-reasons-why-the_b_373947.html) (18 Oktober 2014).

Mereka membentuk mayoritas Muslim, Kristen Ortodoks, dan Hindu di Swiss.<sup>32</sup> Dari berbagai mayoritas agama para imigran, sebagian besar penduduk dari negara penerima lebih merasakan xenofobia terhadap para imigran muslim.<sup>33</sup> Hal itu dikarenakan terdapat sekitar 380.000 Muslim yang tinggal di Swiss - hampir tiga kali lipat dibandingkan dua puluh tahun yang lalu (tahun 1990: 148.000). Oleh karena itu kini Islam menjadi agama terbesar setelah Katolik dan Protestan di Swiss.<sup>34</sup> Berdasarkan hal tersebut xenofobia yang terjadi di Swiss merupakan ketakutan yang berlebihan terhadap Islam atau lebih dikenal dengan istilah Islamofobia.

### **Islamofobia (*Islamophobia*)**

Meningkatnya jumlah imigran muslim dari berbagai negara dan serangan teroris yang dilakukan oleh fundamentalis Islam menjadi argumen utama meningkatnya permusuhan terhadap imigran muslim dalam beberapa tahun terakhir.<sup>35</sup> Hal tersebut menyebabkan fenomena mengenai Islamofobia semakin menyebar luas. Islamofobia adalah penolakan terhadap Islam, kelompok Muslim dan individu Muslim atas dasar prasangka dan stereotip tertentu yang biasanya menyangkut hal yang emosional, kognitif, evaluatif atau bahkan berorientasi pada aksi seperti diskriminasi dan kekerasan.<sup>36</sup>

Islamofobia merupakan varian dari fenomena xenofobia yang mengarah kepada sebuah agama tertentu yaitu Islam. Hal tersebut sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan oleh Stolz<sup>37</sup> serta Kuhnel dan Leibhold<sup>38</sup> yang menyatakan bahwa

---

<sup>32</sup> Julie Schindall. 2009. "Switzerland's Non-EU Immigrants: Their Integration and Swiss Attitudes". Migration Information Source. Dikutip dari <http://www.migrationpolicy.org/article/switzerlands-non-eu-immigrants-their-integration-and-swiss-attitudes> (01 Desember 2014).

<sup>33</sup> James Mayfield. 2013. "Explaining the Rapid Rise of the Xenophobic Right in Contemporary Europe". GeoCurrents. Dikutip dari <http://www.geocurrents.info/cultural-geography/the-rapid-rise-of-the-xenophobic-right-in-contemporary-europe> (29 November 2014).

<sup>34</sup> Daniel Ammann. *Loc. Cit.*

<sup>35</sup> Marc Helbling. 2008. *Islamophobia in Switzerland: A New Phenomenon or a New Name for Xenophobia?*. Swiss: Department of Political Science University of Zurich. Halaman 2.

<sup>36</sup> *Ibid.* Halaman 4 – 5.

<sup>37</sup> J Stolz. 2005. 'Explaining Islamophobia. A Test of Four Theories Based on the Case of a Swiss City'. *Swiss Journal of Sociology* 31(3). Halaman: 547-566.

Islamofobia merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari xenofobia. Dalam artian bahwa orang yang mengalami xenofobia pada saat ini mayoritas merupakan orang-orang yang mengalami Islamofobia dikarenakan muslim saat ini menjadi kelompok imigran yang memiliki peran penting dikarenakan jumlahnya yang besar. Jika dianalogikan Islamofobia sama dengan italofofia (*italophobia*) yang dirasakan oleh penduduk Swiss pada tahun 1950 – 1960 dikarenakan banyaknya imigran asal Italia pada saat itu.<sup>39</sup>

Fenomena Islamofobia pada dasarnya telah ada sejak lama, namun fenomena ini semakin menonjol setelah terjadinya serangan terhadap *World Trade Center* (WTC) di Amerika Serikat pada 11 September 2001. Sejak saat itu terjadi peningkatan kebencian terhadap Islam di seluruh dunia. Bahkan tindakan anti-Islam atau anti-muslim menjadi realita yang dapat dengan mudah ditemukan pada saat ini. Ideologi kebencian terhadap Islam mengakibatkan banyak terjadinya serangan terhadap muslim di negara-negara barat di berbagai lapisan masyarakat.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh *The Cordoba Foundation* pada tahun 2010, ditemukan berbagai fakta atau bukti kekerasan terhadap masyarakat muslim di negara-negara barat. Seperti yang terjadi di Prancis, setiap tiga hari terdapat seorang muslim yang diserang serta setiap tiga minggu terdapat sebuah masjid yang dirusak. Masyarakat muslim Inggris juga memperoleh ancaman yang semakin meningkat seiring meningkatnya populasi muslim Inggris dan semakin bertambahnya jumlah masjid di sana, seperti ketika seorang wanita muslim Inggris yang ditunjuk di depan umum sebagai seorang teroris. Sedangkan di Jerman pada tahun 2009, seorang muslim kelahiran Mesir, Marwa El-Sherbani dibunuh secara brutal di ruang sidang

---

<sup>38</sup> S. Kühnel & J. Leibold. 2007. "Islamophobie in der deutschen Bevölkerung: Ein neues Phänomen oder nur ein neuer Namen? Ergebnisse von Bevölkerungsumfragen zur Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit 2003 bis 2005" dalam M. Wohlrab-Sahr and L. Tezcan (eds) *Konfliktfeld Islam in Europa*. Baden-Baden: Nomos. Halaman: 135-154.

<sup>39</sup> Marc Helbling. *Loc. Cit.*

saat sedang memberikan kesaksian terhadap pelaku yang melakukan penyerangan terhadapnya.<sup>40</sup>

Selain serangan terhadap Islam atau muslim yang dilakukan secara personal oleh masyarakat, serangan anti-Islam juga seringkali dilakukan oleh media atau partai politik yang semakin membuat fenomena Islamofobia semakin nampak dan jelas di masyarakat. Seperti yang terjadi di Polandia pada tahun 2002, ketika sebuah media utama Polandia dan beberapa politisi yang agresif menyerang komunitas kecil muslim dan menggambarkan mereka sebagai '*folk devil*'. Sedangkan di Denmark pada tahun 2006, surat kabar Denmark *Jullands-Posten* menerbitkan kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad SAW sebagai teroris. Selain itu pada tahun 2008 di Belanda diterbitkan film *Fitna* yang menghina Al-Qur'an. Fenomena Islamofobia juga terjadi di Swedia, ketika muslim Swedia yang mempraktekkan ajaran agama mereka akan disebut sebagai bagian dari kelompok radikal. Hal tersebut dikarenakan adanya pernyataan yang disampaikan pada tahun 2009 oleh Jimmie Akesson, ketua partai Demokrat Swedia, yang menyatakan bahwa Islam adalah ancaman asing terbesar bagi Swedia sejak Perang Dunia II.<sup>41</sup>

Selain itu juga terdapat beberapa negara yang secara terang-terangan menunjukkan tindakan anti-Islam melalui berbagai pernyataan dan kebijakan tertentu. Seperti yang terjadi di India pada tahun 2010 ketika diputuskannya kebijakan mengenai *Ayodhya Judgement* yang melegitimasi penghancuran masjid Babri India dan menundukkan muslim India. Kemudian pada tahun 2011 Prancis dan Belgia juga mengeluarkan kebijakan anti-Islam dengan menetapkan undang-undang yang melarang pemakaian burqa dan niqab di ruang publik.<sup>42</sup>

Selain mereka, Swiss juga memiliki sebuah undang-undang anti-Islam yang melarangan pembangunan menara masjid baru di Swiss. Mengenai kasus anti-Islam yang terjadi di Swiss pada dasarnya merupakan sebuah fenomena yang telah

---

<sup>40</sup> Abdullah Faliq. 2010. "Editorial; Islamophobia and Anti-Muslim Hatred: Causes & Remedies". *Arches Quarterly*. Vol. 4. Winter Edition 7. London: The Cordoba Foundation. Halaman 6.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

menyebar luas di tengah masyarakat Swiss sejak lama dan dapat dipastikan merupakan tindakan xenofobia atau secara khusus disebut sebagai Islamofobia. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Marc Helbling yang berjudul *Islamophobia in Switzerland: A New Phenomenon or a New Name for Xenophobia?*, bahwa berdasarkan penelitian pada tahun 1996 dan 2007 sangat banyak masyarakat Swiss yang tidak ingin muslim menjadi tetangga mereka. Dengan hasil persentase penelitian sebesar 17.7% pada tahun 1996 dan meningkat sebesar 3,6% pada tahun 2007 menjadi sebesar 21.3% masyarakat Swiss yang tidak menginginkan muslim sebagai tetangga mereka.<sup>43</sup>

Para imigran dari negara-negara Muslim di Swiss ini bukan hanya tidak disukai karena mereka dinilai bukan orang Swiss dan memiliki budaya yang berbeda, tetapi juga karena mereka dinilai membawa ide-ide yang dianggap benar-benar bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara liberal.<sup>44</sup> Munculnya larangan menara masjid di Swiss tersebut merupakan hasil dari pertemuan nilai-nilai dan budaya yang berbeda dari masyarakat Swiss dengan para imigran muslim di tengah gelombang anti-Islam dunia. Perbedaan tersebut ternyata memunculkan kekhawatiran yang berlebihan terhadap segala hal asing terkait Islam. Sehingga kemudian kasus pelarangan menara masjid di Swiss tersebut dapat dinilai sebagai sebuah tindakan Islamofobia karena didasarkan pada ketakutan akan Islam secara berlebihan.

### 1.6.2 Konsep Politisasi (*Politicization*)

Pengertian politisasi dalam kamus Merriam-Webster adalah menghubungkan ide, masalah dan hal lainnya dengan politik melalui cara yang membuat orang-orang cenderung menyetujui; atau menyebabkan seseorang terlibat atau tertarik dalam pemerintahan atau politik.<sup>45</sup> Kemudian menurut kamus Oxford politisasi berarti

---

<sup>43</sup> Marc Helbling. *Op. Cit.* Halaman 7.

<sup>44</sup> *Ibid.* Halaman 3.

<sup>45</sup> Lihat Kamus Merriam-Webster *online* melalui <http://www.merriam-webster.com/dictionary/politicize> (29 November 2014).

membuat sesuatu menjadi sebuah isu politik.<sup>46</sup> Berdasarkan penjelasan di atas politisasi merupakan sebuah upaya untuk menghubungkan suatu hal dengan politik untuk memperoleh dukungan publik, atau dalam kata lain mengaitkan suatu hal ke dalam ranah politis untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagaimana pengertian politisasi dalam Kamus Politik *Fast Times* bahwa politisasi adalah pemberian karakter politik terhadap sesuatu (*politicization - the giving of a political character to something*).<sup>47</sup>

Richard M Ebelin, Wakil Ketua Bidang Akademik *The Future of Freedom Foundation*, memberikan penjelasan mengenai politisasi sebagai berikut:

*“politicization can be defined as that now pervasive tendency for making all questions political questions, all issues political issues, all values political values, and all decisions political decisions.... Politicization thus takes the manifest form of increasing the power of the state, of increasing political power as against all other forms of power in society, of increasing the power of the politicians and the bureaucrats as against the power of individuals, private institutions, and voluntary associations”.*<sup>48</sup>

Sebuah isu politisasi dapat berupa sebuah isu sosial, ekonomi, teologis, spiritual, ilmiah atau hukum yang secara sengaja diarahkan menjadi isu politik, dimana kemudian orang-orang menjadi aktif dan tertarik terhadap isu tersebut secara politik. Masalah-masalah politisasi sering kali disebut sebagai "*hot-button issues*"<sup>49</sup> karena hampir setiap posisi yang diambil pasti untuk menyenangkan selompok orang dan menyinggung yang lain. Oleh karena itu politisasi juga memiliki pengertian

---

<sup>46</sup> Lihat Kamus Oxford *online* melalui <http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/politicize> (29 November 2014).

<sup>47</sup> Emre Erdogan. 1997. *An Exploration of the “Politicization Concept of Putnam: Determinants of Attitudes of Citizens About Foreign Policies*. Turki: Bogazici University. Halaman 8.

<sup>48</sup> *Ibid.* Halaman 9.

<sup>49</sup> *Hot-button issues* adalah isu atau masalah yang emosional atau kontroversial sehingga dapat memunculkan ketegangan pada masyarakat. Lihat Kamus Merriam Webster *online* <http://www.merriam-webster.com/dictionary/hot%20button> (03 Juni 2015).

sebagai alokasi sumber daya oleh para politisi tanpa mempertimbangkan biaya dari tindakan mereka pada warga.<sup>50</sup>

Dengan beragam definisi yang berbeda, konsep politisasi pada dasarnya memiliki definisi umum yang berkaitan dengan kehidupan, yaitu pemahaman bahwa dasarnya hidup ini terdiri dari dua bidang yang berbeda yaitu; bidang politik dan non-politik. Jika batasan antara kedua bidang yang berbeda tersebut lemah dan membingungkan masyarakat, hal tersebut memungkinkan lingkup non-politik didominasi oleh lingkup politik. Situasi inilah yang kemudian diberi label sebagai politisasi. Politisasi menjadikan 'semuanya menjadi politik,' dari pendidikan, moralitas sampai hubungan antar gender. Politisasi tersebut merupakan hasil yang tidak dapat dihindari dari pengistimewaan '*public private*', yang artinya dalam upaya melindungi pemahaman privasi tertentu, dan melakukannya dengan mengedepankan doktrin hak-hak individu politik, terjadi penyeragaman politisasi di semua bidang kepentingan manusia. Dengan demikian, semua hubungan manusia mulai menyerupai hubungan di bidang politik.

Dalam kasus pelarangan menara masjid di Swiss terdapat indikasi kuat adanya upaya politisasi yang dilakukan oleh *Schweizerische Volkspartei / Swiss People's Party* (SVP) terkait sentimen anti-menara masjid tersebut sejak tahun 2005. Hal yang menarik dalam kasus Swiss adalah bagaimana simbol-simbol budaya atau agama dimanipulasi menjadi manajemen identitas politik, yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah tindakan ketakutan yang berlebihan yang disebar luaskan. Menara pada hakikatnya merupakan suatu hal yang berkaitan dengan arsitektur bangunan tempat ibadah, namun akibat munculnya gejala ketakutan yang berlebihan tentang menara masjid tersebut, atau dalam konteks penelitian ini disebut sebagai *xenophobia* dari para pendukung larangan menara masjid baru di Swiss, telah membawa kasus ini ke ranah politik untuk mendapatkan dukungan dan perhatian dari publik. Upaya politisasi kasus menara ini dilakukan dengan memanfaatkan sistem demokrasi

---

<sup>50</sup> Emre Erdogan. *Op.Cit.* Halaman 10.

langsung yang telah diterapkan di Swiss dalam jangka waktu yang panjang melalui instrumen demokrasi yang selama ini digunakan yaitu referendum untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. Sehingga cukup mudah bagi SVP untuk menggunakan sistem inisiatif populer untuk menjadikan kasus menara masjid sebagai isu politik.

### 1.6.3 Konsep Referendum

Istilah referendum muncul pada pertengahan abad ke-19 yang berasal dari bahasa latin *gerund* ('merujuk') atau *netral gerund* (sesuatu yang harus dibawa kembali).<sup>51</sup> Referendum adalah sebuah pemungutan suara dimana semua orang di suatu negara atau daerah diminta untuk memberikan pendapat mereka untuk memutuskan sebuah pertanyaan politik atau sosial yang penting.<sup>52</sup> Dalam definisi yang lebih lengkap referendum diartikan sebagai penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka yang menentukannya (jadi tidak diputuskan oleh rapat atau oleh parlemen); penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum (semua anggota suatu perkumpulan atau segenap rakyat).<sup>53</sup>

Referendum dan inisiatif warga merupakan sarana yang semakin penting di berbagai belahan dunia untuk memberlakukan atau mencegah diterapkannya suatu undang-undang.<sup>54</sup> Berbagai negara di seluruh dunia berurusan dengan berbagai *hot-button issues* yang menarik banyak perhatian publik. Oleh karena itu referendum merupakan sarana untuk menyetujui atau menolak berbagai isu penting, baik diajukan oleh aparat negara atau berdasarkan inisiatif populer yang disetujui oleh legislatif. Referendum dapat dilakukan pada penerapan konstitusi baru, amandemen konstitusi,

---

<sup>51</sup> Lihat Kamus Oxford *online*, dikutip dari <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/referendum> (01 Desember 2014).

<sup>52</sup> Lihat Kamus Cambridge *online*, dikutip dari <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/referendum> (01 Desember 2014).

<sup>53</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia *online*. Dikutip dari <http://kbbi.web.id/referendum> (01 Desember 2014).

<sup>54</sup> Claes H. de Vreese. 2007. *The Dynamics of Referendum Campaigns*. New York: Palgrave Macmillan. Halaman 1.

undang-undang, penarikan kembali seorang pejabat terpilih atau hanya mengenai kebijakan pemerintah tertentu.

Istilah referendum mencakup semua istilah yang terdapat dalam beberapa bentuk berbeda dari demokrasi. Referendum dapat dimulai oleh pemerintah dan legislator atau oleh warga. Referendum dapat bersifat mengikat atau sebagai penasehat. Terdapat beberapa jenis referendum sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Tipologi Referendum

<b>Tipe</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Hasil</b>	<b>Diterapkan di (sebagai contoh)</b>
<i>Compulsory/ Binding</i>	Referendum dilaksanakan untuk mengubah hukum konstitusi	mengikat	Australia, Denmark, Irlandia, Swiss
<i>Rejective/ facultative</i>	Referendum mengenai hukum yang telah disetujui oleh badan legislative ( <i>abrogative</i> )	Biasanya mengikat	Australia, Denmark, Italia, Swedia, Swiss
<i>Initiative / direct legislation</i>	Referendum mengenai sebuah obyek yang dibawa melalui petisi oleh masyarakat	Biasanya mengikat	Swiss, Selandia Baru, Amerika Serikat
<i>Advisory/ plebiscite</i>	Referendum mengenai sebuah subyek yang diinisiasi oleh pemerintah atau badan legislatif ( <i>consultative</i> )	Tidak mengikat	Prancis, Inggris, Kanada, Finlandia, Belanda, Spanyol.

Sumber: Claes H. de Vreese. 2007. *The Dynamics of Referendum Campaigns*. New York: Palgrave Macmillan. Halaman 3.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Swiss menerapkan tiga macam bentuk referendum. Dalam kasus inisiatif anti-menara tahun 2009 mengacu pada jenis referendum ketiga yaitu referendum inisiatif (*Initiative/direct legislation*), yang

dalam jenis ini referendum diadakan setelah mengajukan petisi yang disetujui oleh masyarakat. Dalam kasus ini, secara objektif, akan terlihat perbedaan antara demokrasi langsung secara teori dan secara praktis seperti yang dikemukakan oleh Matthew Mendelsohn dan Andrew Parkin dalam buku *Referendum Democracy: Citizens, Elites and Deliberation in Referendum Campaigns*. Dalam teori, referendum dimaksudkan untuk mengizinkan warga untuk membuat berbagai keputusan terkait kebijakan publik, tetapi dalam prakteknya referendum digunakan dengan penuh strategi oleh kelompok kepentingan bukan untuk mewujudkan kebijakan atas kepentingan warga, melainkan untuk membujuk pemilih agar mengesahkan posisi yang disukai oleh penyokong referendum tersebut.<sup>55</sup> Hal tersebut terjadi di Swiss terkait kasus larangan menara masjid baru, yakni ketika kelompok penyokong inisiatif ini yaitu SVP dan EDU memanfaatkan sistem referendum untuk membujuk masyarakat agar membenarkan tindakan mereka untuk melarang eksistensi menara masjid. Jika diamati secara lebih mendalam, kebijakan yang dihasilkan melalui inisiatif tersebut pada dasarnya tidaklah menguntungkan warga Swiss, inisiatif tersebut lebih menguntungkan pihak penyokong inisiatif untuk mewujudkan kepentingan mereka sendiri.

#### **1.6.4 Prinsip Demokrasi**

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) demokrasi adalah salah satu dari nilai-nilai utama universal dan prinsip-prinsip PBB. Dasar demokrasi adalah kebebasan menyatakan kehendak dan berkaitan erat dengan aturan hukum dan penegakan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Demokrasi dan pemerintahan demokratis mengandung pengertian bahwa hak asasi manusia dan

---

<sup>55</sup> Matthew Mendelson & Andrew Parkin (Ed). 2000. *Referendum Democracy: Citizens, Elites and Deliberation in Referendum Campaigns*. New York: Palgrave Macmillan. Halaman 3.

kebebasan-kebebasan rakyat dihormati, dipromosikan dan dipenuhi, sehingga memungkinkan mereka untuk hidup bermartabat.<sup>56</sup>

*The International Covenant on Civil and Political Rights* (1966) mencantumkan prinsip-prinsip demokrasi dalam hukum internasional sebagai berikut:

1. Kebebasan berekspresi (Pasal 19)
2. Hak untuk berkumpul secara damai (Pasal 21)
3. Hak kebebasan untuk berasosiasi dengan orang lain (Pasal 22)
4. Hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan publik, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas (Pasal 25)
5. Hak untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum secara berkala dengan menggunakan hak pilih secara universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih (Pasal 25).<sup>57</sup>

Sedangkan berdasarkan *Inter-parliamentary Union* di Jenewa pada tahun 1998 terdapat beberapa prinsip demokrasi. Demokrasi sebagai sebuah ide universal dilihat sebagai tujuan, yang didasarkan pada nilai-nilai umum yang dimiliki oleh seluruh masyarakat dunia tanpa melihat perbedaan budaya, politik, sosial dan ekonomi. Oleh karena itu hak dasar warganegara dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, transparansi dan tanggung jawab, dengan serta penghormatan terhadap pandangan pluralitas.<sup>58</sup>

David Beetham, seorang direktur pusat kajian demokratisasi Universitas Leeds Inggris, menjelaskan prinsip-prinsip utama demokrasi dalam buku yang diterbitkan oleh *Inter-parliamentary Union* yang berjudul *Democracy: Its Principles and Achievement*. Menurut Beetham prinsip demokrasi dapat dibagi ke dalam poin-poin berikut:

---

<sup>56</sup> PBB. (Tanpa Tahun). "Democracy and the United Nations". dikutip dari [http://www.un.org/en/globalissues/democracy/democracy\\_and\\_un.shtml](http://www.un.org/en/globalissues/democracy/democracy_and_un.shtml) (19 Desember 2014).

<sup>57</sup> PBB. (Tanpa Tahun). "Democracy and the United Nations". dikutip dari <http://www.un.org/en/events/democracyday/pdf/presskit.pdf> (05 Juni 2014).

<sup>58</sup> Inter-parliamentary Union. 1998. *Democracy: Its Principles and Achievement*. Jenewa: The Inter-Parliamentary Union. Halaman IV.

1. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat di depan publik, baik dalam organisasi ataupun partisipasi aktif dalam pemerintahan.
2. Jaminan atas hak untuk memiliki kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul.
3. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan termasuk hak untuk mengambil bagian dalam pelayanan publik, memegang jabatan publik dan memilih pejabat publik.
4. Hak publik atas akuntabilitas seluruh kegiatan pemerintahan, baik para pejabat pemerintah yang terpilih melalui pemilu ataupun pejabat pemerintah yang terpilih tanpa proses pemilu seperti polisi, militer dan dinas kerahasiaan.
5. Kesetaraan bagi semua warga negara yang terlindung dari berbagai diskriminasi yang mengacu pada perbedaan seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, ataupun perbedaan lainnya.
6. Menghormati perbedaan pendapat dan keragaman budaya dan identitas.
7. Kebebasan di bidang ekonomi yang meliputi kepemilikan properti, baik secara individu maupun kolektif.
8. Masyarakat yang demokratis akan berusaha untuk mendidik generasi muda mengenai hak-hak dan tanggung jawab dari masyarakat demokratis.<sup>59</sup>

Berdasarkan berbagai penjelasan diatas mengenai prinsip-prinsip demokrasi, disini penulis menggunakan pengertian prinsip demokrasi menurut David Beetham. Prinsip – prinsip demokrasi menurut Beetham memiliki cakupan yang lebih luas serta dapat memenuhi kebutuhan demokrasi di era saat ini. Jika dikaitkan dengan kasus politisasi anti-menara masjid di Swiss, penulis melihat publik internasional menilai adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi khususnya terkait poin kelima dan keenam mengenai perlindungan dari diskriminasi serta penghormatan terhadap perbedaan budaya dan identitas. Hal inilah yang kemudian menjadi sorotan oleh masyarakat internasional dimana Swiss selama ini selalu dikenal sebagai sebuah

---

<sup>59</sup> *Ibid.* Halaman 28-29.

negara demokratis yang sering kali menjadi *role model* dalam pelaksanaan demokrasi oleh negara-negara lain justru dinilai telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi universal melalui pelaksanaan referendum berdasarkan inisiatif populer anti-menara masjid.

### 1.6.5 Konsep Opini Publik Internasional

Opini publik telah memasuki berbagai pokok kehidupan sebagai sebuah faktor yang menentukan. Menurut Edward L. Bernays, dalam bukunya *Crystallizing Public Opinion*, opini publik menjadi penting karena orang-orang ataupun gerakan-gerakan yang berkepentingan akan dipengaruhi oleh perilaku publik yang merepresentasikan opini mereka dengan menggunakan penasehat ahli yang mereka miliki.<sup>60</sup> Pengertian opini publik sendiri seiring berjalannya waktu telah memiliki berbagai definisi.

Menurut Jaap Van Ginneken, dalam bukunya yang berjudul *Collective Behavior and Public Opinion*, pengertian opini publik dapat dilihat dari dua penjelasan berikut; pertama-tama, opini publik ialah mengenai pendapat, bukan tentang pernyataan fakta. Opini publik adalah pendapat atau pertimbangan nilai tentang apa yang orang-orang bagikan. Kedua, opini publik adalah ‘publik/masyarakat umum’. Maka opini publik bukanlah merujuk kepada pendapat pribadi, dimana seseorang memegang dan menjaga pendapatnya untuk diri mereka sendiri. Opini publik adalah tentang pendapat dimana orang-orang mengumumkan dan mengungkapkan opini mereka.<sup>61</sup>

Sedangkan menurut Noelle-Neumann<sup>62</sup> opini publik adalah: “*a social psychological process lending cohesion to human communities . . . a process in which agreement about the values of the community and the acts derived therefrom is*

---

<sup>60</sup> Edward L. Bernays. 1923. *Crystallizing Public Opinion*. New York: Liveright Publishing Corporation. Halaman 50.

<sup>61</sup> Jaap van Ginneken. 2003. *Collective Behavior and Public Opinion*. London: Lawrence Erlbaum Associates Publisher. Halaman 8.

<sup>62</sup> E Noelle-Neumann. 1994. “The influence of the spiral of silence on media effects research” dalam C. Hamelink & O. J. Linné (Eds.). *Mass Communication Research*. Norwood, NJ: Ablex. Halaman 97 – 120.

*continuously reestablished*".<sup>63</sup> Dalam artian bahwa opini publik adalah sebuah proses psikologi sosial masyarakat, yang mana dalam proses tersebut terdapat kesepakatan tentang nilai-nilai dan tindakan masyarakat yang terus-menerus dibangun kembali. Berdasarkan definisi tersebut, maka opini publik adalah proses penting dalam pembentukan, reformasi dan pembubaran sebuah kelompok mengenai apa yang dinilai oleh orang-orang dan mengarah kepada objek tertentu.

Turner dan Killian's<sup>64</sup> mendeskripsikan opini publik adalah sekelompok orang yang tertarik mengenai suatu masalah dan terbagi mengenai suatu masalah tertentu serta terlibat dalam sebuah diskusi terkait masalah tertentu dengan tujuan untuk memberikan opini kolektif yang diharapkan dapat mempengaruhi tindakan beberapa kelompok atau individu. Oleh karena itu publik dalam ranah ini bisa dilihat berdasarkan isu atau masalah yang dimaksud. Menurut Turner dan Killian sebuah isu atau masalah terdiri dari pokok-pokok bahasan dimana orang-orang setuju atau tidak. Isu atau masalah dalam hal ini merupakan hal yang kontroversial yang menjadi pokok bahasan debat dan interaksi sosial sehari-hari.<sup>65</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengertian opini publik yang dikemukakan oleh Turner dan Killian's. Hal tersebut dikarenakan dibandingkan dengan dua pengertian opini publik lainnya oleh Ginneken dan Neumann, pengertian opini publik menurut Turner dan Killian's penulis anggap lebih tepat untuk digunakan dalam menganalisa opini publik internasional mengenai referendum menara-masjid di Swiss. Opini publik internasional dalam kasus ini berusaha untuk memberikan opini kolektif mereka terhadap isu kontroversial mengenai larangan menara masjid di Swiss dengan berusaha untuk mempengaruhi pihak tertentu yang dalam artian disini adalah pemerintahan Swiss.

Definisi publik disini dapat dibagi menjadi dua yaitu publik internal maupun publik eksternal. Sedangkan mengenai opini publik international lebih mengacu pada

---

<sup>63</sup> Jaap van Ginneken. *Loc. Cit.*

<sup>64</sup> R. H. Turnern & L. M. Killian. 1972. *Collective behavior*. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall.

<sup>65</sup> Jaap van Ginneken. *Op. Cit.* Halaman 11-12.

pendapat masyarakat internasional, yakni publik eksternal dari objek. Opini publik internasional merupakan hal yang penting untuk dibahas. Sebagaimana menurut Walter Lippmann bahwa intervensi dari opini dunia pasti akan terus datang, dan bahwa para ahli dan ‘penonton-penonton yang tertarik (*interested spectators*)’ akan suatu isu pasti akan mengambil kendali. Gugahan dari warga internasional merupakan sebuah evaluasi mendasar yang penting terhadap kekuatan yang sewenang-wenang. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi ‘masalah utama’, tapi tentu saja, publik hanya bisa mendorong aktor-aktor yang terlibat dan tidak menghasilkan masalah dengan sendirinya. Lippmann menjelaskan bahwa opini publik dalam ideal yang tertinggi akan membela orang-orang yang siap untuk bertindak berdasarkan argumen mereka untuk melawan kekuatan yang mengganggu dari orang-orang yang hanya memaksakan kehendak mereka.<sup>66</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa opini publik internasional memiliki peranan penting. Opini publik internasional disini berusaha untuk merespons sebuah kasus yang menjadi perhatian masyarakat dunia. Hal tersebutlah yang kemudian ingin peneliti amati lebih lanjut dalam kasus referendum anti-menara masjid di Swiss. Dimana pasca penyelenggaraannya terdapat berbagai respons yang diberikan dari masyarakat internasional. Ada pihak yang mendukung penyelenggaraan referendum anti-menara dan ada pula yang mengkritisi referendum tersebut. Penelitian ini nanti berusaha untuk melihat kecenderungan opini publik internasional mengenai referendum anti-menara masjid tersebut.

---

<sup>66</sup> Arthur Jay Klinghoffer & Judith Apter Klinghoffer. 2002. *International Citizens' Tribunals: Mobilizing Public Opinion to Advance Human Rights*. New York: Palgrave Macmillan Press. Halaman 2.

### 1.7 Argumen Utama

Argumen utama adalah dugaan atau jawaban sementara dari analisa permasalahan penelitian. Dengan mengacu pada latar belakang, rumusan masalah, dan konsep yang telah dipaparkan, maka argumen utama penulis adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan referendum anti menara di Swiss merupakan sebuah bentuk dari tindakan Islamofobia dalam kerangka xenofobia yang menggunakan jalur politik untuk mengesahkan tindakan yang menyudutkan kaum muslim di Swiss. Dalam kasus ini terdapat bentuk politisasi sentimen anti-menara masjid oleh partai haluan kanan Swiss, SVP dan EDU, untuk mendapatkan pembenaran atas tindakan mereka yang sebenarnya justru mengakibatkan diskriminasi dan menyerang asas demokrasi di Swiss sendiri. Politisasi sentimen anti-menara tersebut dilakukan melalui proses inisiatif populer yang kemudian berlanjut pada pelaksanaan referendum anti-menara masjid pada tahun 2009. Referendum tersebut ternyata mendapatkan respons yang luas tidak hanya dari dalam negeri namun juga dari berbagai pihak internasional. Terdapat implikasi dari pelaksanaan referendum anti-menara pada tahun 2009 terhadap opini publik internasional mengenai Swiss. Referendum anti-menara dalam opini publik internasional dilihat sebagai sebuah tindakan diskriminasi dan telah melanggar prinsip demokrasi yang berlaku.

### 1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode yang dikenal dengan strategi penelitian ganda (*multiple research strategies*) atau lebih populer disebut sebagai metode triangulasi. Metode triangulasi mempunyai maksud menggunakan lebih dari satu metode riset sebagai sarana untuk menghasilkan data empiris yang lebih dapat dipercaya.<sup>67</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kepustakaan/*library research* (kualitatif) dan metode analisis isi/*content analysis*

---

<sup>67</sup> Jonathan Sarwono. 2011. *Mix Methods: Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Riset Kualitatif Secara Benar*. Jakarta: PT. Gramedia. Halaman 57.

(kuantitatif). Penggunaan metode triangulasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan validitas hasil penelitian. Hal tersebut dikarenakan dalam prakteknya, mempertemukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif seringkali merupakan penyelesaian terbaik dengan melakukan serangkaian sub-penelitian yang tujuannya dikaitkan bersama sehingga dapat menginformasikan kesimpulan secara komprehensif tentang masalah yang diteliti.<sup>68</sup>

Pendekatan metode triangulasi umumnya mengkombinasikan kedua pendekatan (kualitatif dan kuantitatif) dalam tiga cara, yaitu: (1) Pendekatan kuantitatif sebagai pendekatan utama, pendekatan kualitatif sebagai fasilitator, (2) Pendekatan kualitatif sebagai pendekatan utama, pendekatan kuantitatif sebagai fasilitator, (3) Kedua pendekatan diberi tekanan yang sama.<sup>69</sup> Dalam penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan cara kedua, dimana pendekatan kualitatif sebagai pendekatan utama sedangkan pendekatan kuantitatif sebagai fasilitator.

Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>70</sup> Unsur penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati berbagai data tertulis yang diperoleh melalui studi dokumentasi atau kepustakaan. Metode kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa proses politisasi anti-menara masjid di Swiss serta untuk menjabarkan kecenderungan opini publik internasional terkait referendum anti-menara di Swiss.

Sedangkan metode kuantitatif adalah penelitian yang bekerja dengan angka, yang datanya berwujud bilangan (skor atau nilai, peringkat atau frekuensi).<sup>71</sup> Metode kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa lebih lanjut tentang kecenderungan opini publik internasional terkait pelaksanaan referendum anti-menara di Swiss, yang mana data yang digunakan bersumber dari beberapa sumber yaitu

---

<sup>68</sup> Asmadi Alsa. 2004. *Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 79.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Nurul Zuriah. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori – Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Halaman 92.

<sup>71</sup> Asmadi Alsa. *Op. Cit.* Halaman 17.

pemberitaan media massa, pernyataan resmi suatu negara, dan pernyataan resmi organisasi internasional. Metode kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) deskriptif. Analisis isi deskriptif adalah analisis yang menggambarkan secara detail aspek-aspek dan karakteristik suatu pesan atau suatu teks tertentu.<sup>72</sup> Mengenai metode analisis isi, dapat diuraikan secara sederhana sebagai berikut:

- Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sample*, artinya sampel dipilih berdasar penilaian tertentu yang memiliki kaitan langsung dengan tema-tema politisasi anti-menara masjid di Swiss dengan tujuan lebih memfokuskan arah penelitian pada tema opini publik internasional terkait larangan menara masjid di Swiss tersebut. Penggunaan *purposive sample* ini didasarkan pada penilaian tertentu karena unsur-unsur yang dipilih dianggap mewakili populasi yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan 30 *purposive sample* yang diperoleh dari sumber data yang ditentukan dari lima media internasional, tujuh organisasi internasional dan delapan negara.
- Agar dapat lebih memfokuskan pada tujuan penelitian untuk mengetahui kecenderungan opini publik internasional terkait politisasi anti-menara masjid tersebut, peneliti membuat kategori-kategori tentang isi opini publik internasional terkait larangan menara masjid di Swiss. Penentuan kategori-kategori ini untuk mempermudah dalam menjelaskan opini publik internasional secara lebih terperinci, sehingga isi informasi yang ada dapat diukur dan diidentifikasi untuk dapat dimasukkan ke dalam kategori yang ada. Kategorisasi ini hanya akan mencantumkan sub-kategori pada masing-masing kategori yang berkaitan dengan cakupan dalam penelitian ini, karena pengkategorisasian haruslah mencerminkan tujuan dari penelitian. Dalam penelitian ini ditetapkan tiga kategorisasi, antara lain:

---

<sup>72</sup> Eriyanto. 2011. *Analisis Isi*. Jakarta: Prenada Media. Halaman 47.

1. Sumber opini; adalah dari mana opini tersebut berasal. Kategori-kategori sumber opini dalam penelitian ini adalah:
  - 1a. Presiden
  - 1b. Menteri
  - 1c. Pejabat Organisasi Internasional
  - 1d. Institusi Media Internasional
2. Isu opini. Kategori ini ditujukan untuk meneliti berbagai isu yang terkandung dalam opini publik internasional tersebut. Kategori-kategori isu opini ini adalah:
  - 2a. *Human Right* ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang dalam penelitian ini berkaitan dengan hak kebebasan beragama.
  - 2b. Xenofobia ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan ketakutan yang berlebihan tentang segala hal yang asing.
  - 2c. Islamofobia ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan ketakutan yang berlebihan terhadap Islam.
  - 2d. Diskriminasi ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan segala perilaku yang tidak adil terhadap suatu individu atau kelompok tertentu.
  - 2e. Intoleransi ialah segala hal yang berkaitan dengan keengganan atau penolakan untuk mentolerir atau menghormati pendapat atau kepercayaan orang lain.
3. Arah opini; adalah apa yang menjadi tujuan atau kecenderungan utama dari opini publik internasional tersebut. Arah opini dibagi menjadi tiga kategori:
  - 3a. *Favorable (+)*

Jika isi opini bersifat mendukung, menyetujui atau menganjurkan terhadap pendapat, persoalan atau kecenderungan tertentu.
  - 3b. *Unfavorable (-)*

Jika isi opini bersifat menentang, tidak sepakat atau menolak terhadap pendapat, persoalan atau kecenderungan tertentu.

### 3c. Netral (0)

Jika isi pemberitaan sama sekali tidak terdapat indikasi tentang *favorable* atau *unfavorable*.

- Proses koding dilakukan dengan menguji keterandalannya dengan pengkoding lain (hakim) selain dikoding oleh peneliti untuk mendapatkan kesesuaian hasil-hasil yang hendak dicapai sesuai dengan rumus *Coeffisien Reliability* (CR) yang kemudian ditegaskan lagi dengan Formula Scott seperti yang sering dipakai oleh banyak peneliti analisis isi.<sup>73</sup>

Penggunaan metode triangulasi ini diharapkan dapat menjelaskan secara detail dan komprehensif mengenai politisasi anti-menara masjid di Swiss serta dapat melukiskan kecenderungan opini publik internasional terkait hal tersebut. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan dua teknik penelitian antara lain teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Adapun teknik pengumpulan data dan teknik analisis data dalam penelitian ini dapat dilihat dalam dua sub-bab sebagaimana diuraikan dibawah ini.

#### 1.8.1 Teknik Pengumpulan Data

Data yang biasa digunakan dalam penelitian biasanya terbagi menjadi dua macam, yaitu data sekunder dan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber datanya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.<sup>74</sup> Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder inilah yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam upaya menjelaskan secara lebih detail mengenai proses politisasi anti-menara masjid di Swiss. Data penunjang penelitian ini diperoleh

---

<sup>73</sup> Lebih jelasnya akan dijelaskan pada lampiran I.

<sup>74</sup> Burhan Bungin. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Halaman 128.

melalui studi pustaka baik terhadap literatur, jurnal, makalah, hasil penelitian maupun arsip-arsip yang lain.

Data sekunder yang biasanya digunakan dalam analisis isi berasal dari dokumen organisasi, catatan, berbagai buku dan jurnal, poster, berkas kasus, film, program televisi, koran dan majalah, *website page* dan internet, publikasi pemerintahan dan statistik resmi.<sup>75</sup> Data sekunder mengenai opini publik internasional terkait larangan menara masjid di Swiss dalam penelitian ini diambil dari tulisan-tulisan dalam objek penelitian yang hendak diteliti seperti dari media-media terpilih dan organisasi-organisasi internasional. Sumber data diambil dari lima media *online*, tujuh organisasi internasional dan delapan negara yang memberikan tanggapan mengenai referendum anti-menara masjid di Swiss tersebut. Peneliti memilih lima media *online* internasional, yaitu: *British Broadcasting Corporation* (BBC), *The Guardian*, *The Jakarta Post*, *The New York Times*, dan *The Wall Street Journal*. Organisasi internasional yang diteliti antara lain adalah Amnesty Internasional, *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE), *Human Rights Watch*, *United Nations on Human Rights*, dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), *COJEP International*, dan *International Religion Liberty Association* (IRLA). Sedangkan negara yang diteliti disini adalah negara yang merespons pelaksanaan referendum anti-menara di Swiss diantaranya yaitu: Amerika Serikat, Indonesia, Iran, Jerman, Libya, Prancis, Swedia dan Turki.

Tabel 3. Sumber Pengumpulan Data Opini Publik Internasional

No.	Sumber Opini Publik Internasional	Jumlah Sumber	Jumlah Data Riset
1.	Redaksi Media Internasional yang diteliti	5	5
2.	Organisasi Internasional	7	15
3.	Pejabat Negara diluar Swiss	8	10
Total		19	30

<sup>75</sup> University of Portsmouth. 2012. "What is Secondary Data Analysis?". Secondary Data Analysis – Documentary and Content Analysis. Dikutip dari [http://compass.port.ac.uk/UoP/file/ef9dd79a-2a94-4795-be23-f75eb40c8a11/1/Documentary%20and%20Content%20Analysis\\_IMSLRN.zip/page\\_01.htm](http://compass.port.ac.uk/UoP/file/ef9dd79a-2a94-4795-be23-f75eb40c8a11/1/Documentary%20and%20Content%20Analysis_IMSLRN.zip/page_01.htm) (07 Mei 2015).

### **1.8.2 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah deskriptif. Teknik deskriptif merupakan cara peneliti untuk mengkaji permasalahan dengan menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi melalui pengolahan data yang dimiliki.

Selain itu dikarenakan penelitian ini merupakan sebuah penelitian menggunakan metode triangulasi, peneliti juga menganalisis data dengan tabel frekuensi. Data tersebut dimasukkan dalam kategori-kategori yang ada, kemudian dipersentasikan dengan jumlah keseluruhan. Data tersebut kemudian dianalisis dengan diinterpretasi sesuai dengan tujuan dan perumusan masalah. Kecenderungan-kecenderungan dan gejala-gejala khas yang ada juga diperhatikan secara seksama dikaitkan dengan teori yang dipakai dan fenomena lain yang berhubungan dan mendukung. Hal ini dilakukan untuk memberikan interpretasi data yang lebih mendalam mengenai opini publik internasional terhadap politisasi anti-menara masjid di Swiss.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membaginya menjadi lima bab, dimana setiap bab terdiri dari sub bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan bab-bab tersebut sebagai berikut :

#### **Bab 1. Pendahuluan**

Bab ini membahas tentang Latar Belakang, Ruang Lingkup Pembahasan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Dasar Pemikiran, Argumen Utama, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

#### **Bab 2. Gambaran Umum Demokrasi Langsung Swiss**

Dalam bab ini penulis akan menyajikan pembahasan mengenai sistem demokrasi langsung yang diterapkan dalam pemerintahan konstitusional di Swiss.

**Bab 3. Dinamika Politisasi Anti-Menara Masjid di Swiss**

Dalam bab ini penulis akan menyajikan secara detail mengenai awal kemunculan inisiatif anti-menara hingga kemudian pelaksanaan referendum anti-menara yang kontroversial tersebut.

**Bab 4. Opini Publik Internasional Terkait Larangan Menara Masjid di Swiss**

Dalam bab ini penulis akan menganalisa lebih lanjut mengenai opini publik internasional terkait larangan menara masjid di Swiss.

**Bab 5. Penutup**

Bab ini akan memuat kesimpulan yang diambil oleh penulis dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan sekaligus merupakan penutup dari serangkaian tulisan ini.

## BAB 2. GAMBARAN UMUM DEMOKRASI LANGSUNG SWISS

### 2.1 Sistem Politik Pemerintahan Swiss

Negara Swiss yang memiliki luas wilayah 41.285 km terletak di Eropa Barat yang berbatasan dengan Jerman di utara, Austria dan Liechstentein di timur, Italia di selatan dan Prancis di Barat. Penduduk Swiss berjumlah sekitar 7.8 juta jiwa yaitu 1,5% dari jumlah populasi penduduk di Eropa.<sup>76</sup> Swiss merupakan sebuah negara yang menerapkan federalisme<sup>77</sup> yang telah terbentuk sejak tahun 1848. Terdapat 23 negara federal di seluruh dunia, Swiss merupakan negara federal tertua kedua setelah Amerika Serikat.<sup>78</sup> Otoritas kekuasaan Swiss dibagi kedalam tiga level politik, yaitu; pemerintahan federal, 26 kanton dan 2.396 komunal. Masing-masing dari tiga level politik ini memiliki kekuasaan legislatif untuk menyusun undang-undang dan peraturan dan kekuasaan eksekutif untuk melaksanakannya. Konfederasi dan kanton juga memiliki kekuatan peradilan (pengadilan) untuk memastikan penegakan hukum di masing-masing level politik pemerintahan.<sup>79</sup>

Tiga level politik tersebut merupakan elemen penting dalam sistem federal Swiss, yang mana karakteristik sistem federal Swiss dibentuk dari hubungan vertikal dan horizontal antara ketiga level yang berbeda tersebut. Terbentuknya negara federal Swiss pada abad 19 didasarkan pada fakta penting bahwa masyarakat Swiss terdiri dari berbagai kelompok agama dan bahasa. Berdasarkan data konsensus tahun 2000, 64% populasi Swiss menggunakan bahasa Jerman, 20% menggunakan bahasa Prancis, 6.5% menggunakan bahasa Italia, 0.5% menggunakan bahasa Romania, dan

---

<sup>76</sup> Wolf Linder & Andrea Iff. 2011. *Swiss Political System*. Swiss: Federal Departmen of Foreign Affairs FDFA. Halaman 2.

<sup>77</sup> Definisi Federalisme adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan beberapa daerah federal. Dapat dilihat di <https://www.ch.ch/en/swiss-federalism/> (12 Desember 2014).

<sup>78</sup> Swiss Federal Chancellery. 2010. *The Swiss Confederation a Brief Guide 2010*. Bern: Federal Palace West Wing. Halaman 14.

<sup>79</sup> The Swiss Authorities Online. (Tanpa Tahun). "Swiss Federalism". Dikutip dari <https://www.ch.ch/en/swiss-federalism/> (12 Desember 2014).

dikarenakan imigrasi 9% menggunakan bahasa asing lainnya sebagai bahasa ibu. Sedangkan mengenai agama terdapat dua agama yang dominan yaitu Protestan (37%) dan Katolik (44%).<sup>80</sup> Oleh karena itu sejak awal terbentuknya, Swiss percaya bahwa sistem federal mampu mempersatukan bangsa yang memiliki keberagaman budaya tersebut.

Sistem pemerintahan negara federal Swiss merupakan bentuk pembagian kekuasaan yang tidak terpusat atau desentralisasi. Bentuk desentralisasi ini untuk menjalankan sistem pemerintahan *bottom up*. Pemerintah dalam tingkat kota madya memiliki kekuasaan eksklusif dalam menangani pelayanan setempat. Pemerintahan dalam tingkat kanton-kanton secara khusus mempertahankan kekuasaan yang penting bagi identitas mereka (budaya, pendidikan, agama dan bahasa), dan juga mengenai isu-isu kebijakan sosial (pelayanan kesehatan dan sosial). Sedangkan pemerintahan federal memiliki kekuasaan eksklusif dalam hal kebijakan yang berkaitan langsung dengan koordinasi sosial dan kedaulatan nasional.

Hampir semua kebijakan federal diimplementasikan oleh kanton-kanton dan komunal-komunal/kotamadya. Kanton-kanton tersebut tidak hanya memiliki kekuasaan dan tanggung jawab, namun mereka juga memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi implementasi dari kebijakan federal.<sup>81</sup> Hal itu dikarenakan ketika kebijakan dari pemerintahan federal diterapkan di kanton, para pemerintah kanton mengamati lebih jauh mengenai implementasinya dengan kondisi wilayah mereka. Jika dinilai terdapat permasalahan atau ketidaksesuaian dengan kondisi lokal di kanton maka pemerintah federal dapat menerima perubahan dengan syarat jika mayoritas masyarakat dan kanton sepakat untuk melakukan pemilihan umum populer (*popular vote*).<sup>82</sup> Selain itu terdapat bentuk baru dari hubungan vertikal antara tiga level pemerintahan tersebut yang disebut '*Tripartite Agglomerations Conference*' yaitu sebuah platform politik bagi ketiga level pemerintahan baik federal, kanton dan

---

<sup>80</sup> Wolf Linder dan Andrea Iff. *Op.cit.* Halaman 16.

<sup>81</sup> *Ibid.* Halaman 04.

<sup>82</sup> *Ibid.*

komunal. Sedangkan dalam hubungan horizontal antar kanton terdapat sebuah institusi yang berupa ‘*The Conference of the Governments of the Cantons*’ yang merupakan sebuah konferensi yang diikuti oleh semua eksekutif kanton yang bertujuan untuk mengembangkan posisi kewilayahan ketika berhadapan dengan pemerintahan federal.<sup>83</sup>

## **2.1.1 Badan pemerintahan Swiss**

### **1. Majelis Federal**

Majelis federal merupakan otoritas politik tertinggi di Swiss. Kekuasaan legislatif Swiss dijalankan oleh parlemen yang disebut Majelis Federal. Majelis Federal merupakan sebuah badan parlementer bikameral yang terdiri dari Dewan Nasional (*National Council*), untuk merepresentasikan rakyat, dan Dewan Negara (*Council of States*), untuk merepresentasikan kanton-kanton. Keduanya memiliki kekuasaan yang sama. Majelis Federal menjalankan otoritas supreme federasi, memiliki kekuasaan legislatif untuk membuat semua hukum federal, dan menunjuk anggota-anggota Dewan Federal dan Hakim Federal, pimpinan militer dan badan utama federal lainnya. Majelis Federal mengawasi semua otoritas pemerintahan federal Swiss dan menyetujui anggaran dana yang telah disiapkan oleh Dewan Federal.<sup>84</sup>

#### **a. Dewan Nasional**

Dewan nasional merupakan institusi yang merepresentasikan rakyat. Dewan nasional terdiri dari 200 anggota yang dipilih langsung oleh rakyat di 26 wilayah pemilihan setiap kanton. Masing-masing kanton mendapatkan proporsi perwakilan sesuai dengan jumlah populasi masing-masing, Seperti Zurich sebagai kanton dengan jumlah populasi terbesar memperoleh 34 kursi perwakilan, Bern memperoleh 26

---

<sup>83</sup> *Ibid.* Halaman 08.

<sup>84</sup> *Ibid.* Halaman 24.

kursi, sedangkan kanton-kanton yang kecil seperti Appenzell Innerhoden atau Uri hanya memiliki satu kursi perwakilan di Dewan Nasional.

#### **b. Dewan Negara-negara (*Council of States*)**

Dewan Negara terdiri dari 46 anggota yang merepresentasikan setiap kanton. Masing-masing kanton diwakilkan oleh 2 anggota kecuali kanton Basel-Stadt and Basel-Land, Obwalden dan Nidwalden, Appenzel Innerrhoden dan Appenzel Ausserhoden yang masing-masing diwakili oleh satu anggota saja. Pemilihan dewan negara merupakan urusan masing-masing kanton melalui pemilihan langsung.<sup>85</sup>

#### **2. Dewan Federal (*Federal Council*)**

Dewan federal merupakan pelaksana lembaga eksekutif di Swiss. Dewan federal beranggotakan tujuh orang yang telah dipilih oleh Majelis Federal. Salah satu diantaranya dipilih untuk menjadi presiden. Anggota Dewan Federal ini dipilih setiap empat tahun sekali. Selanjutnya setiap tahun pada bulan Desember, parlemen memilih Presiden dan Wakil Presiden Konfederasi Swiss diantara tujuh anggota dewan federal untuk masa jabatan dua belas bulan (satu tahun).<sup>86</sup>

Dewan Federal bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang federal yang disahkan oleh parlemen, mengelola keuangan federal, mempromosikan kohesi nasional dan mewakili Konfederasi Swiss di luar negeri, serta memimpin dan mengawasi jalannya pemerintahan. Setiap anggota Dewan Federal adalah kepala departemen federal yang berbeda, yaitu; Departemen Dalam Negeri (*Federal Department of Home Affairs / FDHA*), Departemen Luar Negeri (*Federal Department of Foreign Affairs / FDFA*), Departemen Hukum dan Kepolisian (*Federal Department of Justice and Police / FDJP*), Departemen Pertahanan, Perlindungan Sipil dan Olahraga (*Department of Defence, civil Protection and Sport /*

---

<sup>85</sup> *Ibid.* Halaman 25.

<sup>86</sup> The Swiss Authorities Online. (Tanpa Tahun). "Federal Council Election". Dikutip dari <https://www.ch.ch/en/federal-council-election/> (20 Desember 2014).

DDPS), Departemen Keuangan (*Federal Department of Finance / FDF*), Departemen Ekonomi (*Economic Affair, Education and Research / EAER*), Departemen Lingkungan, Transportasi, Energi dan Komunikasi (*Department of the Environment, Transport, Energy and Communications / DETEC*).<sup>87</sup>

Anggota dewan federal yang terpilih menjadi presiden tidak menikmati hak-hak istimewa tertentu yang berbeda dengan rekan-rekan dewan federal lainnya. Presiden dianggap sederajat dengan anggota Dewan Federal lain selama setahun masa jabatan presiden dan tetap menjalankan tugasnya di departemennya. Dalam proses pengambilan keputusan Dewan Federal, presiden tetap bisa memberikan suara penentu. Presiden juga memimpin Rapat Dewan Federal dan bertanggung jawab untuk mewakili Dewan Federal dalam kasus tertentu.<sup>88</sup>

### **3. Mahkamah Agung Federal (*Federal Supreme Court*)**

Mahkamah Agung Federal merupakan lembaga yudikatif Swiss yang terdiri dari 35-48 anggota, dan pemimpinnya dipilih oleh Majelis Federal. Mahkamah Agung Federal adalah pengadilan tertinggi di Swiss dan oleh karena itu memiliki otoritas hukum tertinggi di Konfederasi dalam masalah perdata, pidana, administratif dan konstitusional. Mahkamah Agung Federal bertugas untuk memastikan penerapan seragam hukum federal di 26 kanton Swiss.

Mahkamah Agung Federal merupakan lembaga independen dan hanya tunduk kepada hukum. Mahkamah Agung Federal memiliki otoritas sebagai pengawas administrasi dari tiga pengadilan federal tingkat pertama yaitu: Pengadilan Pidana Federal, Pengadilan Administrasi Federal dan Pengadilan Hak Cipta Federal. Melalui keputusan-keputusannya, Mahkamah Agung Federal membantu mengembangkan hukum serta dapat disesuaikan dengan situasi yang berubah.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Federal Chancellery. 2014. *The Swiss Confederation a Brief Guide 2014*. Bern: Federal Palace West Wing. Halaman 42.

<sup>88</sup> The Swiss Authorities Online. (Tanpa Tahun). "The Work of The Federal Council". Dikutip dari <https://www.ch.ch/en/work-federal-council/> (12 Desember 2014).

<sup>89</sup> Swiss Federal Chancellery. 2014. *Op.cit.* Halaman 76.

### 2.1.2 Partai – partai di Swiss

Partai merupakan sekelompok orang yang memiliki filosofi kehidupan yang sama mengenai pandangan politik, isu ekonomi dan sosial. Partai menjadi penghubung antara rakyat dan institusi pemerintahan dan memiliki fungsi penting dalam sistem demokrasi.<sup>90</sup> Sebagai negara multikulturalisme, partai di Swiss juga beragam. Secara keseluruhan terdapat sebelas partai pemerintahan di Swiss, namun hanya terdapat empat partai terkuat di Swiss yang memiliki kursi di eksekutif, diantaranya adalah *Schweizerische Volkspartei / Swiss People Party (SVP)*, *Sozialdemokratische Partei / Social Democratic Party (SP)*, *FDP The Liberals*, dan *Christlichdemokratische Volkspartei / Christian Democrat People's Party (CVP)*.

Selain itu juga terdapat tujuh partai lainnya yang menempati kursi di parlemen diantaranya *The Green (Green Swiss Party)*, *Swiss Green Liberal Party (GLP)*, *Lega dei Ticinesi (Lega)*, *Christian Social Party Obwalden (CSP Obwalden)*, *Bürgerlich-Demokratische Partei / Conservative Democratic Party (BDP)*, *Evangelische Volkspartei / Evangelical People's Party (EVP)*, dan *Mouvement citoyens genevois / The Geneva Citizens' Movement (MCG)*.

Meskipun SVP merupakan partai terkuat, namun terjadi perpecahan dalam partainya pada tahun 2008. Sekelompok orang dari SVP memisahkan diri untuk membentuk partai Demokrat Konservatif BDP. Selain itu Eveline Widmerschlumpf, seorang anggota SVP yang terpilih menjadi dewan federal, bergabung dengan partai baru. Sejak saat itu partai terkuat di Swiss tersebut sampai saat ini kurang terwakili dalam dewan federal (eksekutif).<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Swiss Federal Chancellery. 2010. *Op.cit.* Halaman 18.

<sup>91</sup> *Ibid.*

## 2.2 Demokrasi Langsung Swiss

Sistem demokrasi telah banyak diterapkan oleh berbagai negara di penjuru dunia. Namun hampir semua negara yang menerapkan sistem demokrasi, masih menjalankan demokrasi yang bersifat perwakilan/representatif, yaitu semua keputusan besar yang menyangkut kepentingan negara ditetapkan oleh sebagian orang yang mewakili sebagian besar masyarakat yang dipilih oleh rakyat. Sebagian besar orang yang telah dipilih tersebut disebut sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kepada mereka, rakyat menitipkan urusan negara untuk diatur, termasuk mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Pemerintahan di tingkat pusat atau daerah.<sup>92</sup>

Namun sistem demokrasi Swiss dapat dikatakan berbeda dan lebih langsung pelaksanaannya dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, meskipun juga masih menggunakan sistem perwakilan. Swiss hampir merupakan satu-satunya negara di dunia dimana pemilih memiliki kekuasaan untuk menentukan keputusan dalam ruang lingkup yang luas.<sup>93</sup> Swiss menerapkan sistem semi-demokrasi langsung, hal itu dikarenakan Swiss menggabungkan sistem demokrasi representatif dan demokrasi langsung. Semi-demokrasi langsung dimaksudkan sebagai sebuah sistem dimana para elit politik masih membuat kebijakan-kebijakan namun harus tetap peka terhadap *preferences* dan kebutuhan masyarakat.<sup>94</sup>

Demokrasi representatif diterapkan melalui para pemeran penting dalam proses pembuatan keputusan politik yaitu parlemen dan pemerintah. Sejauh ini sejumlah besar keputusan sederhana dari dewan parlemen dan pemerintah, dalam jumlah yang terbatas, bukanlah subjek dari referendum. Dalam hal ini sistem demokrasi representatif Swiss berfungsi seperti halnya demokrasi parlementer di negara lainnya. Setiap empat tahun sekali warga negara Swiss berhak untuk memilih langsung 246 anggota majelis federal.

---

<sup>92</sup>BAPPENAS. 2013. "Demokrasi Langsung ala Swiss". Dikutip dari <http://www.bappenas.go.id/blog/demokrasi-langsung-ala-swiss/> (20 Januari 2015).

<sup>93</sup> Federal Chancellery. 2014. *Op.cit.* Halaman 15.

<sup>94</sup> Wolf Linder dan Andrea Iff. *Op.cit.* Halaman 36.

Selain demokrasi representatif, Swiss juga mengembangkan sebuah sistem yang memberikan kesempatan kepada masyarakat Swiss untuk terus berpartisipasi dalam memutuskan kebijakan di parlemen melalui referendum dan inisiatif populer. Referendum dan inisiatif populer merupakan instrumen dalam pelaksanaan demokrasi langsung di Swiss yang sangat penting dan seringkali dilaksanakan. Sistem demokrasi langsung merupakan sebuah hal yang paling bernilai dalam budaya politik Swiss dan telah terbukti pelaksanaannya selama lebih dari 150 tahun.

Sejak pembangunan negara modern, di kotamadya, kewilayahan maupun di tingkat federal, instrumen yang berbeda dari demokrasi langsung telah diperkenalkan. Referendum dan inisiatif populer sebagai sarana demokrasi langsung telah digunakan di kanton-kanton pada awal tahun 1830an. Kemudian pada tahun 1848 ketika dibentuknya negara modern Swiss, konstitusi hanya menyantumkan *mandatory referendum* dalam amandemen konstitusi. *Mandatory referendum* merupakan referendum yang dilaksanakan untuk memperoleh suara mayoritas rakyat terkait amandemen konstitusi yang diajukan oleh parlemen. Konstitusi baru melengkapi penggunaan referendum opsional dalam hukum parlementer pada tahun 1874, dan inisiatif populer pada tahun 1891. Referendum opsional dimaksudkan untuk sebuah kelompok masyarakat yang hendak merubah sebuah hukum yang telah lolos parlemen, sedangkan inisiatif populer merupakan sebuah sarana bagi masyarakat untuk mengajukan proposal-proposal baru terhadap agenda politik terkait permasalahan yang diabaikan oleh elit politik.<sup>95</sup>

Instrumen yang paling sering dilaksanakan pada tingkat nasional adalah referendum wajib (*mandatory referendum*), yang berarti bahwa setiap perubahan konstitusional membutuhkan suara rakyat. Dua instrumen lain dimana warga dapat mengusulkan inisiatif sendiri adalah referendum legislatif opsional dan inisiatif populer.<sup>96</sup> Melalui instrumen-instrumen demokrasi langsung ini masyarakat Swiss memiliki kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka terhadap keputusan

---

<sup>95</sup> *Ibid.* Halaman 29.

<sup>96</sup> *Ibid.* Halaman 28.

penting parlemen ataupun untuk membuat usulan mengenai pembuatan hukum baru. Kedua instrumen ini juga menjadi sarana sistem *checks and balances* yang dinilai akurat dimana rakyat juga mempunyai hak untuk mengusulkan amandemen terhadap konstitusi yang tidak bertentangan dengan hukum internasional dan hak asasi manusia.

Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat bagaimana peran besar rakyat Swiss dalam mengendalikan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pemerintah Swiss tidak hanya menjalankan pemerintahan untuk rakyat, namun juga seringkali disebut menjalankan pemerintahan bersama rakyat.<sup>97</sup> Akan tetapi tidak semua referendum dan inisiatif populer dapat dilaksanakan. Berdasarkan data berikut dapat dilihat jumlah referendum dan inisiatif populer yang lolos sejak tahun 1848-2009:

Tabel 4. Referendum dan Inisiatif Populer yang telah berhasil dilaksanakan (1848-2009)

	<b>Jumlah</b>	<b>Diterima</b>	<b>Ditolak</b>
<b>Inisiatif Populer</b>	189	16	153
<b>Referendum Opsional</b>	184	91	73
<b>Mandatory Referendum</b>	187	139	48

Sumber : Wolf Linder & Andrea Iff. 2011. *Swiss Political System*. Swiss: Federal Department of Foreign Affairs FDFA. Halaman 30.

Demokrasi langsung dan demokrasi representatif bukanlah hal yang kontradiktif melainkan saling melengkapi satu sama lain.<sup>98</sup> Demokrasi langsung adalah sebuah kontrol permanen terhadap elit politik serta sarana untuk memperoleh penerimaan dan legitimasi yang tinggi terhadap keputusan politik yang penting. Demokrasi langsung tidak menggantikan proses parlemen, tetapi demokrasi langsung adalah sebuah perbaikan penting terhadap keputusan parlemen serta merupakan sarana agar masyarakat dapat berpartisipasi di semua level pemerintahan federal.

<sup>97</sup> BAPENNAS. *Loc.Cit.*

<sup>98</sup> Wolf Linder & Andrea Iff. *Op.cit.* Halaman 24.

Keputusan mengenai subjek sebuah pemilihan suara populer (*popular vote*) ditentukan oleh konstitusi dan keputusan rakyat bersifat mengikat. Selain itu demokrasi langsung telah secara pasti mentransformasikan sistem demokrasi Swiss dari yang semula sebuah demokrasi dimana pemenang dapat memperoleh segalanya (*winner take all*) menjadi sebuah sistem dimana keputusan-keputusan melalui persetujuan dan akomodasi bersama memiliki kesempatan lebih besar akan diterima oleh masyarakat Swiss.<sup>99</sup>

### 2.2.1 Proses Implementasi Demokrasi Langsung di Swiss

Sebagaimana negara-negara demokrasi lainnya, tidak semua warga negara dapat berpartisipasi dalam pengambilan suara. Semua masyarakat berusia 18 tahun keatas baik laki-laki ataupun perempuan yang memiliki kewarganegaraan Swiss berhak untuk memilih, termasuk warga negara Swiss yang berada di luar negeri. Pada tingkat federal warga negara asing tidak memiliki hak politik. Akan tetapi di kanton Neunburg dan Jura warga negara asing diijinkan untuk mengikuti pemilihan di tingkat kanton dan kotamadya. Sedangkan di kanton Vaud dan Fribourg hak untuk warga negara asing untuk memilih hanya berada pada tingkat municipal. Sebagai tambahan terdapat beberapa municipal yang memperkenalkan hak warga negara asing dalam pengumpulan suara di kanton Appenzell Innerhoden dan Graubunden.<sup>100</sup>

Jumlah pemilih dalam setiap pemungutan suara berbeda-beda tergantung pada isu yang diusung. Selain penerapan *mandatory referendum* dan *optional referendum*, penerapan inisiatif populer (*popular initiative*) di Swiss tidak memiliki batasan yang mengikat mengenai hal-hal yang dapat diajukan untuk memperoleh suara rakyat. Pemungutan suara populer di Swiss meliputi isu-isu yang sangat luas. Berikut adalah data pemungutan suara yang berhasil dilakukan di Swiss sejak 1986 – 2009:

---

<sup>99</sup> BAPENNAS. *Loc.Cit.*

<sup>100</sup> Wolf Linder & Andrea Iff. *Op.cit.* Halaman. 33

Tabel 5. Data pemungutan Suara (*vote*) terpilih<sup>101</sup>

Isu	Tipe	Tahun
Keanggotaan PBB	CR	1986, 2002
Asuransi bersalin	LR	1987, 1999
Perlindungan terhadap daratan-daratan tinggi	I	1987
Empat puluh-jam kerja dalam seminggu	I	1988
Meningkatkan batas kecepatan jalanan bermotor menjadi 130kph	I	1989
Penghapusan hukuman tentara	I	1989
Moratorium pembangunan tenaga nuklir baru	I	1990
Perjanjian internasional untuk bergabung dalam <i>European Economic Area</i> (EEA)	CR	1992
Naturalisasi warga negara asing	CR	1994, 2004
Penambahan gerbong kereta api baru	LR	1992
Remunerasi bagi anggota-anggota perlemen	LR	1992
Pembatasan bagi orang-orang yang tinggal di luar negeri untuk mendapatkan real estat	LR	1995
Konstitusi Federal Baru	CR	1999
Pembagian heroin bagi pecandu narkoba	LR	1999
Perjanjian bilateral dengan Uni Eropa	LR	2000, 2005
Penghapusan hukuman terhadap perilaku aborsi	LR	2002
Peraturan untuk penyalahgunaan suaka	I	2002
Hukum mengenai penelitian terkait sel induk embrionik	LR	2004
Peraturan perundangan untuk pasangan homoseksual	LR	2005
Bantuan financial untuk negara-negara di Eropa Timur	CR	2006
Usia yang sesuai untuk pensiun	I	2008
Melawan pembangunan menara baru masjid	I	2009

I = inisiatif populer, CR = *mandatory (constitutional) referendum*, LR = *optional (legislative) referendum*.

Sumber: Wolf Linder dan Andrea Iff. 2011. *Swiss Political System*. Swiss: Federal Department of Foreign Affairs (FDFA). Halaman 34.

Dari tabel diatas terlihat berbagai macam isu yang telah disetujui untuk dilakukan pemungutan suara, baik berupa *mandatory referendum* dan *optional*

<sup>101</sup> Data mengenai semua pemungutan suara sejak tahun 1848 dapat dilihat di [www.swissvotes.ch](http://www.swissvotes.ch).

*referendum*, dan inisiatif populer. Tidak semua isu yang diajukan kepada pemerintah langsung disetujui untuk dilaksanakan pemungutan suara. Hanya inisiatif yang memenuhi syarat yang dapat terus maju sampai pelaksanaan pemungutan suara.

Sistem yang diterapkan di Swiss menunjukkan bahwa kedua sistem baik demokrasi langsung dan demokrasi representatif dapat saling melengkapi. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa isu-isu yang diangkat sangat luas dan dapat berupa berbagai isu. Prosedur pemungutan suara sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu; secara perseorangan meletakkan kertas suara di sebuah kotak pada hari pemungutan suara atau cara kedua melalui pengiriman surat suara. Hampir setengah dari pemilih menggunakan cara kedua karena lebih praktis sehingga mereka tidak perlu untuk pergi ke pusat kotak suara sendiri. Namun saat ini telah ada proyek permulaan mengenai penggunaan *electronic voting* di kanton Jenewa, Nuecatel dan Zurich. *E-voting* ini masih dalam masa percobaan untuk digunakan di tingkat federal.

Tingkat partisipasi dalam demokrasi langsung yang dijalankan di Swiss sangat bervariasi tergantung pada isu yang ditawarkan. Hanya sekitar seperempat dari jumlah pemilih yang merupakan pemilih tetap dan selebihnya tergantung pada isu yang diangkat. Namun rata-rata 45% dari pemilih memilih untuk berpartisipasi dalam pemilihan suara dalam inisiatif populer.<sup>102</sup> Partisipasi dalam demokrasi langsung merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam sistem pemerintahan Swiss. Para pemilih di Swiss seringkali diharuskan untuk memberikan suara mereka mengenai isu yang rumit. Hal tersebut dikarenakan keputusan hasil demokrasi langsung disadari sebagai legitimasi tertinggi dari demokrasi. Demokrasi langsung dilihat bukan sekedar mengenai suara mayoritas secara demografis namun lebih merupakan partisipasi langsung dari masyarakat yang aktif dalam sebuah prosedur yang mengikat, yang memberikan keputusan mereka yang dapat dipercaya sebagai sebuah tindakan keputusan pribadi.

---

<sup>102</sup> Wolf Linder & Andrea Iff. *Op.cit.* Halaman 35.

### 2.2.2 Proses Pengajuan Inisiatif Populer

Diantara instrumen-instrumen demokrasi langsung Swiss, inisiatif populer merupakan salah satu sarana dimana rakyat memiliki peranan yang sangat besar. Hal itu dikarenakan isu yang diangkat berasal dari proposal yang diajukan rakyat secara langsung, bukan parlemen. Inisiatif populer merupakan kunci bagi demokrasi Swiss, dimana setiap individu yang terlibat dalam politik atau sekelompok warga negara dapat mengusulkan untuk melaksanakan pemungutan suara untuk memberikan usulan revisi Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu rakyat Swiss dianggap sebagai *driving force* di balik demokrasi langsung Swiss. Dalam kesempatan ini warga negara Swiss dapat mengusulkan hukum baru sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Agar inisiatif tersebut dapat diterima, maka pihak yang mengajukan inisiatif harus memenuhi syarat sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 138 Konstitusi Federal. Syarat tersebut mengharuskan pihak pengaju inisiatif untuk mengumpulkan 100.000 tanda tangan pendukung proposal dalam jangka waktu 18 bulan yang kemudian diajukan kepada Kanselir Federal.<sup>103</sup> Sebuah inisiatif populer bisa berbentuk sebuah proposal umum atau seringkali berupa teks yang telah diformasikan secara tepat. Bentuk inisiatif yang sudah diajukan tersebut tidak dapat dirubah baik oleh parlemen ataupun pemerintah.

Setelah semua persyaratan pengajuan inisiatif telah dilakukan, maka kemudian Pemerintah akan mengkaji inisiatif tersebut dan menentukan apakah inisiatif tersebut diterima atau tidak. Jika tujuan inisiatif tersebut melanggar perjanjian internasional, maka tidak akan diterima. Namun jika kemudian sebuah inisiatif telah dinyatakan diterima, Dewan Federal harus melaksanakan pemilihan suara dalam jangka waktu yang memungkinkan. Sementara itu, Parlemen dan pemerintah dapat menyusun dan mengusulkan *counter-proposal* terhadap inisiatif. Sebuah *counter-proposal* biasanya mengkaji ulang tujuan inisiatif atau disertai

---

<sup>103</sup> Lihat UU Swiss Pasal 138 Ayat 1, dapat diakses melalui [www.admin.ch/ch/e/rs/1/101.en.pdf](http://www.admin.ch/ch/e/rs/1/101.en.pdf) (20 November 2014).

dengan mempersempit ruang lingkungannya.<sup>104</sup> *Counter-proposal* biasanya berisi saran untuk menerima atau menolak inisiatif agar pemerintah di kanton-kanton dan warga negara Swiss mendukung inisiatif yang diajukan atau bahkan sebaliknya.<sup>105</sup> Namun tidak semua inisiatif memperoleh proposal balasan langsung dari pemerintah, tergantung pada isu yang diajukan. Selanjutnya agar sebuah inisiatif populer dinyatakan menang, sebuah inisiatif harus memperoleh ‘mayoritas ganda (*double majority*)’: yang berarti tidak hanya memperoleh suara mayoritas warga, tetapi juga harus memperoleh suara mayoritas kanton, dengan jumlah setidaknya 14 dari 26 kanton di Swiss.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> Stephane Lathion. 2011. “Citizens’ Initiatives in Switzerland” dalam Patrick Haenni dan Stephane Lathion (Ed). *The Swiss Minaret Ban: Islam in Question*. Swiss: Religioscope Institute. Halaman 17.

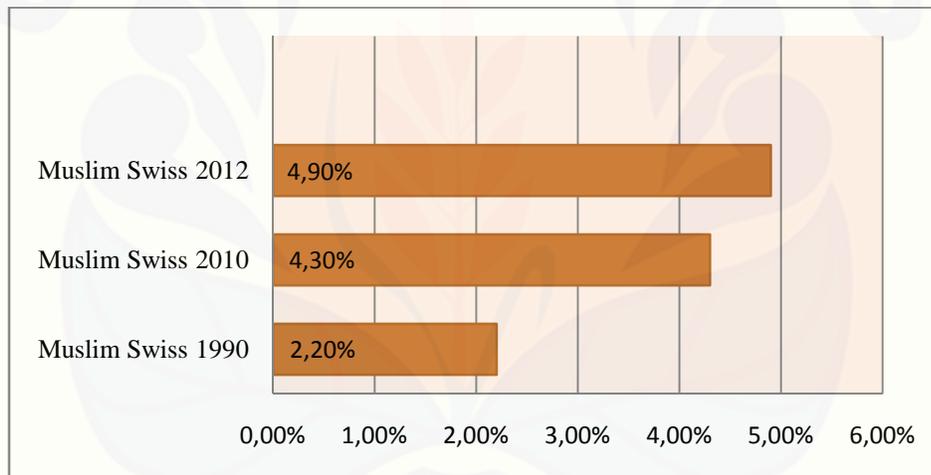
<sup>105</sup> Swiss Federal Chancellery. 2010. *Op.cit.* Halaman 17.

<sup>106</sup> Stephane Lathion. *Loc. Cit.*

**BAB 3. DINAMIKA POLITISASI ANTI-MENARA MASJID DI SWISS**

**3.1 Kondisi Kaum Muslim di Swiss**

Islam merupakan agama yang paling cepat berkembang di Eropa, maka bukanlah hal yang aneh jika Islam di Swiss dapat berkembang dengan pesat. Berdasarkan data tahun 1990, jumlah penduduk Muslim di Swiss berjumlah 148.000 dari total 7.4 juta jiwa penduduk Swiss, atau sekitar 2,2%.<sup>107</sup> Kemudian pada tahun 2010 jumlah muslim di Swiss meningkat menjadi 380.000 dari total 7.6 juta jiwa penduduk Swiss atau sekitar 4,3%.<sup>108</sup> Pada tahun 2012 jumlah penduduk muslim di Swiss semakin bertambah menjadi sebesar 4,9%.<sup>109</sup>



Gambar 2. Pertumbuhan Muslim di Swiss pada tahun 1990, 2010 dan 2012

Sebelum tahun 1960 sangat sulit menemukan orang muslim dalam populasi penduduk Swiss. Namun kemudian terjadi perubahan semenjak adanya migrasi muslim ke Swiss melalui tiga gelombang imigrasi, yaitu gelombang imigrasi berbasis

<sup>107</sup>PewResearch Center. 2011. "Table: Muslim Population by Country". Dikutip dari <http://www.pewforum.org/2011/01/27/table-muslim-population-by-country/> (03 Juni 2015).

<sup>108</sup> Federal Chancellery. 2010. *Op. Cit.* Halaman 8.

<sup>109</sup> Federal Department of Home Affairs (FDHA). 2014. *Statistical Data on Switzerland 2014*. Swiss: Federal Statistic Office (FSO). Halaman 8.

ekonomi, berbasis keluarga, dan berbasis politik.<sup>110</sup> Pada gelombang pertama, orang-orang muslim mulai memasuki Swiss didasarkan pada faktor ekonomi melalui para pekerja dari Turki serta para sesepuh Yugoslavia dan Albania pada akhir tahun 1960-an.<sup>111</sup> Mayoritas dari mereka adalah laki-laki dan biasanya tidak memiliki keinginan untuk menetap secara permanen. Kemudian gelombang kedua terjadi pada akhir tahun 1970-an, setelah Swiss mengubah perundangan-undangan terkait diijinkannya warga negara asing untuk membentuk keluarga di Swiss. Dengan adanya peraturan tersebut membuat para imigran muslim di Swiss merasa lebih diterima. Gelombang terakhir berbasis politik yang terdiri dari para warga negara asing yang mencari suaka dari kediktatoran yang menindas, berbagai perang sipil, kelaparan dan berbagai sebab lainnya. Para imigran dalam gelombang terakhir ini biasanya berasal dari Timur Tengah, bekas Yugoslavia, Afrika Utara dan negara-negara Afrika lainnya.<sup>112</sup>

Berdasarkan data tahun 2007, dari jumlah keseluruhan muslim di Swiss mayoritas berasal dari bekas Yugoslavia. Jumlah penduduk muslim dari Yugoslavia adalah 108.058, Bosnia Herzegovina: 23.457, Makedonia: 43.365, Kroasia: 392 dan Slovenia: 102. Selanjutnya penduduk Turki sebanyak 62.698 dan Albania sebanyak 699 orang. Kemudian diikuti dengan imigran Afrika Utara dan Timur Tengah, seperti Maroko: 4.364, Tunisia: 3.318, Aljazair: 2.654, Mesir: 865, Libya: 489, Irak: 3.171, Lebanon: 1.277 dan Suriah: 459.<sup>113</sup>

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk muslim di Swiss, berbagai asosiasi Muslim di Swiss juga mulai terbentuk. Berdasarkan data tahun 2007 terdapat 35 asosiasi Muslim dengan nama resmi, 4 asosiasi pemuda Muslim, 3 asosiasi perempuan Muslim dan 4 asosiasi bantuan Muslim.<sup>114</sup> Kelompok masyarakat

---

<sup>110</sup> Christine. 2008. *Country Profiles Switzerland*. Euro-Islam Info. Halaman 2. Diakses dari [http://www.muslimpopulation.com/pdf/Switzerland\\_countryprofiles.pdf](http://www.muslimpopulation.com/pdf/Switzerland_countryprofiles.pdf) (pada tanggal 18 Februari 2015).

<sup>111</sup> BBC. 2005. "Muslims in Europe: Country Guide". BBC. Dikutip dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4385768.stm> (18 Februari 2015).

<sup>112</sup> Christine. *Loc. Cit.*

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid.* Halaman 5.

Muslim di Swiss juga diharuskan untuk mematuhi semua hukum dan peraturan Swiss. Sebelum tahun 2008, secara umum tidak ada undang-undang Swiss mencampuri kehidupan umat Islam di Swiss.<sup>115</sup> Meskipun terdapat sedikit gesekan dalam kehidupan sosial antara kebiasaan kaum Muslim dan masyarakat asli Swiss, seperti masalah poligami dan libur hari besar Islam, namun permasalahan tersebut tidak pernah sampai berubah menjadi hal yang serius. Sehingga para penduduk muslim di Swiss masih dapat merasa diterima dan dapat berintegrasi dengan baik dengan kehidupan sosial di Swiss. Integrasi yang baik dari berbagai agama yang ada di Swiss dapat dilihat sebagai hasil dari negosiasi dan penyesuaian bersama antara *host societies* dan orang-orang yang melakukan imigrasi.<sup>116</sup> Situasi yang kondusif ini berlangsung selama lebih dari 40 tahun sejak kaum muslim mulai memasuki Swiss. Namun kemudian muncullah referendum anti-menara masjid pada tahun 2009 yang kemudian mengusik ketentraman dan integrasi dalam keberagaman Swiss.

### 3.2 Hakikat Menara dan Kaitannya dengan Tempat Beribadah Umat Islam

Pada tahun 2007 terdapat 150 tempat beribadah, berupa masjid atau musholla, bagi kaum Muslim di Swiss dan hanya empat masjid yang memiliki menara.<sup>117</sup> Kata menara dalam bahasa Arab juga dikenal sebagai *man r* atau *man ra*, yang berarti tempat api atau cahaya (*nar* atau *nur*). Berdasarkan pendapat para ilmuwan, kata *man ra* berasal dari bahasa Aram yang memiliki arti *candlestick* (tempat lilin).<sup>118</sup>

Sepanjang sejarah Islam, umat Islam telah beradaptasi dengan baik di berbagai wilayah tujuan migrasi muslim, seperti di Asia, Afrika Utara dan kemudian Eropa Barat yang telah semakin menyesuaikan diri secara progresif. Peradaban Islam

---

<sup>115</sup> *Ibid.* Halaman 3.

<sup>116</sup> Martin Scheinin & Reetta Toivanen (Ed). 2004. *Rethinking Non-Discrimination and Minority Rights*. Berlin: Institute for Human Rights. Halaman 203.

<sup>117</sup> Johannes Matyassy & Seraina Flury. *Op. cit.* Halaman 17.

<sup>118</sup> Fatema AlSulaiti. 2013. "Minaret". Ancient History Encyclopedia. Dikutip dari <http://www.ancient.eu/Minaret/> (25 Februari 2015).

telah dipengaruhi oleh berbagai pengaruh budaya. Pengaruh berbagai budaya ini juga mempengaruhi berbagai arsitektur Islam.<sup>119</sup> Asal-usul menara sebenarnya adalah bagian dari menara pengawas orang-orang Yunani serta bagian dari menara katedral umat Kristen.<sup>120</sup> Namun meski demikian seiring dengan berkembangnya perubahan zaman, lambang arsitektur menara telah menjadi bagian dari Sejarah Islam setidaknya sejak abad ke-8 Masehi.

Menurut seorang sarjana Inggris terkemuka yang mengkaji arsitektur Islam, KAC Creswell, masjid Quba yang dibangun Rasulullah di Madinah tidak dilengkapi dengan menara. Creswell memaparkan, jejak menara di dunia Islam pertama kali ditemukan di Damaskus pada 673 M. Menara yang pertama kali berdiri di samping masjid tersebut baru ada 41 tahun setelah Nabi Muhammad SAW tutup usia.<sup>121</sup> Sejak saat itu, menara menjadi fitur konstan masjid di banyak negara Muslim yang kemudian akhirnya menyebar ke berbagai wilayah. Dengan berbagai bentuk menara masjid yang ada baik pendek, tinggi, luas, sempit, kotak, segi delapan, spiral, dan berbagai bentuk lainnya, pada dasarnya berfungsi memanggil umat muslim untuk beribadah dan menunjukkan kehadiran Islam. Selanjutnya seiring berjalannya waktu, pada abad ke-13, menara telah menjadi simbol kejayaan Islam.<sup>122</sup>

Masjid merupakan arsitektur paling khas dari agama Islam. Oleh karena itu keberadaan masjid sangat terikat dengan keberadaan kaum muslim. Keberadaan Masjid dengan menara menunjukkan adanya komunitas Muslim dalam suatu wilayah.

---

<sup>119</sup> Stephano Lathion. 2011. "Cultural Challenge: Islamic Architecture Crosses Into The West" dalam Patrick Haenni dan Stephane Lathion (Ed). *The Swiss Minaret Ban: Islam in Question*. Swiss: Religioscope Institute. Halaman 26.

<sup>120</sup> Religion Facts. (Tanpa Tahun). "What is Minaret". Religion Facts. Dikutip dari <http://www.religionfacts.com/islam/things/minaret.htm> (25 Februari 2015).

<sup>121</sup> Fathurroji. 2014. "Menara Simbol Peradaban Islam". Majalah Gontor. Dikutip dari <http://majalahgontor.net/menara-simbol-peradaban-islam/> (25 Februari 2015).

<sup>122</sup> Rachid Benzine. 2011. "The Minaret in The History of Islam" dalam Patrick Haenni dan Stephane Lathion (Ed). *The Swiss Minaret Ban: Islam in Question*. Swiss: Religioscope Institute. Halaman 19.

Masjid biasanya mencakup kubah dan menara; menara digunakan untuk azan, dan kubah sinyal tempat doa dan pendidikan Islam.<sup>123</sup>

Arsitektur menara mulai memasuki daerah Eropa Timur pada masa kejayaan Utsman. Sebuah masjid di Edirne merupakan masjid pertama pada masa Utsman yang memiliki menara. Menara menjadi salah satu elemen arsitektur penting yang melengkapi masjid pada masa kejayaan Utsman.<sup>124</sup> Menurut Presiden *Islamic Culture Foundation*, Cherif Jah Abderrahman, kehadiran menara pada bangunan masjid merupakan bentuk arsitektur terbaik dan terstrategis sebagai penanda kehadiran dan keberadaan Islam di suatu tempat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kehadiran menara pada bangunan masjid merupakan simbol dari peradaban Islam.<sup>125</sup> Bentuk kubah dan menara bervariasi dalam bentuk, bahan bangunan, dan ukuran sesuai dengan wilayah dan dinasti politik. Pada masa kejayaan Utsman penggunaan beberapa menara dalam konstruksi masjid melambangkan perlindungan sultan dan perluasan kekuasaan Utsman.<sup>126</sup>

Seiring berjalannya waktu, di era modern menara tidak lagi selalu berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan, terkadang hanya untuk meletakkan pengeras suara atau hanya sekedar arsitektur pelengkap sebagai simbol keberadaan masjid besar. Meski kini menara tidak lagi menjadi tempat untuk mengumandangkan azan, hampir setiap bangunan masjid besar di seluruh dunia dilengkapi dengan menara. Menurut Profesor Jonathan Bloom, seorang spesialis menara dari Universitas Boston, menyatakan bahwa pembangunan menara akan terus berlangsung meskipun tidak digunakan sebagai pengeras suara saat mengumandangkan azan, namun lebih sebagai

---

<sup>123</sup> John L. Esposito (Eds). 2003. "The Oxford Dictionary of Islam". Oxford University Press. Dikutip dari <http://www.oxfordislamicstudies.com/print/opr/t125/e188> (2 Maret 2015).

<sup>124</sup> Kerim Altug. 2010. "Origins and Evolution of Minarets". World Bulletin. Dikutip dari <http://www.worldbulletin.net/art-culture/56881/origins-and-evolution-of-minarets> (25 Februari 2015).

<sup>125</sup> Republika. 2009. "Menara: Simbol Peradaban Islam". Republika Online. Dikutip dari <http://www.republika.co.id/berita/shortlink/34664> (25 Februari 2015).

<sup>126</sup> John L. Esposito (Ed). *Loc. Cit.*

simbol yang nampak dari kehidupan Islam di dunia.<sup>127</sup> Terlepas dari fakta bahwa menara pada awalnya bukanlah hal yang melekat erat dengan masjid, namun kini menara telah menghiasi langit berbagai kota dengan penduduk muslim dan menjadi hal yang identik dengan tempat-tempat suci umat Islam. Setiap daerah mengembangkan gaya menara mereka sendiri. Struktur tersebut sangat dipengaruhi oleh daerah masyarakat, budaya dan konteks yang menentukan bentuk dan ukuran dari setiap menara.<sup>128</sup>

### 3.3 Peningkatan Sentimen Anti - Menara Masjid di Swiss

Pada dasarnya hanya terdapat sedikit menara masjid di Swiss ketika kontroversi mengenai menara mulai muncul. Pada tahun 2005, hanya terdapat dua menara yang telah dibangun di Swiss. Menara masjid pertama dengan tinggi delapan meter terletak di Zurich, berdiri di atas masjid kecil milik komunitas Ahmadiyah yang diresmikan pada tahun 1963. Komunitas Ahmadiyah ini pertama tiba di Swiss pada tahun 1946. Sedangkan menara masjid kedua berada di daerah Petit-Saconnex di Jenewa dengan tinggi dua puluh dua meter. Menara ini dibangun untuk melengkapi sebuah masjid Yayasan Kebudayaan Islam yang telah diresmikan di hadapan presiden Swiss dan raja Saudi pada tahun 1978.<sup>129</sup> Sampai kurun waktu 30 tahun kemudian, tidak ada menara masjid lain yang dibangun di Swiss. Namun selama periode ini, Islam telah berkembang pesat di Swiss, terutama karena gelombang imigrasi dari Turki dan Balkan.

Pada tanggal 10 Januari 2005, asosiasi Turki di wilayah Wangen yang terletak di Kanton Solothurn mengajukan sebuah proposal pembangunan menara setinggi lima sampai enam meter untuk melengkapi arsitektur Masjid Asosiasi Budaya Turki Olten. Namun pengajuan proposal proyek ini menghadapi resistensi yang cukup

---

<sup>127</sup> Jean-Francois Mayer. 2011. "In The Shadow of The Minaret: Origins and Implications of a Citizens Initiative" dalam Patrick Haenni dan Stephane Lathion (Ed). *The Swiss Minaret Ban: Islam in Question*. Swiss: Religioscope Institute. Halaman 10.

<sup>128</sup> Fatema AlSulaiti. *Loc.Cit.*

<sup>129</sup> Jean-Francois Mayer. *Loc. Cit.*

besar. Perlawanan tersebut berupa sebuah petisi yang terdiri dari 400 tanda tangan penduduk, yang diikuti dengan penolakan oleh komisi bangunan kota.

Namun kemudian pada bulan Juli 2006, penolakan terhadap pembangunan menara tersebut dicabut oleh otoritas kanton dengan syarat bahwa menara tersebut tidak boleh digunakan untuk mengumandangkan azan. Pengadilan administratif kanton menolak petisi tersebut dengan pengamatan bahwa pengajuan tersebut sama saja dengan pembangunan rumah ibadah lainnya, sama seperti halnya gereja dengan atau tanpa menara, menara tidak akan mengubah tujuan dari suatu bangunan.<sup>130</sup>

Akan tetapi pihak yang tidak menyetujui pembangunan menara ini tidak menyerah, bahkan kemudian mengajukan sebuah perkara kepada Pengadilan Administratif pada bulan November 2006. Polemik tersebut terus diperpanjang dengan berbagai pengajuan banding sampai kemudian putusan Pengadilan Federal menolak perkara tersebut pada tanggal 4 Juli 2007. Hingga kemudian menara masjid di Wangen tersebut diresmikan pada akhir Juni 2009.

Selain pembangunan menara masjid di Wangen, sebenarnya pada tahun 2005 juga diajukan sebuah proyek pembangunan menara di masjid Asosiasi Islam-Albania milik Pusat Kajian Islam Albanese di Winterthur. Pembangunan menara masjid di Winterthur ini tidak menimbulkan banyak kontroversi seperti yang terjadi di Wangen. Meski demikian dampak dari kemunculan pihak yang tidak menyetujui menara masjid di Wangen menimbulkan terbentuknya sebuah gerakan. Bagi beberapa politisi dan masyarakat yang mengkhawatirkan eksistensi menara, mereka melihat menara sebagai sebuah simbol merajalelanya islamisasi (*rampant islamisation*) di Swiss.<sup>131</sup> Menurut mereka menara berfungsi sebagai ujung tombak untuk pengenalan hukum syariah yang akhirnya akan mengarah pada Islamisasi Swiss.<sup>132</sup>

---

<sup>130</sup> Lorenz Langer. 2010. "Panacea or Pathetic Fallacy? The Swiss Ban on Minarets" dalam *Vanderbilt Journal of Transnational Law*. Volume 43. Oktober No. 4. Tennessee: Vanderbilt University. Halaman 869.

<sup>131</sup> Jean-Francois Mayer. *Op. Cit.* Halaman 11.

<sup>132</sup> Lorenz Langer. *Op. Cit.* Halaman 879.

Sentimen anti-menara masjid tersebut semakin menguat sejak munculnya beberapa proyek menara masjid baru beberapa bulan setelah pembangunan menara di Winterthur di kanton Zurich. Komunitas-komunitas Islam di Langenthal yang berada di kanton Bern dan komunitas Islam di wilayah Wil di kanton St. Gallen telah mengajukan ijin pembangunan menara masjid baru. Dalam pengajuan dua proyek pembangunan menara masjid tersebut, menara hanya akan memiliki fungsi simbolik dan tidak dapat digunakan untuk panggilan azan. Tapi gagasan simbolik tersebut tetap menjadi masalah bagi beberapa warga sama seperti halnya masalah panggilan azan melalui pengeras suara.

Sebuah petisi yang terdiri dari 3.500 tanda tangan warga dan 76 permohonan penolakan menara masjid telah diajukan kepada pemerintah kota di Langenthal.<sup>133</sup> Kasus di Langenthal menjadi menarik karena di Langenthal berdiri sebuah kuil Gurdwara bagi komunitas Sikh di Swiss, yang dibangun dengan warna putih yang mencolok disertai dengan menara yang di atasnya terdapat panah emas. Ketika proyek pembangunan tempat dan arsitektur ibadah umat Islam memperoleh perlawanan, pembangunan kuil umat Shikh justru berjalan aman tanpa protes dan kontroversi seperti yang terjadi di beberapa tempat beribadah umat muslim.<sup>134</sup> Hal ini semakin menguatkan pernyataan bahwa xenofobia memang lebih sering menyerang kelompok muslim.

Perdebatan mengenai menara masjid di Swiss berbeda dengan kasus yang terjadi di negara-negara lainnya. Biasanya kekhawatiran terhadap pembangunan menara terkait dengan masalah kebisingan saat pengumandangan azan melalui pengeras suara ataupun dikarenakan terkait dengan keamanan lalu lintas udara. Namun lain halnya dengan yang terjadi di Swiss. Perdebatan mengenai menara di Swiss merupakan perdebatan mengenai Islam secara lebih luas. Serangan inisiatif terhadap menara pada dasarnya merupakan pelampiasan dari berbagai gesekan budaya yang terjadi ditengah masyarakat Swiss.

---

<sup>133</sup> Jean-Francois Mayer. *Loc. Cit.*

<sup>134</sup> *Ibid.*

Sebelumnya perdebatan mengenai Islam berfokus pada praktek keagamaan yang terlihat di publik, seperti masalah murid perempuan yang dibebaskan dari kelas renang di sekolah umum, perselisihan mengenai jilbab, polemik mengenai daging halal, masalah mengenai kuburan umat Islam, dan juga masalah kehadiran jaringan partai terlarang *Front Islamic du Salut* (FIS) Aljazair Islam di Swiss pada awal 1990-an.<sup>135</sup> Selain berbagai kasus domestik terkait Islam, ancaman terorisme Islam dan isu global terkait "*war on terrorism*" telah memicu meningkatnya permusuhan dan kebencian terhadap populasi Muslim.<sup>136</sup>

Inisiatif mengenai menara tersebut merupakan bagian dari dimensi baru terkait ketegangan seputar Islam di Barat, di mana yang menjadi perdebatan bukan lagi mengenai materi utama Islam melainkan lebih mengenai tanda-tanda dan simbol-simbol. Ciri khas dari dimensi ketegangan baru tersebut adalah hal yang menjadi fokus permasalahan justru bukanlah hal atau unsur esensial dari kehidupan sehari-hari umat Islam seperti shalat, azan dan puasa, melainkan simbol-simbol seperti hijab dan kini menara. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah menara di Swiss hanya empat, dan pengajuan izin perencanaan proyek pembangunan menara dapat dikatakan jarang terjadi.<sup>137</sup> Sehingga menara yang sebenarnya bukanlah elemen utama dalam kehidupan umat Islam, kini justru menjadi polemik baru dalam kehidupan umat Islam. Munculnya inisiatif anti-menara tersebut memaksa kedua belah pihak, baik politisi atau warga negara, untuk mulai memikirkan masalah baru tersebut secara serius.

---

<sup>135</sup> Oliver Moos & Patrick Haenni. 2011. "From The Top of The Minaret: Symbols and Social Obliviousness" dalam Patrick Haenni dan Stephane Lathion (Ed). *The Swiss Minaret Ban: Islam in Question*. Swiss: Religioscope Institute. Halaman 87.

<sup>136</sup> Josi, Claudia. 2014. "Direct Democracy: What if There is A Conflict Between The Will of The People and Fundamental Rights? – A Comparative Analysis Between Switzerland and California". *Working paper for IX World Congress Constitutional Challenges: Global and Local Workshop 16 Direct Democracy*. Oslo: Universitas Santa Clara. Halaman 11.

<sup>137</sup> Oliver Moos & Patrick Haenni. *Loc. Cit.* Halaman 88.

### 3.3.1 Pihak-pihak dibalik Politisasi Anti-Menara Masjid di Swiss

Meningkatnya permusuhan terhadap menara merupakan hasil dari sebuah kombinasi antara opini publik yang tersebar luas dan keinginan dari kekuatan politik tertentu yang memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan pribadi. Partai politik kanan, *Schweizerische Volkspartei / Swiss People's Party* (SVP) dan *Eidgenössisch-Demokratische Union / Federal Democratic Union* (EDU) merupakan aktor utama dibalik inisiatif ini. SVP memperjuangkan nilai-nilai konservatif dan nasionalis, dikaitkan dengan otonomi dan nilai-nilai peninggalan Swiss serta mempolitisasi berbagai polemik terkait orang asing. Dengan memperjuangkan nilai-nilai tersebut membuat partai SVP menjadi partai terkuat pada pemilihan federal pada tahun 2007 dengan hasil 29%.<sup>138</sup> Sedangkan EDU merupakan sebuah partai kecil Kristen Nasrani di Swiss yang sangat mendukung pemikiran SVP terkait Islam di Swiss dan bekerjasama dengan SVP dalam upaya mewujudkan larangan anti-menara masjid di Swiss. Kedua partai tersebut berperan aktif dalam mengusung isu islam dan bahaya dari Islam. Mereka menyebar luaskan sentimen anti-menara masjid sampai ke kanton-kanton yang tidak ada pengajuan pembangunan menara masjid baru. Melalui gerakan parlemen di beberapa legislatif kewilayahan, kedua partai tersebut mencoba untuk melarang pembangunan menara masjid di Swiss.<sup>139</sup>

Sejak September 2005, SVP dan EDU di wilayah Valais sudah mulai mengusulkan kepada parlemen agar menolak izin pembangunan menara masjid meskipun pada saat itu di Valais tidak ada pengajuan proposal pembangunan menara masjid baru. Namun usulan tersebut tersingkir dengan hasil 96 suara melawan 5 suara. Selanjutnya pada November 2005 ketika terjadi kontroversi menara di Wangen, SVP dan EDU kembali mengambil tindakan di tingkat parlemen kanton untuk menghentikan pembangunan arsitektur ibadah yang mencolok, dan mengusulkan agar setiap bangunan baru yang bersifat religius harus patuh terhadap peraturan khusus oleh pemerintah setempat. Pada tanggal 1 Maret 2006, pemerintah

---

<sup>138</sup> Martin Baumann. *Loc. Cit.* Halaman 1.

<sup>139</sup> Lorenz Langer. *Op. Cit.* Halaman 870.

menanggapi usulan tersebut dengan menyatakan bahwa peraturan untuk mencegah penyebaran agama tertentu melalui perundangan pembatasan bangunan relijius merupakan hal diskriminatif dan sewenang-wenang, serta bertentangan dengan Konstitusi Swiss.<sup>140</sup>

Meskipun telah beberapa kali gagal, SVP dan EDU belum juga menyerah. Pada bulan September 2006, SVP dan EDU mengumpulkan suara masyarakat yang cukup banyak di Zurich. Tujuan dari pengumpulan suara tersebut adalah untuk memaksa pemerintah kanton untuk merevisi undang-undang tentang kota dan negara agar menghasilkan peraturan mengenai larangan pembangunan menara masjid di kanton, meskipun pada saat itu tidak ada pengajuan proyek pendirian menara baru semacam itu di Zurich. Pemerintahan kanton Zurich merespons usulan tersebut dengan menyatakan bahwa larangan pendirian menara tidak akan memecahkan masalah.

Namun pihak SVP dan EDU terus berusaha mendesak parlemen dan pemerintah untuk melakukan tindakan yang mereka sebut sebagai perluasan ‘bahaya Islam’. Para pendukung inisiatif ini melihat bahaya Islam yang dimaksud disini terdiri dari empat hal yaitu terkait masalah demografi, religiusitas, kota komunitas muslim dan niat politik Islam.<sup>141</sup> Menurut mereka menara dalam hal ini berfungsi sebagai simbol dari bentuk baru kesadaran Islam dan lebih dari itu merupakan simbol yang terlihat dari sebuah realitas yang biasanya tersembunyi. Menara dianggap sebagai sebuah sarana pencitraan dari Islam yang cenderung terkait dengan sikap kekerasan seperti terorisme, kawin paksa, mengancam agama Kristen dan demokrasi, serta berbagai hal lainnya yang ditakutkan kemudian akan meningkatkan pertumbuhan kelompok fundamentalis.<sup>142</sup> Berbagai agenda politik, anggota kelompok kepentingan dan profesi profesional dari para pendukung inisiatif anti-menara berusaha untuk

---

<sup>140</sup> Jean-Francois Mayer. *Op. Cit.* Halaman 12.

<sup>141</sup> Patrick Haenni & Samir Amghar. 2011. “The Conquest of The West Will Not Take Place” dalam Patrick Haenni dan Stephane Lathion (Ed). *The Swiss Minaret Ban: Islam in Question*. Swiss: Religioscope Institute. Halaman 52.

<sup>142</sup> Oliver Moos. *Loc. Cit.* Halaman 80.

terus mempertahankan isu utama ini. Isu utama mengenai ideologi Islam inilah yang terus dijadikan kajian utama oleh partai kanan nasionalis di Swiss.

Kampanye mengenai sentimen anti-menara masjid ini ternyata sangat sarat dengan emosi, polemik dan kontroversi. Sejak awal diajukannya inisiatif mengenai anti-menara, arus penolakan terhadap inisiatif tersebut dalam lingkup domestik Swiss sendiri cukup besar. Berbagai pihak dari masyarakat lainnya sebaliknya justru mengkhawatirkan akan munculnya permasalahan lain dari upaya pemunculan ide mengenai peraturan bangunan religious tersebut. Bahkan sembilan partai lainnya,<sup>143</sup> mayoritas parlemen, pemerintah Swiss serta berbagai organisasi dan komunitas di Swiss seperti organisasi gereja Protestan<sup>144</sup> dan organisasi gereja Katolik tidak menyetujui inisiatif tersebut<sup>145</sup> dan mengajak warga untuk menolaknya. Begitupula Organisasi Evangelis yang besar beserta Partai Eveangelis memilih untuk menolak inisiatif tersebut.<sup>146</sup> Mereka menganggap SVP melanggar kebebasan beragama dan merusak citra Swiss sebagai negara bangsa yang secara politik netral, bebas dan toleran. Mayoritas dari mereka yang menolak inisiatif ini berpikiran liberal dan menekankan bahwa negara Swiss dan hukum yang dimiliki diyakini cukup mampu untuk menghadapi berbagai perkembangan baru dan kuat, seperti halnya pertumbuhan minoritas Muslim dan munculnya pluralitas agama.<sup>147</sup>

Selain itu pemuka masyarakat lainnya juga berusaha untuk mencegah inisiatif tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Uskup Katolik Basel, Kurt Koch, yang mendukung pendirian menara masjid dan melihat hal tersebut sebagai masalah prinsip hak umat Islam untuk memiliki menara sebagai tanda identitas. Menurut Kurt Korch sebuah menara masjid bukanlah sebuah masalah yang besar sama halnya

---

<sup>143</sup>Pendirian partai-partai terkait inisiatif anti-menara masjid dapat dilihat melalui <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/17/03/blank/key/2009/01.html> (20 Desember 2014).

<sup>144</sup> Pernyataan federasi gereja protestan Swiss dapat dilihat dalam website berikut <http://www.sek-feps.ch/de/themen/minarettinitiative> (20 Desember 2014).

<sup>145</sup> Lorenz Langer. *Op. Cit.* Halaman 866.

<sup>146</sup> Jean-Francois Mayer. Daniel Zingg: Defending Switzerland's Christian Roots. *Op. Cit.* Halaman 67.

<sup>147</sup> Martin Baumann. *Op. Cit.* Halaman 3.

dengan keberadaan puncak menara gereja, asalkan menghormati peraturan bangunan yang ada.<sup>148</sup>

Namun penyamaan kasus antara menara masjid dan menara gereja oleh Uskup Kurt Korch tersebut kemudian ditentang oleh kelompok yang melawan pembangunan menara. Menurut mereka menara masjid adalah tanda kekuasaan dan penaklukan, serta merupakan simbol politik dan agama yang membahayakan perdamaian agama di negara federal.<sup>149</sup> Oleh karena itu seorang anggota SVP yang juga merupakan anggota Dewan Nasional, Jasmin Hutter, menganggap bahwa sangatlah penting untuk menghentikan upaya Islam untuk merebut kekuasaan melalui pelarangan menara masjid. Sebagaimana dikatakannya bahwa “... *Minarets are the symbols of this imperialism*”.<sup>150</sup>

Pernyataan lebih lanjut disampaikan oleh anggota majelis nasional SVP, Ulrich Schluer, yang menyatakan bahwa seharusnya kaum muslim di Swiss sudah harus merasa cukup dengan memiliki tempat ibadah yang selama ini mereka miliki tanpa harus memiliki menara. Schluer menyatakan bahwa menara bukanlah simbol religious, melainkan merupakan simbol politik Islam. Menurutnya keberadaan menara akan meningkatkan pertumbuhan ideologi dan syariah Islam yang tidak sesuai dengan konstitusi Swiss. Sebagaimana yang ia katakan sebagai berikut:

*"The minaret has got nothing to do with religion. It's a symbol of political power, a prelude to the introduction of sharia law. They are symbols of an Islam which wants to establish a legal and social order fundamentally contrary to the liberties guaranteed in our constitution."*<sup>151</sup>

Selain Schluer seorang anggota majelis nasional EDU, Kristen Waber, justru memberikan komentar yang bersifat lebih profokatif dalam sebuah koran lokal Swiss *Neue Zürcher Zeitung*, dengan menyatakan bahwa ia tidak menganggap Islam sebagai

---

<sup>148</sup> Jean-Francois Mayer. *Loc. Cit.*

<sup>149</sup> *Ibid.* Halaman 13.

<sup>150</sup> Oliver Moos. *Op. Cit.* Halaman 79.

<sup>151</sup> Alexandra William. 2009. "Switzerland risks Muslim backlash after minarets vote". The Telegraph. Dikutip dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/switzerland/6685719/Switzerland-risks-Muslim-backlash-after-minarets-vote.html> (01 April 2015).

agama, melainkan melihat Islam sebagai sebuah deklarasi perang terhadap dunia Kristen dan agama lainnya.<sup>152</sup>

Berdasarkan berbagai pernyataan yang disampaikan oleh para politisi partai kanan tersebut, dapat diamati bahwa Islam memang seringkali dijadikan sebagai isu utama yang dapat dengan mudah dibentuk agar sesuai dengan berbagai agenda politik atau ideologi di tingkat nasional dan internasional. Mereka berusaha untuk menyebar luaskan sentimen xenofobia terkait Islam melalui sentimen anti-menara masjid, dengan mengaitkan dengan ketakutan akan munculnya kelompok fundamentalis Islam dan penerapan syariah Islam. Oleh karena itu semakin terlihat jelas landasan utama terjadinya politisasi anti-menara masjid di Swiss tersebut.

### 3.3.2 Proses Politisasi Anti-Menara Masjid di Swiss

Pada bulan September 2006, anggota masyarakat yang menentang pembangunan menara masjid baru yang datang dari berbagai latar belakang dan telah aktif dalam beberapa kasus kontroversi penolakan menara di wilayah Wangen, Langenthal, Wil atau Winterthur berkumpul di Egerkingen (Solothurn). Pertemuan ini diprakarsai oleh anggota SVP dan EDU. Tujuan mereka berkumpul ialah untuk mendiskusikan dan mengatur upaya untuk mengajukan inisiatif populer terkait pelarangan menara (*Banning minaret*) ke tingkat federal. Orang-orang yang berkumpul dalam pertemuan terdiri dari 16 anggota, yang kemudian dikenal dengan Komite Egerkingen.<sup>153</sup>

Upaya mereka untuk mengajukan larangan terhadap pendirian menara masjid baru pada dasarnya tidak murni menyerang menara tersebut. Mereka melihat menara sebagai sebuah simbol klaim politik-agama Islam yang bertentangan dengan sistem

---

<sup>152</sup> Jean-Francois Mayer. "In The Shadow of The Minaret: Origins and Implications of a Citizens Initiative". *Op. Cit.* Halaman 14.

<sup>153</sup> Nama dari seluruh anggota komite dapat dilihat melalui <http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2007/3231.pdf> (pada 01 Maret 2015).

hukum dan konstitusi Swiss<sup>154</sup>. Sebagaimana seorang anggota dari komite Egerkingen yang juga seorang politisi partai UDC dan seorang pendeta, Daniel Zingg, menyatakan bahwa “... *the minaret is a sign of conquest and islamisation.*”<sup>155</sup> Dalam artian bahwa menara masjid dilihat sebagai sebuah simbol dari penaklukan dan islamisasi. Sehingga kemudian mereka melihat larangan menara, merupakan cara yang efektif untuk melindungi tatanan konstitusional Swiss dan merupakan langkah tepat untuk mengatasi Islamisasi.<sup>156</sup>

Setelah terbentuknya komite Egerkingen, seluruh anggota komite tersebut kemudian berkumpul kembali di Hotel Kreuz pada 10 April 2007 untuk mengadakan pertemuan resmi terkait upaya pengajuan inisiatif populer. Isi dari inisiatif populer yang hendak diajukan tersebut ialah meminta pemerintah untuk merevisi Pasal 72 Konstitusi Federal (*Bundesverfassung/Constitution Fédérale*). Usulan dari komite ini yaitu ingin melengkapi Pasal 72 pada Konstitusi Federal Swiss dengan menambahkan Ayat 3 dengan aturan yang berisi "Dilarang membangun menara (*the construction of minarets is prohibited / Der Bau von Minaretten ist verboten*)."<sup>157</sup>

Komite Egerkingen mendasarkan pengusulan inisiatif tersebut pada dua alasan berikut:

- a) menara akan menjadi lambang permintaan politik-agama oleh umat Islam untuk mengubah tatanan hukum yang ada di suatu negara yang demokratis, serta memerintah kondisi masyarakat di negara tersebut.

---

<sup>154</sup> Parlemen Federal Swiss. 2008. “Gegen den Bau von Minaretten. Volksinitiative”. Diakses dari [http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/legislaturrueckblick.aspx?rb\\_id=20080061](http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/legislaturrueckblick.aspx?rb_id=20080061) (pada tanggal 03 Maret 2015).

<sup>155</sup> Jean-Francois Mayer. 2011. “Daniel Zingg: Defending Switzerland’s Christian Roots” dalam Patrick Haenni dan Stephane Lathion (Ed). *The Swiss Minaret Ban: Islam in Question*. Swiss: Religioscope Institute. Halaman 67.

<sup>156</sup> Lorenz Langer. *Op. Cit.* Halaman 865.

<sup>157</sup> Pasal 72 pada Konstitusi Federal Swiss merupakan pasal yang mengatur hubungan antara negara dan agama di Swiss yang sebelum diadkan inisiatif ini pasal ini hanya terdiri dari 2 ayat. Isi dari inisiatif dapat dilihat melalui <http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2007/3231.pdf> (01 Maret 2015).

b) Pembangunan menara akan mengancam perdamaian agama di Swiss.<sup>158</sup>

Dalam upaya pengajuan inisiatif populer tersebut, Komite Inisiatif harus mengumpulkan sedikitnya 100.000 tanda tangan yang menyatakan dukungan terhadap inisiatif tersebut dalam jangka waktu 18 bulan. Hingga kemudian terkumpul 114.137 tanda tangan warga dari 26 kanton di Swiss yang kemudian diajukan pada Kanselir Federal Swiss di Bern pada 8 Juli 2008. Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2008, Kanselir Federal Swiss menyatakan bahwa pengajuan inisiatif telah memenuhi syarat dengan terkumpulnya tanda tangan yang dibutuhkan. Dari 114.137 tanda tangan yang diserahkan, 113.540 tanda tangan dinyatakan valid.<sup>159</sup>

Sebelum pelaksanaan referendum, dilaksanakan sebuah survey pra-pemilu oleh lembaga polling terpercaya gfs.bern, yang hasilnya menyatakan bahwa mayoritas masyarakat menolak larangan menara dan hanya sekitar 35 persen masyarakat yang memilih mendukung inisiatif tersebut.<sup>160</sup> Adanya survey tersebut tidak membuat para pendukung inisiatif gentar, bahkan yang terjadi mereka justru semakin gencar melakukan upaya untuk mengajak masyarakat mendukung inisiatif tersebut.

Selama kampanye sebelum pelaksanaan referendum, pendukung larangan pembangunan menara tersebut berusaha memperoleh dukungan dengan menggunakan cara kontroversial, yaitu dengan semakin memperpanas berbagai debat publik terkait menara dan menyebarkan berbagai poster yang sangat provokatif. Seperti salah satu poster yang menunjukkan seorang wanita yang menggunakan burqa di depan bendera Swiss yang tertusuk oleh menara masjid dalam jumlah yang banyak.<sup>161</sup> Poster ini menggambarkan rusaknya budaya Swiss oleh invasi kekerasan invasi Islam.<sup>162</sup>

---

<sup>158</sup> Erwin Tanner. 2011. "A Minaret Ban In The Federal Constitution?" dalam Patrick Haenni dan Stephane Lathion (Ed). *The Swiss Minaret Ban: Islam in Question*. Swiss: Religioscope Institute. Halaman 56.

<sup>159</sup> Keputusan Federal mengenai validitas tanda tangan warga tiap kanton dapat diakses melalui <http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2008/6851.pdf> (pada tanggal 01 Maret 2015).

<sup>160</sup> Martin Baumann. *Loc. Cit.*

<sup>161</sup> Lorenz Langer. *Op. Cit.* Halaman 873.

<sup>162</sup> Oliver Moos. *Loc. Cit.* Halaman 80.

Berbagai poster tersebut terpampang di sebagian besar ruang publik untuk memperoleh perhatian dari masyarakat.

Digunakannya berbagai poster yang profokatif tersebut semakin meningkatkan ketegangan yang timbul di masyarakat. Penduduk muslim merasa tertekan dan merasa tidak nyaman berada di ruang publik. Poster tersebut juga semakin meningkatkan xenofobia terhadap Islam di Swiss. *The Swiss Federal Commission Against Racism* menyatakan bahwa poster-poster tersebut merupakan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap populasi Muslim Swiss. Beberapa kanton di Swiss melarang penggunaan poster tersebut, seperti yang dilakukan di kanton Basel, Lausanne dan Fribourg. Akan tetapi lain halnya dengan Dewan Kanton Zurich, meskipun mereka setuju bahwa poster tersebut mengandung unsur negatif dan berbahaya, namun dewan kanton mengizinkan penggunaan poster tersebut sebagai bagian dari hak politik terkait kebebasan untuk berpendapat atau berbicara. Hal ini kemudian juga disetujui oleh Dewan Kanton Jenewa, Lucerne dan Winterthur yang mengizinkan penggunaan poster tersebut.<sup>163</sup>

Selama memanasnya kondisi masyarakat pada masa kampanye tersebut, terjadi serangan terhadap dua masjid di Swiss yaitu masjid asosiasi Turki di Zurich dan masjid Jenewa. Masjid Jenewa diserang menggunakan cat yang dituliskan di pintu masuk masjid, serta terdapat serangan lain menggunakan batu yang diarahkan ke dinding masjid.<sup>164</sup> Masjid asosiasi Turki di Zurich juga diserang menggunakan batu dan juga ditambah dengan digantungnya berbagai produk daging babi dan anggur di depan pintu masuk masjid. Selain itu parkir yang selama ini digunakan oleh jemaah masjid yang terletak di sekitar rel kereta api dekat masjid, tiba-tiba dilarang untuk

---

<sup>163</sup>BBC. 2009. "Zurich allows Anti-Minaret Poster". BBC. Dikutip dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8297826.stm> (31 Maret 2015).

<sup>164</sup>Alexander G. Higgins. 2009. "Swiss vote on anti-Islam move to ban new minarets". The Jakarta Post. Dikutip dari <http://m.thejakartapost.com/news/2009/11/29/swiss-vote-antiislam-move-ban-new-minarets.html> (08 Maret 2015).

digunakan sebagai tempat parkir untuk jemaah oleh para petugas kereta api.<sup>165</sup> Hal ini menjadi masalah besar karena hal tersebut merupakan pertama kalinya terdapat serangan terhadap tempat beribadah selama lebih dari 40 tahun Islam berada di Swiss.<sup>166</sup> Selain itu juga terdapat kampanye menggunakan video game *online* yang menggambarkan meledaknya menara masjid ke berbagai daerah di Swiss dengan pesan di akhir *game* yang bertuliskan ‘*Game over! Switzerland is covered in minarets. Vote to ban them on November 29.*’<sup>167</sup>

Respons kaum muslim Swiss dalam menghadapi meningkatnya xenofobia terhadap pendirian menara masjid ini sangat beragam. Sebagian muslim berusaha untuk bersikap lebih tenang, namun sebagian besar dari mereka merasa tertekan dan marah. Mereka yang bersikap lebih tenang berusaha untuk saling menenangkan antar sesama muslim dan berusaha untuk terus menjalin hubungan yang baik dengan penduduk asli Swiss, seperti yang dilakukan oleh Nadia Karmous yang merupakan Pemimpin Asosiasi Budaya Muslim Wanita Swiss (*Muslim Women’s Cultural Association of Switzerland*).<sup>168</sup> Sedangkan sebagian penduduk muslim, seperti sebuah organisasi Islam di Swiss, yang merasa marah dengan hal ini melihat inisiatif anti-menara tersebut sebagai sebuah tindakan diskriminatif dan sebuah penghinaan.<sup>169</sup> Sebagaimana diungkapkan oleh Farhad Ashar, Ketua Organisasi Koordinasi Islam Swiss, bahwa “*The most painful thing for us is not the ban on minarets but the symbol*

---

<sup>165</sup> John Tagliabue. 2010. “Baking Swiss Treats Amid Acid Debate”. The New York Times. Dikutip dari <http://www.nytimes.com/2010/01/27/world/europe/27swiss.html?pagewanted=all> (8 Maret 2015).

<sup>166</sup> BBC. 2009. “Swiss Voters Back Ban on Minarets”. BBC. Dikutip dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8385069.stm> (31 Maret 2015).

<sup>167</sup> Institute of Race Relations. 2010. *The Swiss Referendum on Minarets: Background and Aftermath*. London: European Race Audit. Halaman 2.

<sup>168</sup> Jean-Francois Mayer. *Loc. Cit.*

<sup>169</sup> Alexandra Williams. 2009. “Switzerland faces backlash over minaret ban”. The Telegraph. Dikutip dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/switzerland/6692584/Switzerland-faces-backlash-over-minaret-ban.html> (31 Maret 2015).

*sent by this vote.*" Elham Manea, Pendiri Forum Progresif Islam, juga menambahkan *"It's a message that you are not welcome here as true citizens of this society."*<sup>170</sup>

Dalam menghadapi semakin panasnya perdebatan dan kampanye anti-menara ditengah masyarakat Swiss, komunitas muslim Swiss berusaha menanggapi secara bijak dengan melakukan aksi *open doors* di berbagai masjid yang terdapat di Swiss yang dilaksanakan di dua belas kanton termasuk kanton Jenewa, Vaud dan Freiburg. Aksi ini dilaksanakan tiga minggu sebelum pelaksanaan referendum.<sup>171</sup> Tujuan dari aksi ini ialah untuk menunjukkan kepada masyarakat Swiss bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dari menara masjid. Mereka ingin membangun dialog dan pemahaman yang lebih baik bahwa menara bukanlah simbol politik Islam melainkan simbol kebebasan beragama. Muslim Swiss ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kedamaian dan masyarakat muslim adalah masyarakat yang cinta damai. Sebagaimana dikatakan oleh Mahmoud El Guindi, Ketua *Zurich's Islamic Center*, sebagai berikut:

*"We view the minaret as a symbol of religious freedom. There is sometimes some fear in society, of Islam or the Muslims, based on various political events... and when they come here and they talk to the people and put their questions, they can see that Islam is a peaceful religion like other religions."*<sup>172</sup>

Ahmed Sadaquat, seorang Imam di Masjid Zurich, menyatakan bahwa inisiatif tersebut terjadi karena kesalah pahaman mengenai Islam yang disebar luaskan oleh sekelompok orang untuk memperoleh popularitas secara politik, dan ia mengharapkan referendum tersebut akan ditolak oleh masyarakat. Sebagaimana yang ia katakan sebagai berikut:

*"The misconceptions and misunderstanding about Islam are being spreaded by these people and they are still doing that. So there*

---

<sup>170</sup> BBC. "Swiss Voters Back Ban on Minarets". *Loc. Cit.*

<sup>171</sup> BBC. 2009. "Swiss Muslim Open Mosque Doors". BBC. Dikutip dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8348279.stm> (31 Maret 2015).

<sup>172</sup> Imogen Foulkes. 2009. "Switzerland to Vote on Plan to Ban Minarets". BBC. Dikutip dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8381274.stm> (31 Maret 2015).

*are people who are backing this referendum. But you know, there are a minority and I hope that this referendum is not going to get through. The real motivation is to get the popularity, political popularity firstly. And the second thing is to oppose the Muslim people.”<sup>173</sup>*

Selain komunitas Islam berbagai anggota masyarakat lainnya juga memberikan dukungan kepada kelompok muslim dan berusaha mengajak masyarakat untuk menolak inisiatif tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Federasi Gereja yang memasang poster besar dengan gambar langit dan berbagai simbol arsitektur beragama seperti menara masjid, menara gereja dan juga wihara untuk menggambarkan intoleransi beragama. Selain itu juga terdapat dukungan dari kelompok wanita Swiss, *Femme Socialistes*, yang berusaha mengajak masyarakat untuk menentang larangan tersebut dengan menggunakan slogan ‘*Oppose the ban; support equality!*’.<sup>174</sup>

Namun dikarenakan inisiatif tersebut telah dinyatakan validitasnya maka proses pengajuan inisiatif tersebut masih terus berlangsung. Berdasarkan keputusan Kanselir Federal tersebut Dewan Federal (eksekutif) harus mengirimkan pesan dan proyek keputusan federal kepada Majelis Federal dalam waktu satu tahun terhitung sejak 8 Juli 2008. Seluruh anggota parlemen baik dewan nasional dan dewan negara melakukan diskusi dan penilaian terhadap inisiatif tersebut, Dewan Nasional mengadakannya pada tanggal 4 Maret 2009 dan 12 Juni 2009 sedangkan Dewan Negara mengadakannya pada tanggal 5 dan 12 Juni 2009. Mayoritas suara di kedua kamar parlemen, baik Dewan Negara dan Dewan Nasional, menyatakan inisiatif tersebut sah secara hukum. Akan tetapi parlemen menganjurkan warga untuk menolak inisiatif tersebut. Usulan parlemen agar masyarakat Swiss menolak inisiatif tersebut didasarkan pada keputusan pemilihan suara dalam parlemen dengan

---

<sup>173</sup> Philip Williams. 2009. “The Swiss to vote on ban of minarets on mosques”. ABC. Dikutip dari <http://www.abc.net.au/pm/content/2009/s2755831.htm> (08 Maret 2015).

<sup>174</sup> Institute of Race Relations. *Op. Cit.* Halaman 3.

kemenangan suara untuk menolak sebesar 36 orang banding 3 dalam Dewan Negara, dan 129 orang banding 50 dalam Dewan Nasional.<sup>175</sup>

Selanjutnya Dewan Federal diminta untuk memberikan penilaian dalam kurun waktu dua setengah tahun terhitung dari 8 Juli 2008 sampai 8 Januari 2011 untuk merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara. Berdasarkan keputusan parlemen tersebut pada 12 Juni 2009 Dewan Federal menyatakan bahwa inisiatif tersebut valid, maka oleh karena itu harus dilaksanakan pemungutan suara oleh masyarakat dan Kanton dalam jangka waktu 10 bulan kedepan.<sup>176</sup> Meski demikian, keputusan untuk melaksanakan pemungutan suara juga disertai dengan rekomendasi untuk menolak, sesuai dengan keputusan Federal tahun 2009 nomor 3903.<sup>177</sup> Terdapat tiga alasan utama dikeluarkannya rekomendasi ini, pertama: secara hukum, larangan menara melanggar hak asasi manusia dan nilai-nilai Konstitusi Swiss; dalam hal domestik, inisiatif tersebut beresiko akan mengasingkan penduduk Muslim dan menyebabkan ketegangan sosial; dalam hal internasional, referendum tersebut akan berdampak pada citra dan kepentingan nasional Swiss.<sup>178</sup>

Rekomendasi untuk menolak inisiatif tersebut didasarkan pada analisis pemerintah yang secara keras menyatakan bahwa inisiatif anti-menara tersebut pada dasarnya merupakan larangan yang tidak perlu dan tidak proporsional, yang akan menjadi batasan *de facto* kebebasan beragama. Inisiatif tersebut juga menunjukkan sebuah penanganan yang timpang, karena hanya ditargetkan kepada komunitas Muslim. Pemerintah lanjut menganggap bahwa inisiatif akan merusak kepentingan negara dan tidak akan membantu mengurangi diskriminasi.<sup>179</sup> Dewan Nasional

---

<sup>175</sup> Rekomendasi Majelis Federal untuk menolak inisiatif dapat dilihat di <http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2008/7603.pdf> (01 Maret 2015).

<sup>176</sup> Keputusan Federal terkait inisiatif anti-menara dapat dilihat di <http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2008/7653.pdf> (01 Maret 2015).

<sup>177</sup> Website resmi Kanselir Federal Swiss. 2009. *Bundesbeschluss über die Volksinitiative (Gegen den Bau von Minaretten)* diakses dari <http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2009/4381.pdf> (pada tanggal 01 Maret 2015) dan file resmi akan dilampirkan pada lampiran IV.

<sup>178</sup> Marco Antonish & Phil I. Jones. 2010. *Mapping the Swiss Referendum on the Minaret Ban*. Inggris: Loughborough University. Halaman 03.

<sup>179</sup> Jean Francois Mayer. *Op. Cit.* Halaman 14 – 15.

menyatakan dalam bulletin resminya bahwa Perang melawan ekstremisme melalui inisiatif tersebut bukanlah hal yang pantas. Jika inisiatif tersebut dimaksudkan untuk menghentikan semakin kuatnya pengaruh Islam di Swiss, maka hal tersebut tidak akan tercapai melalui larangan menara masjid.<sup>180</sup> Selanjutnya parlemen Swiss juga memperingatkan bahwa larangan menara masjid akan menimbulkan konsekuensi politik, ekonomi, dan hukum yang serius di tingkat internasional.<sup>181</sup>

Kemudian berdasarkan keputusan pemerintah, pada hari Minggu tanggal 29 November 2009 dilaksanakan referendum terkait inisiatif anti-menara masjid di Swiss. Total pemilih berjumlah 5.039.676 dan 120.283 suara berasal dari penduduk Swiss yang berada di Luar Negeri. Total suara yang terkumpul berjumlah 2.709.287, maka jumlah persentase pemilih adalah 53,76%. Dari sekian banyak kertas suara terdapat kertas suara yang kosong berjumlah 30.519 dan kertas suara yang rusak sebanyak 9.318, maka surat suara yang tidak sah berjumlah 39.387. Berdasarkan data tersebut maka kertas suara yang sah berjumlah 2.669.450<sup>182</sup> Hasil dari referendum tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6. Data hasil pelaksanaan Referendum Anti-Menara Masjid Swiss

Pemilih	Ya atau Tidak	Suara	Persentase
Warga/Orang	Ya	1.535.010	57,5 %
	Tidak	1.134.440	42,5 %
Kanton	Ya	17 5/2	
	Tidak	3 1/2	
<b>Suara sah</b>		2.669.450	98,53 %
<b>Suara yang tidak sah</b>		39.387	1,47 %
<b>Total Suara</b>		<b>2.709.287</b>	<b>100 %</b>

Sumber : <http://www.admin.ch/ch/d/pore/va/20091129/det547.html>

<sup>180</sup> Parlemen Swiss. 2009. "Contre la construction de minarets, Initiative populaire". Dikutip dari [http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4807/290457/d\\_n\\_4807\\_290457\\_290626.htm?DisplayTextOid=290627](http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4807/290457/d_n_4807_290457_290626.htm?DisplayTextOid=290627) (05 Maret 2015).

<sup>181</sup> Lorenz Langer. *Op. Cit.* Halaman 874.

<sup>182</sup> Website resmi Kanselir Federal Swiss. 2009. "Volksinitiative vom 08.07.2008 'Gegen den Bau von Minaretten'" diakses dari <http://www.admin.ch/ch/d/pore/va/20091129/det547.html> (pada tanggal 01 Maret 2015).

Berdasarkan data tersebut dijelaskan bahwa 57,5% mayoritas mendukung inisiatif dan hanya 42,5% yang memilih untuk menolak referendum. Hasil ini cukup mengejutkan berbagai pihak karena berdasarkan berbagai perdebatan dan hasil survey sebelum referendum menunjukkan banyaknya pihak yang menentang inisiatif ini. Dengan kemenangan dari inisiatif yang diajukan, maka secara resmi Konstitusi Federal 18 April 1999 Pasal 72 berubah, dengan ditambahkan ayat ke 3 yang berbunyi “*the construction of minarets is prohibited / Der Bau von Minaretten ist verboten*”.<sup>183</sup>

### 3.4 Respons Domestik Terhadap Larangan Menara Masjid

Setelah diajukannya inisiatif tersebut ke tingkat federal, berbagai perdebatan terjadi melalui artikel, konferensi, website, siaran radio dan televisi. Para penentang inisiatif tersebut menganggap bahwa inisiatif tersebut diskriminatif dan menyerang kebebasan beragama, bahkan lebih jauh lagi dapat mencegah integrasi Muslim dengan masyarakat Swiss. Sebaliknya, para pendukung inisiatif ini percaya bahwa inisiatif pembangunan menara merupakan hal yang tepat untuk mengisyaratkan penolakan mereka terhadap berbagai perluasan Islam dan melihat bahwa hal tersebut justru akan mendorong masyarakat muslim untuk beradaptasi dengan Swiss melalui aturan yang ditetapkan.

Inisiatif ini terus memperoleh perhatian masyarakat karena hal ini merupakan hal baru di Swiss. Swiss sebagai negara yang menyatakan komitmennya terhadap multikulturalisme, secara tiba-tiba memiliki masalah mengenai penolakan sebuah simbol religious yang nampak di publik. Jika diamati lebih lanjut inisiatif anti-menara masjid di Swiss ini motivasi utamanya bukanlah tentang kepedulian terhadap tatanan konstitusional Swiss, dan tentu saja juga bukan dikarenakan ancaman nyata yang ditimbulkan oleh menara masjid. Referendum tersebut dapat dilihat lebih mengenai

---

<sup>183</sup> Perubahan konstitusi federal Pasal 72 dapat dilihat di website resmi pemerintah Swiss sebagai berikut <http://www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis353t.html> (01 Maret 2015) dan file resmi akan dilampirkan pada lampiran V.

pemungutan suara terkait isu integrasi dan eksklusif terkait penerimaan hal asing di tengah-tengah masyarakat Swiss.<sup>184</sup>

Sebelum diadakannya referendum, dilakukan survey terhadap masyarakat Swiss mengenai referendum anti-menara, yang hasilnya mayoritas dari mereka menentang inisiatif tersebut. Namun, tiba-tiba ketika referendum telah dilaksanakan ternyata inisiatif anti-menara menang dengan selisih suara yang cukup besar. Hasil tersebut tentu saja mengejutkan berbagai pihak. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya sangatlah lemah untuk menjadikan menara sebagai simbol standar untuk mewakili dugaan islamisasi dan meningkatnya kelompok fundamentalis di Swiss. Hal ini lebih merupakan sebagai upaya untuk merubah kekhawatiran masyarakat Swiss yang berlebihan terhadap identitas Islam menjadi instrumen politik.

Sosok menara dikemas dengan berbagai isu sensitif mengenai Islam dalam masyarakat. Kini kehadiran imigran secara fisik bukan lagi menjadi masalah utama, visibilitas Islam sebagai sebuah agamalah yang kini menjadi permasalahan di Swiss. Paradoksnya, masyarakat Swiss secara implisit mengakui keberadaan Muslim di Swiss, akan tetapi mereka ingin tetap menjaga agar visibilitas dari berbagai praktek keagamaan Islam di Swiss tidak terlihat. Isu utamanya adalah tidak lagi untuk mengusir imigran, tetapi lebih pada upaya untuk mencegah anak-anak dan komunitas mereka dari berbagai aspek agama Islam yang terlihat di publik.<sup>185</sup>

Dalam kasus ini, banyak pihak menyadari bahwa perdebatan telah bergeser jauh dari pengertian menara secara khusus untuk Islam dan berbagai manifestasinya. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Martin Baumann, seorang Dosen di Universitas Lucerne Swiss, yang menyatakan bahwa;

*“The majority vote to ban the building of minarets is not a single and exceptional result. Rather, it is a dramatized culmination of Swiss politics*

---

<sup>184</sup> Lorenz Langer. *Op. Cit.* Halaman 868.

<sup>185</sup> Olivier Roy. 2011. “Islam in Europe: An Ordinary Religion Like Any Other” dalam Patrick Haenni dan Stephane Lathion (Ed). *The Swiss Minaret Ban: Islam in Question*. Swiss: Religioscope Institute. Halaman 90.

*shifting from long practiced equilibrium to populist polarization and aggressive exclusion of minorities.*<sup>186</sup>

Pernyataan Baumann tersebut menjelaskan bahwa inisiatif anti-menara tersebut lebih kepada bagaimana upaya politisasi dari sebuah sentimen anti-menara yang di dramatisir sedemikian rupa untuk mengucilkan kaum minoritas dengan memanfaatkan sistem yang telah lama diterapkan oleh Swiss.

Hasil dari referendum yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2009 tersebut mengejutkan banyak pihak di Swiss. Setelah diumumkan hasilnya dari pemungutan suara, sejumlah anggota masyarakat Swiss berusaha untuk mengekspresikan keterkejutan dan ketidaksetujuan mereka terkait hasil referendum. Beberapa gerakan akar rumput yang didukung oleh kelompok muslim Swiss mulai terbentuk dan terus berkembang menyatakan aksi mereka melalui berbagai aksi kelompok dan dialog publik.<sup>187</sup> Seperti aksi demonstrasi spontan yang dilakukan di kanton Lausanne dan Bern. Demonstrasi di Bern berawal dari ajakan di sebuah website yang kemudian diikuti oleh lebih dari 60 orang.<sup>188</sup> Pada demonstrasi ini mereka membawa sketsa menara dan membawa spanduk bertuliskan '*This is not my Switzerland!*'.<sup>189</sup>

Komunitas muslim di Swiss menyatakan keterkejutan mereka, seperti pernyataan yang disampaikan oleh Abdel Majri, Ketua Persatuan Muslim Swiss, sebagai berikut "*We were a bit shocked; we hadn't expected this result. This is another step toward Islamophobia in Switzerland and Europe in general.*"<sup>190</sup> Tanggapan lebih lanjut disampaikan oleh seorang muslim Swiss, Ender Demirtas, yang menyatakan bahwa masalahnya bukan hanya inisiatif tersebut, tapi apa yang

---

<sup>186</sup> Martin Baumann. *Loc. Cit.*

<sup>187</sup> Nicole Fischer. 2009. "Comments: Swiss Vote to Ban New Minarets, Nov 29, Online". The Jakarta Post. Diakses dari <http://www.thejakartapost.com/news/2009/12/08/comments-swiss-vote-ban-new-minarets-nov-29-online.html> (pada tanggal 08 Maret 2015).

<sup>188</sup> Alan Fisher. 2009. "Swiss Brace for Minaret Backlash". Aljazeera. Dikutip dari <http://www.aljazeera.com/focus/2009/11/200911304239627876.html> (28 Maret 2015).

<sup>189</sup> Institute of Race Relations. *Op. Cit.* Halaman 4.

<sup>190</sup> *Ibid.*

terjadi setelahnya. Demirtas melihat menara hanyalah sebagai umpan, dan inisiatif tersebut tentu lebih dari sekedar masalah arsitektur yang sederhana. Menurutnya para pengusung inisiatif ini telah menggunakan inisiatif anti-menara untuk menyerang Islam dan menuduh Islam tidak sesuai dengan masyarakat Barat. Selain itu, ia juga khawatir bahwa inisiatif bisa jadi merupakan awal yang membuat para pendukungnya tidak akan berhenti di situ.<sup>191</sup> Saida Keller-Messahli, ketua Forum Islam Swiss, juga mengatakan bahwa kekhawatiran publik sudah terlalu besar dan rasa kebencian telah memenangkan referendum tersebut. Federasi Organisasi Islam mengatakan mereka menyesalkan bahwa propaganda pendukung kampanye telah berhasil menyebarkan rasa takut terkait menara dan Islam kepada mayoritas pemilih.<sup>192</sup>

Selain respons dari masyarakat muslim Swiss, berbagai kelompok masyarakat lainnya juga menyatakan ketidak setujuannya dengan hasil dari referendum. Setelah referendum tersebut, sebuah organisasi perempuan Swiss, *Femmes Socialistes*, menyatakan bahwa mereka menolak hasil referendum tersebut. Mereka menyatakan bahwa mereka mendukung kebebasan beragama dan tidak setuju akan berbagai diskriminasi. Organisasi Yahudi Swiss juga menyatakan keprihatinannya terkait hasil referendum. Rifa'at Lenzin, seorang ilmuwan dari *European Project for Interreligious Learning* di Zurich, juga menyatakan bahwa negara telah mengarahkan Islamofobia pada masyarakat dan sangatlah mengherankan bahwa sebuah argumen yang bersifat subjektif dan terlalu mengada-ada untuk melawan pembangunan menara masjid telah memperoleh dukungan yang begitu besar. Menurut Lenzin partai politik lainnya sangatlah pasif sehingga memungkinkan ruang publik didominasi oleh kampanye para pendukung.<sup>193</sup>

Asosiasi Pemuda Jenewa (*The Network of Geneva Youth Association*) menyatakan ketidak setujuan mereka mengenai hasil referendum dengan melakukan

---

<sup>191</sup> Patrick Haenni dan Stephane Lathion. 2011. "Ender Demirtas: The Initiative is Just The Beginning of a Slippery Slope" dalam Patrick Haenni dan Stephane Lathion (Ed). *The Swiss Minaret Ban: Islam in Question*. Swiss: Religioscope Institute. Halaman 73.

<sup>192</sup> Institute of Race Relations. *Op. Cit.* Halaman 3.

<sup>193</sup> *Ibid.*

aksi di Jenewa *New Square*. Mereka membuat replika menara yang terbuat dari kardus, kayu, kertas dan tisu yang kemudian ditempatkan di kaki patung Jenderal Dufour<sup>194</sup> yang berada diatas kuda. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kekecewaan mereka terkait hasil referendum yang menurut mereka memalukan. Anak-anak muda yang masih belum bisa mengikuti pemilu tersebut berusaha untuk menyampaikan kekecewaan mereka melalui aksi simbolis tersebut.<sup>195</sup>

Selain itu kantor SVP di Zurich dirusak setelah sebelumnya terjadi demonstrasi pada tanggal 29 November 2009 pada malam harinya (setelah pelaksanaan referendum). Sebuah replika menara kecil ditempatkan di depan pintu masuk kantor SVP tersebut. Selain itu juga terdapat sebuah aksi protes individual, seperti yang dilakukan oleh Guillaume Morand, pemilik perusahaan sepatu olahraga Swiss *Pomp It Up*. Morand memanjangkan cerobong asap diatas perusahaannya yang terletak di dekat Lausanne agar dapat menyerupai menara masjid untuk menunjukkan kekecewaannya terhadap hasil referendum.<sup>196</sup>

Federasi Gereja Katolik Swiss, Federasi Gereja Protestan Swiss dan Dewan Persatuan Pemuka Gereja Swiss yang tergabung dalam *The Swiss Council of Religions* (SCR) juga menyatakan ketidak setujuan mereka. Bahkan pada hari yang sama setelah pelaksanaan pemungutan suara, Federasi Gereja Protestan Swiss mengeluarkan laporan resmi terkait referendum tersebut. Dalam laporan tersebut Federasi Gereja Protestan Swiss menyatakan bahwa referendum anti-menara tersebut merupakan dampak dari xenofobia dan merupakan sebuah isu yang sensitif. Mereka juga menyatakan bahwa mereka menentang referendum tersebut sejak awal inisiatif mulai diajukan. Menurut mereka inisiatif anti-menara berkaitan dengan berbagai isu seperti isu kebebasan beragama, integrasi warga asing, kedamaian beragama dan kondisi minoritas non-muslim di negara-negara Islam. Menurut mereka penggunaan agama sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik akan mengancam kedamaian

---

<sup>194</sup> Jenderal Dufour adalah seorang pahlawan nasional Swiss yang memimpin konvensi Jenewa pertama dan yang mendirikan Palang Merah Internasional / PMI (*International Red Cross*).

<sup>195</sup> Institute of Race Relations. *Op. Cit.* Halaman 4.

<sup>196</sup> *Ibid.*

beragama di Swiss. Oleh karena itu mereka menyatakan bahwa inisiatif anti-menara masjid bukanlah hal yang benar.<sup>197</sup>

Parlemen dan pemerintah Federal Swiss juga menyatakan ketidakpuasan dan kekecewaan mereka terkait hasil referendum tersebut.<sup>198</sup> Parlemen menegaskan bahwa jika tujuan dari inisiatif ini adalah untuk menghentikan pengaruh pertumbuhan Islam di Swiss dan juga untuk mencegah dari kelompok fundamentalis ekstrimis, maka hal tersebut tidak akan tercapai melalui larangan pembangunan menara. Parlemen menyatakan bahwa peraturan di tingkat federal dan kewilayahan sudah menyediakan langkah-langkah efektif untuk mencegah berbagai hal negatif dan melindungi fondasi konstitusi Swiss.<sup>199</sup> Dengan adanya inisiatif tersebut yang terjadi bukan memerangi fundamentalisme, melainkan sebaliknya justru memperkuat ketakutan dan sentimen xenophobia terkait Islam di Swiss dan menodai ketentraman beragama di Swiss.<sup>200</sup>

Kekhawatiran yang sama juga disampaikan oleh Antonio Hodgers, warga Swiss asal Argentina, yang telah menjadi anggota parlemen sejak tahun 2007. Hodgers merupakan pemimpin *Green Party* di Swiss yang telah terjun ke ranah politik sejak muda dan sangat fokus terhadap isu-isu terkait integrasi. Orientasi politiknya selain fokus terhadap integrasi juga fokus untuk menyuarakan hak-hak politik warga negara asing. Orientasi politiknya tersebut selalu membuat dia terlibat konflik dengan SVP mengenai berbagai isu imigrasi dan keanekaragaman, seperti

---

<sup>197</sup> Federasi Gereja Protestan Swiss. 2009. *Background Paper on Switzerland's Vote on Minarets, November 2009; Report of The Federation of Swiss Protestant Churches FSPC*. Swiss. Halaman 1-2. Diakses dari [http://www.kirchenbund.ch/sites/default/files/media/pdf/themen/minarett/110929\\_Backgroundpaper\\_Minaret-final\\_update.pdf](http://www.kirchenbund.ch/sites/default/files/media/pdf/themen/minarett/110929_Backgroundpaper_Minaret-final_update.pdf) (pada tanggal 18 November 2014).

<sup>198</sup> Kawther Salam. 2009. "Swiss Govt Unhappy With Minaret Referendum". *Europe & Middle East News*. Dikutip dari <http://www.kawther.info/wpr/2009/12/08/swiss-govt-unhappy-with-minaret-referendum> (30 Maret 2015).

<sup>199</sup> Luzius Mader. 2008. "Federal Council Opposes Building Ban on Minarets; Opinion on the Popular Initiative Against the Construction of Minarets". *Konfederasi Swiss*. Diakses melalui <https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=en&msg-id=20878> (pada tanggal 01 Maret 2015).

<sup>200</sup> Parlemen Federal Swiss. *Gegen den Bau von Minaretten. Volksinitiative*. Diakses dari [http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/legislaturueckblick.aspx?rb\\_id=20080061](http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/legislaturueckblick.aspx?rb_id=20080061) (pada tanggal 03 Maret 2015).

yang terjadi pada tahun 2008 ketika SVP mengusulkan mosi untuk mengusir orang asing. Begitu pula yang terjadi ketika ia menghadapi isu terbaru mengenai kenekaragaman terkait inisiatif yang melarang pembangunan menara masjid. Sebagaimana yang Hodgers utarakan dalam surat kabar lokal *Swiss Le Temps Jenewa*, ia menyebut aksi inisiatif tersebut sebagai sebuah tindakan ‘fundementalis’, yang mendasarkan kepercayaannya bahwa peradaban yang berbeda dijadikan sebagai landasan terjadinya perang. Bagi Hodgers, inisiatif tersebut hanya menjadikan menara sebagai umpan, yang mana masalah utamanya adalah Islam.<sup>201</sup>

Hodger menganggap isu ini sebagai masalah yang dibuat-buat. Menurutnya komite pengusung inisiatif tersebut telah memilih target yang salah karena radikalisme tidak lagi berpusat di masjid. Ia juga menyatakan kekhawatirannya akan munculnya kelompok ekstrimis akibat inisiatif ini. Menurutnya bahaya inisiatif adalah kekhawatiran bahwa umat Islam akan menarik diri dari masyarakat Swiss. Menurutnya solusi terbaik ialah dengan mendorong integrasi, bukan melalui stigmatisasi seperti inisiatif anti-menara tersebut.<sup>202</sup>

Parlemen juga menyatakan bahwa larangan mengenai pembangunan menara masjid dalam Konstitusi Federal merupakan hukum yang sama sekali tidak proporsional dan hanya akan menimbulkan gangguan di tengah masyarakat. Bahkan lebih lanjut akan membahayakan perdamaian agama di Swiss karena penduduk muslim akan merasakan hal tersebut sebagai tindakan diskriminatif,<sup>203</sup> serta mempengaruhi integrasi penduduk muslim yang selama ini telah menghormati tatanan hukum dan sosial Swiss.<sup>204</sup>

---

<sup>201</sup> Stephane Lathion. 2011. “Antonio Hodgers: Fundamentalist Criticism of Islam is Also Dangerous” dalam Patrick Haenni dan Stephane Lathion (Ed). *The Swiss Minaret Ban: Islam in Question*. Swiss: Religioscope Institute. Halaman 54.

<sup>202</sup> *Ibid.* Halaman 55.

<sup>203</sup> Parlemen Federal Swiss. “Gegen den Bau von Minaretten”. *Volksinitiative. Loc. Cit.*

<sup>204</sup> Parlemen Federal Swiss. 2008. “Contre la construction de minarets. Initiative Populaire”. Diakses dari [http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4807/290457/d\\_n\\_4807\\_290457\\_290626.htm?DisplayTextOid=290627](http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4807/290457/d_n_4807_290457_290626.htm?DisplayTextOid=290627) (pada tanggal 03 Maret 2015).

Perasaan kecewa juga disampaikan oleh Menteri Ekonomi Swiss, Doris Leuthard, dalam konferensi pers setelah referendum *“The government is disappointed that it was not possible to convince voters to reject the initiative.”*<sup>205</sup> Menteri Peradilan Swiss, Eveline Widmer-Schlumpf, menyatakan lebih lanjut bahwa isu ini merupakan sebuah *proxy war*<sup>206</sup> dan merupakan refleksi ketakutan masyarakat terkait ideologi fundamentalis Islam. Sebagaimana ia katakan sebagai berikut:

*“Emotions were running high during the debate. This ruled out any possibility to show that a ban on minarets is a ‘proxy war’, The outcome of the vote is undeniably a reflection of the fears and uncertainties that exist among the population; concerns that Islamic fundamentalist ideas could lead to the establishment of parallel societies.”*<sup>207</sup>

Pemerintah federal juga mengingatkan bahwa inisiatif anti-menara masjid ini akan menghadapi kesalah pahaman dari berbagai pihak internasional dan merugikan reputasi Swiss. Hal ini bisa mempengaruhi citra lembaga dan kepentingan negara Swiss.<sup>208</sup> Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Swiss, Micheline Calmy-Rey, bahwa dia terkejut dan sangat menyesalkan hasil referendum. Dia juga kecewa terkait kenyataan bahwa inisiatif tersebut didukung oleh salah satu partai pemerintah. Dia menambahkan bahwa larangan tersebut akan menjadi ancaman bagi keamanan Swiss, sebagaimana pernyataannya *“Every attack on the coexistence of different cultures also endangers our security.”*<sup>209</sup> Namun lebih lanjut ia menyatakan bahwa ia menghormati hasil referendum dan akan lebih meningkatkan upaya dalam

<sup>205</sup> Swiss Info. 2009. “Government Seeks to Limit Impact of Minaret Ban”. Swiss Info. Dikutip dari <http://www.swissinfo.ch/eng/government-seeks-to-limit-impact-of-minaret-ban/7794180> (15 April 2015).

<sup>206</sup> *Proxy war* atau perang proksi adalah Sebuah perang yang dihasut oleh kekuatan besar dari pihak ketiga sehingga yang berkepentingan tidak perlu terlibat secara langsung. Lihat kamus Oxford online melalui <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/proxy-war> (03 Maret 2015).

<sup>207</sup> Swiss Info. “Government Seeks to Limit Impact of Minaret Ban”. *Loc. Cit.*

<sup>208</sup> Parlemen Federal Swiss. “Gegen den Bau von Minaretten. Volksinitiative”. Diakses dari [http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/legislaturrueckblick.aspx?rb\\_id=20080061](http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/legislaturrueckblick.aspx?rb_id=20080061) (pada tanggal 03 Maret 2015).

<sup>209</sup> A. R. Momin. 2009. “Ban on Minarets in Switzerland”. India: The IOS Minaret Vol. 4, Isu 15, 16-31 Desember 2009. Dikutip dari <http://iosminaret.org/vol-4/issue15/Ban-on-Minarets.php> (20 April 2015).

kebijakan luar negerinya untuk menjelaskan hasil referendum tersebut kepada masyarakat internasional. Sebagaimana yang ia sampaikan "*We will try to make clear that it is not a rejection of dialogue between different religions.*"<sup>210</sup>

Pemerintah menyatakan bahwa larangan anti-menara tersebut bukanlah hal yang benar untuk mencegah kelompok ekstrimis. Namun karena hasil referendum bersifat mengikat, maka pemerintah harus mengikuti peraturan sesuai dengan konstitusi Swiss. Setelah pelaksanaan referendum, pemerintah mengatakan akan menghormati keputusan rakyat dan menyatakan bahwa pembangunan menara baru tidak lagi diizinkan. Pemerintah juga menyatakan bahwa referendum tersebut bukanlah penolakan terhadap komunitas, agama atau budaya Islam dan akan tetap menjaga kebebasan beragama di Swiss.<sup>211</sup>

Meski terdapat banyak kritikan terkait hasil referendum, namun SVP dan EDU bergembira dengan hasil tersebut. SVP sangat senang dengan kenyataan bahwa inisiatif yang mereka ajukan akan diimplementasikan kedalam hukum Swiss. SVP juga mengejek para tokoh gereja yang sebelum referendum telah berusaha untuk mencegah inisiatif. Pemimpin SVP, Tony Brunner, mengatakan bahwa melalui referendum ini para pemilih telah jelas menolak ide masyarakat paralel dan perluasan lebih lanjut dari Islam, termasuk politik Islam radikal di Swiss. Brunner mengatakan orang-orang yang telah menetap di Swiss harus menyadari bahwa mereka tidak bisa muncul untuk bekerja dengan menggunakan jilbab atau mendapatkan dispensasi khusus agar tidak berpartisipasi dalam pelajaran berenang.<sup>212</sup>

Keberhasilan referendum tersebut mendorong mereka untuk mengajukan berbagai inisiatif lainnya. Dalam sebuah wawancara televisi, Christophe Darbellay, pemimpin EDU, mengajak untuk mengajukan sebuah inisiatif terkait larangan Muslim dan Yahudi Swiss untuk memiliki pemakaman terpisah. Darbellay juga

---

<sup>210</sup> Swiss Info. "Government Seeks to Limit Impact of Minaret Ban". *Loc. Cit.*

<sup>211</sup> Website Resmi Federal Swiss. 2009. "'Yes' to Popular Initiative against The Construction of Minarets". Federal Chancellery. Dikutip dari <http://www.bk.admin.ch/aktuell/media/03238/index.html?lang=en&msg-id=30430> (15 April 2015).

<sup>212</sup> Institute of Race Relations. *Loc. Cit.*

menyerukan pelarangan mengenakan burqa. Selanjutnya pada awal Desember 2009, SVP memperkenalkan inisiatif baru, untuk memungkinkan deportasi otomatis setiap orang asing yang ditemukan bersalah atas kejahatan serius, dan bagi mereka yang dideportasi dilarang memasuki Swiss untuk jangka waktu antara lima sampai lima belas tahun. Pada tanggal 12 Desember SVP telah mengumpulkan 210.000 tanda tangan, lebih dari cukup untuk memaksa pemerintah untuk mengadakan referendum. Tapi kemudian dewan federal memilih untuk menunda referendum tersebut.<sup>213</sup>

Inisiatif untuk melarang menara masjid ini telah menjadikan menara masjid sebagai sebuah ideologi politik yang dapat di politisi sedemikian rupa. Inisiatif anti-menara masjid tersebut sebenarnya merupakan sebuah isu yang sangat irasional dikarenakan sebuah menara tidak akan membahayakan seseorang. Akan tetapi ketika hal tersebut dipolitisi sedemikian rupa, isu tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dengan baik guna memenuhi kepentingan politik.

Dengan demikian hal tersebut telah membawa kehidupan sosial dan politik di Swiss kedalam masa yang tidak lagi harmonis bagi segenap elemen bangsanya. Terbukti dari bagaimana kemudian para pendukung inisiatif tersebut berusaha untuk mengajukan berbagai inisiatif baru lainnya terkait dengan berbagai isu sensitif di tengah masyarakat Swiss. Hal tersebut akan mengakibatkan masalah yang berkelanjutan di tengah masyarakat baik dengan keberadaan menara ataupun tanpa menara masjid.

---

<sup>213</sup> *Ibid.* Halaman 5.

## BAB 4. OPINI PUBLIK INTERNASIONAL TERKAIT LARANGAN MENARA MASJID DI SWISS

### 4.1 Renspons Publik Internasional Terhadap Larangan Menara Masjid di Swiss

Pada umumnya Swiss memiliki citra yang sangat baik di kancah internasional. Secara umum Swiss terkenal dengan negara multikultural yang dapat berintegrasi dengan baik, tingkat kriminalitas yang rendah, keamanan perbankan yang tinggi serta memiliki stabilitas politik yang sangat baik. Stabilitas politik Swiss dikarenakan penerapan terhadap komitmennya mengenai sistem semi-demokrasi langsung yang terus dijalankan oleh Swiss sejak awal menjadi negara federal sampai saat ini. Oleh karena itu Swiss terpilih menjadi tempat kantor utama *Inter Parliamentary Union* yang bertujuan untuk menciptakan parlemen seluruh dunia yang lebih baik dan demokrasi yang kuat. Swiss juga dikenal sebagai negara yang netral sejak masa Perang Dunia namun tetap memiliki peranan penting dalam berbagai kerjasama internasional, terbukti dengan dipilihnya Swiss sebagai lokasi berbagai badan internasional.

Swiss juga terlibat aktif dalam mempromosikan perdamaian dunia. Sejak tahun 2004 Swiss mengkampanyekan perdamaian antara berbagai masyarakat dengan perbedaan pendapat, dan berperan dalam menyelesaikan konflik dalam dimensi politik-agama. Di bidang agama, politik dan konflik, Departemen Federal Untuk Luar Negeri (*Federal Department for Foreign Affairs/FDFA*) bekerja sama dengan *Graduate Institute of International and Development Studies* di Jenewa dan berbagai partner lainnya. Melalui berbagai kerjasama tersebut peranan Swiss dalam mempromosikan perdamaian dunia diakui oleh banyak pihak internasional.<sup>214</sup>

Misi perdamaian yang diemban Swiss tersebut membuat Swiss terlibat sangat aktif dalam *United Nations Alliance of Civilizations* (AoC) sejak pertama aliansi ini

---

<sup>214</sup> Johannes Matyassi & Seraina Flury. *Loc. Cit.* Halaman 14.

didirikan. AoC didirikan pada tahun 2005 dalam kerangka Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan misi untuk mengidentifikasi berbagai penyebab polarisasi dan ketegangan antara masyarakat yang berbeda, serta untuk memberikan solusi dan tindakan nyata terhadap berbagai ketegangan tersebut melalui kerjasama dengan berbagai negara dan organisasi internasional. Swiss mengusulkan platform tematik bagi kelompok aliansi AoC, yang mana pendekatan Swiss dalam hal ini ialah untuk mendorong sebuah dialog berorientasi pada pelaksanaan mengenai berbagai proyek konkrit dalam rangka mempromosikan saling pengertian dan membangun basis dialog lebih lanjut dan kerjasama di masa depan. Selain itu Swiss juga terlibat dalam proyek *Nyon Process* dibawah kerangka AoC, yang mana proyek tersebut mempertemukan dan memobilisasi aktor-aktor utama pemuka agama, politik dan aktivisme sosial, termasuk penasihat kebijakan luar negeri dari pemerintah sekuler dan aktivis politik keagamaan dari Eropa, Amerika Serikat dan negara-negara Muslim. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan dan menyelesaikan konflik yang melibatkan perbedaan agama.<sup>215</sup>

Melalui berbagai hubungan, dialog dan prakarsa perdamaian, Swiss mampu menjalin hubungan baik dan memperoleh kepercayaan oleh berbagai sosio-politik aktivis, pemimpin agama, penasihat politik dan anggota pemerintah berbagai negara. Swiss mampu membangun citra baik Swiss dalam hubungan internasional. Namun kemudian terjadinya referendum anti-menara masjid di Swiss menjadi sandungan terhadap citra baik Swiss selama ini. Swiss yang terkenal memporosikan demokrasi, kesetaraan dan perdamaian mulai dipertanyakan kembali kiprahnya setelah terjadinya referendum tersebut.

Pemerintah dan parlemen Swiss sangat menyadari sejak awal diajukannya inisiatif kontroversial tersebut akan menimbulkan permasalahan dan implikasi terkait kepentingan dan citra Swiss di lingkungan internasional. Oleh karena itu pemerintah dan parlemen mengeluarkan rekomendasi untuk menolak inisiatif dengan alasan

---

<sup>215</sup> *Ibid.* Halaman 14-15.

bahwa inisiatif tersebut melanggar hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama (Pasal 9 ECHR) dan larangan diskriminasi (Pasal 14 ECHR), dan juga bertentangan dengan nilai-nilai dasar dari Federal Konstitusi Swiss.<sup>216</sup> Hal itu dikarenakan Konstitusi Swiss telah berkomitmen untuk menjamin kesetaraan dan kebebasan beragama.<sup>217</sup>

Rekomendasi tersebut dikeluarkan karena pemerintahan Swiss menyadari bahwa meskipun larangan pembangunan menara masjid merupakan sebuah isu domestik namun hal tersebut pasti akan mempengaruhi respons masyarakat internasional juga. Bagaimanapun kondisi dalam negeri pasti akan berpengaruh pada pola perilaku Swiss dalam hubungan internasional. Sejak Tahun 2007, sebenarnya pemerintah federal Swiss sudah mulai khawatir akan kemungkinan dampak internasional. Khususnya setelah sebuah berita mengenai inisiatif anti-menara di Swiss telah disiarkan di saluran satelit Al Jazeera. Selama pertemuan UN *Alliance of Civilisations* di Madrid pada tahun 2008, menteri luar negeri Swiss saat itu, Micheline Calmy-Rey, berusaha menjelaskan kepada Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam (OKI) mengenai inisiatif anti-menara masjid dan berusaha meyakinkan OKI bahwa OKI akan tetap memiliki penilaian yang baik terhadap Swiss.<sup>218</sup> Dalam hal ini Calmy-Rey berusaha untuk melakukan diplomasi terhadap negara-negara yang tergabung dalam OKI agar untuk mencegah mereka memandang Swiss secara buruk melalui adanya inisiatif tersebut. Namun hal tersebut ternyata belum mampu membendung opini OKI terkait inisiatif tersebut. Hal tersebut terlihat dari laporan OKI dua bulan kemudian yang membahas mengenai pengembangan "Islamophobia" di Swiss terkait inisiatif anti-menara tersebut.

Sampai saat ini, referendum anti-menara masjid merupakan satu-satunya kasus di mana konstitusi negara Swiss telah diubah untuk membatasi hak-hak agama

---

<sup>216</sup> *Ibid.* Halaman 18.

<sup>217</sup> Lihat Konstitusi Swiss mengenai kesetaraan pada Pasal 2 dan 8, dan mengenai kebebasan beragama pada Pasal 15. Dapat diakses melalui <http://www.admin.ch/ch/e/rs/1/101.en.pdf> (20 November 2014).

<sup>218</sup> Jean Francois Mayer. *Op. Cit.* Halaman 14.

minoritas. Pelarangan pembangunan menara ini hanya ditujukan terhadap Islam. Meskipun Islam merupakan agama pendatang dan minoritas di Swiss, tidaklah lantas dapat dibenarkan bagi Swiss untuk memperlakukannya secara berbeda. Penambahan perundangan tersebut seakan membenarkan penerapan suatu larangan untuk membatasi hak-hak warga negara, serta diperbolehkannya membuat perbedaan dalam masyarakat. Peraturan ini menempatkan warga muslim Swiss pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan anggota kelompok lainnya sehingga menimbulkan kerugian bagi kehidupan kelompok, identitas agama dan budaya muslim di Swiss.<sup>219</sup> Jika diamati lebih lanjut referendum tersebut digunakan sebagai sarana untuk meyakinkan masyarakat agar menekan umat Islam untuk mengurangi eksistensi mereka di ruang publik. Sehingga dapat dipastikan terdapat hubungan antara inisiatif anti-menara tersebut dengan kampanye xenofobia dan kebencian terhadap Islam di Swiss.

Menara sebagai bagian arsitektur masjid yang dilihat sebagai simbol Islam dapat memicu berbagai sentimen lainnya di kalangan internasional. Inisiatif tersebut menggambarkan realitas yang terjadi dalam interaksi masyarakat Swiss, dimana simbol memiliki dampak besar sehingga dapat memicu perdebatan terkait sosial, hukum dan politik. Dibalik rasa takut terhadap menara terdapat hal lain yang harus disadari, yaitu bagaimana ketakutan terhadap hal asing atau yang seringkali dikenal dengan istilah xenofobia semakin dibenarkan atau disahkan melalui referendum tersebut. Hal tersebut kemudian memicu kecemasan secara global. Swiss menerima liputan media secara besar-besaran di seluruh dunia. Berbagai media internasional memberitakan referendum tersebut dengan mengusung tema mengenai penggagas referendum, terorisme, kondisi umat Kristen di negara muslim, imigrasi dan xenofobia. Selain itu Swiss juga mendapat berbagai respons dari berbagai institusi media internasional, organisasi internasional, dan pemerintah negara-negara.

---

<sup>219</sup> Erwin Tanner. *Op. Cit.* Halaman 59.

Reaksi masyarakat internasional terkait referendum anti-menara masjid di Swiss ini sangatlah beragam. Ternyata referendum ini tidak hanya mendapatkan respons dari komunitas muslim dunia ataupun negara-negara dengan mayoritas muslim, berbagai kalangan masyarakat internasional juga turut aktif menanggapi referendum yang dilaksanakan tanggal 29 November 2009 ini. Respons tersebut ada yang bernada mengkritik atau mengecam, namun ada pula yang mendukung dan bersifat netral.

Berdasarkan hasil pengamatan FDFA Swiss, dalam hari pertama setelah dilaksanakannya referendum, yaitu pada tanggal 29 November 2009, terdapat 4000 media baik lokal maupun internasional yang memberitakan inisiatif tersebut.<sup>220</sup> Berbagai reaksi juga dinyatakan oleh berbagai organisasi internasional, dan berbagai negara di berbagai belahan dunia. Dalam upaya mengetahui kecenderungan opini publik internasional maka pada bab ini akan dipaparkan data-data hasil penelitian mengenai opini publik internasional terkait referendum anti-menara masjid di Swiss dilihat dari sumber opini, dimensi opini dan arah opini. Dalam penelitian ini digunakanlah metode analisis isi untuk menganalisis 30 data berdasarkan kategorisasi seperti yang telah dijelaskan pada bab I dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini akan dijelaskan dalam sub-bab dibawah ini.

#### **4.2 Sumber Opini Publik Internasional Mengenai Larangan Menara Masjid di Swiss**

Sumber opini publik internasional sangat diperlukan untuk mendukung penyampaian serta menggali pesan dan informasi yang ingin didapatkan terkait opini mengenai larangan menara masjid di Swiss. Sumber opini adalah berbagai pihak yang menjadi sumber peneliti untuk mendapatkan opini mengenai peristiwa yang terjadi, yang mana dalam hal ini mengenai larangan menara masjid di Swiss. Dari sini akan diperoleh sudut pandang berdasarkan berbagai sumber opini. Kategori analisis

---

<sup>220</sup> Johannes Matyassi & Seraina Flury. *Loc. Cit.* Halaman 27.

berdasarkan sumber opini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai pihak yang memberikan opininya terkait larangan menara masjid di Swiss. Dalam hal ini terdapat empat macam sumber opini yang terdiri dari opini Presiden, Menteri, Pejabat Organisasi dan Institusi Media.

Tabel 7. Sumber Opini Publik Internasional Mengenai Larangan Menara Masjid di Swiss

No.	Sumber Opini	frekuensi	%
1	Presiden	3	10 %
2	Menteri	7	23,4 %
3	Pejabat Organisasi Internasional	15	50 %
4	Institusi Media Internasional	5	16,6 %
Jumlah		30	100 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sumber opini publik internasional mengenai referendum anti-menara masjid di Swiss paling banyak berasal dari pejabat organisasi internasional dengan persentase sebesar 50%. Pejabat Organisasi internasional disini terdiri dari organisasi Amnesty Internasional, *Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)*, *Human Rights Watch*, *United Nations on Human Rights*, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), *COJEP International*, dan *International Religion Liberty Association (IRLA)*. Banyaknya opini yang dikeluarkan oleh organisasi internasional membuat referendum anti-menara masjid di Swiss tersebut semakin memperoleh perhatian dari berbagai pihak internasional, mengingat dalam sebuah organisasi internasional terdapat berbagai pihak di dalamnya, baik negara ataupun non-negara seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan individu lainnya.

Sumber opini yang berasal dari pendapat menteri dari berbagai negara juga cukup besar dengan persentase 23,4 %. Menteri-menteri yang memberikan opininya terhadap referendum anti-menara masjid di Swiss ini berasal dari negara Turki,

Indonesia, Prancis, Iran, Jerman, Swedia dan Amerika Serikat. Dalam hal ini menteri yang menyatakan opininya tidak hanya terbatas pada menteri luar negeri saja, melainkan juga dari berbagai bidang seperti menteri budaya dan pariwisata dan menteri dalam negeri. Selain itu sumber opini yang sangat penting juga berasal dari tiga pemimpin negara lainnya, yaitu Presiden Turki, Presiden Prancis dan Presiden Libya pada saat itu, meskipun dengan jumlah persentase yang sedikit yakni sebesar 10 %.

Sedangkan sumber opini dari institusi media berjumlah 16,6 %. Dalam hal ini terdapat lima media yang menyatakan opini mereka terkait referendum anti-menara masjid di Swiss yang terdiri dari British Broadcasting Corporation (*BBC*), *The Guardian*, *The Jakarta Post*, *The New York Times*, dan *The Wall Street Journal*. Keberadaan opini media internasional disini menjadi penting mengingat bahwa media juga merupakan salah satu elemen dalam hubungan internasional yang dapat mempengaruhi opini masyarakat.

#### **4.3 Isu Opini Publik Internasional Mengenai Larangan Menara Masjid di Swiss**

Setiap opini dari berbagai sumber tentu memiliki konsep opini yang berbeda antara satu sama lain. Isu opini merupakan macam atau aspek opini yang mengacu pada suatu bidang atau masalah tertentu. Unit analisis berdasarkan isu opini dimaksudkan untuk mengetahui aspek opini yang disampaikan oleh berbagai pihak dari publik internasional. Terkait referendum anti-menara masjid di Swiss ini terdapat berbagai isu yang membentuk opini publik internasional. Opini terkait referendum anti-menara masjid di Swiss tersebut seringkali berkaitan dengan kelima isu berikut: hak asasi manusia, Islamofobia, xenofobia, diskriminasi, dan intoleransi.

Tabel 8. Isu Opini Publik Internasional Mengenai Larangan Menara Masjid di Swiss

No.	Isu Opini	frekuensi	%
1	Hak Asasi Manusia ( <i>Human Right</i> )	6	20 %
2	Islamofobia	4	13,3 %
3	Xenofobia	7	23,4 %
4	Diskriminasi	9	30 %
5	Intoleransi	4	13,3 %
Jumlah		30	100 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa opini publik internasional terhadap referendum anti-menara masjid di Swiss paling banyak berkaitan dengan isu diskriminasi yang berjumlah 9 buah opini atau sebesar 30%. Selanjutnya opini terbanyak yang diberikan berkaitan dengan isu xenofobia sebanyak 7 buah atau sebesar 23,4%. Isu mengenai hak asasi manusia juga banyak dibahas dengan proporsi sebesar 20% atau sebanyak 6 buah opini. Sedangkan opini yang mengaitkan larangan tersebut dengan isu Islamofobia dan intoleransi memiliki proporsi yang sama sebanyak 4 buah opini atau sebesar 13.3%.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, perhatian opini publik internasional mengenai referendum anti-menara masjid di Swiss lebih terpusat pada isu mengenai diskriminasi dan upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Diskriminasi seringkali menjadi hal yang disampaikan dalam opini publik internasional terhadap referendum anti-menara masjid di Swiss. Hal itu dikarenakan referendum anti menara masjid di Swiss ini dinilai sebagai sebuah referendum yang membenarkan perlakuan secara tidak sama atau tidak adil terhadap sesama warga negara yang didasarkan pada perbedaan yang dimiliki masing-masing.

Selain itu isu xenofobia dan tidak toleran juga menjadi bahan opini publik internasional terkait referendum tersebut. Ketakutan terhadap keberadaan menara

masjid di Swiss, yang merupakan hal asing bagi budaya dan politik masyarakat asli Swiss, mendasari diajukannya referendum tersebut. Dikarenakan ketidakmampuan masyarakat asli Swiss untuk menerima menara masjid sebagai bagian dari arsitektur rumah ibadah masyarakat muslim, hal tersebut membuat isu mengenai tidak toleran disertakan dalam opini publik internasional.

Opini yang mengandung isu hak asasi manusia juga seringkali dikaitkan dengan referendum anti-menara masjid tersebut. Banyak pihak menyatakan bahwa inisiatif anti-menara masjid telah melanggar hak asasi manusia terkait kebebasan beragama dan menunjukkan identitas. Selain itu isu Islamofobia juga terlibat dikarenakan peraturan yang diajukan dalam referendum tersebut hanya diarahkan kepada anggota masyarakat yang beragama Islam, yang didasarkan pada ketakutan mereka akan meluasnya politik Islam di Swiss dan maraknya islamisasi.

Tabel 9. Isu Opini berdasarkan Sumber Opini Publik Internasional Mengenai Larangan Menara Masjid di Swiss

Isu Opini	Presiden		Menteri		Pejabat OI		Institusi Media	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Hak asasi Manusia	0	0	2	28,6	4	26,7	0	0
Islamofobia	1	33,3333	0	0	1	6,6	2	40
Xenofobia	1	33,3333	2	28,6	1	6,6	3	60
Diskriminasi	1	33,3333	1	14,2	7	46,7	0	0
Intoleransi	0	0	2	28,6	2	13,4	0	0
Jumlah	3	100	7	100	15	100	5	100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa isu mengenai diskriminasi paling banyak dikaitkan dengan larangan menara masjid di Swiss tersebut. Opini mengenai isu diskriminasi paling sering disampaikan dalam opini oleh pejabat organisasi internasional. Sebagaimana tertera dalam tabel diatas bahwa terdapat 7 buah opini atau sebesar 46,7% opini para pejabat organisasi internasional mengenai referendum anti menara masjid berkaitan dengan isu diskriminasi. Selain itu isu yang

sering dikaitkan dengan opini terkait larangan menara masjid di Swiss ialah isu mengenai hak asasi manusia yang seringkali juga disampaikan oleh pejabat organisasi internasional, sebagaimana tertera di tabel terdapat 4 opini dari pejabat organisasi internasional yang membahas larangan menara masjid berkaitan dengan isu hak asasi manusia atau sebesar 26,7%.

Xenofobia juga merupakan isu yang seringkali dikaitkan mengenai larangan tersebut, isu ini seringkali disampaikan dalam opini redaksi media. Sebagaimana tertera dalam tabel diatas bahwa terdapat 3 opini atau sebesar 60% opini terkait isu xenofobia yang disampaikan oleh redaksi media. Selain itu isu mengenai Islamofobia dan intoleransi memiliki proporsi yang sama. isu mengenai Islamofobia paling sering tercantum dalam opini yang disampaikan oleh redaksi media yaitu sebanyak 2 opini atau sebesar 40%. Sedangkan isu mengenai intoleransi paling sering disampaikan oleh menteri dan pejabat organisasi internasional dengan masing-masing sebanyak 2 opini.

#### **4.4 Arah Opini Publik Internasional Mengenai Larangan Menara Masjid di Swiss**

Sebagaimana dijelaskan pada tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kecenderungan opini publik internasional terhadap referendum anti-menara masjid di Swiss berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Kategorisasi berdasarkan arah opini ini dimaksudkan untuk menunjukkan kecenderungan utama atau arah dari berbagai opini publik internasional terhadap referendum tersebut. Arah opini dalam pembahasan ini terbagi menjadi tiga, yaitu *favorable*; jika isi opini bersifat mendukung, menyetujui atau menganjurkan terhadap persoalan mengenai referendum anti-menara masjid di Swiss, *unfavorable*; jika isi opini bersifat menentang, tidak sepakat atau menolak terhadap referendum tersebut, dan netral: jika opini sama sekali tidak terdapat indikasi tentang *favorable* atau *unfavorable*.

Tabel 10. Arah Opini Publik Internasional Mengenai Larangan Menara Masjid di Swiss

No.	Arah Opini	frekuensi	%
1	<i>Favorable</i>	4	13,3 %
2	<i>Unfavorable</i>	24	80 %
3	Netral	2	6,7 %
Jumlah		30	100 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat arah opini publik internasional terkait referendum anti menara masjid di Swiss. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan opini yang mengkritik referendum anti-menara masjid di Swiss tersebut mendominasi sebanyak persentase sebesar 80%. Sebaliknya opini yang mendukung referendum tersebut hanya memperoleh persentase sebesar 13,3%. Sedangkan opini yang bersifat netral terhadap referendum tersebut hanya sekitar 6,7%.

Penjelasan lebih lanjut akan diperjelas dalam tabel berikut yang menunjukkan arah opini berkaitan dengan unsur opini publik internasional, sebagaimana yang ada dalam tabel XI berikut:

Tabel 11. Arah Opini berdasarkan Isu Opini Publik Internasional Mengenai Larangan Menara Masjid di Swiss

Arah Opini	HAM		Islamofobia		Xenofobia		Diskriminasi		Intoleransi	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
<i>Favorable</i>	0	0	1	25	3	42,8	0	0	0	0
<i>Unvaforable</i>	5	83,4	2	50	4	57,2	9	100	4	100
Netral	1	16.6	1	25	0	0	0	0	0	0
Jumlah	6	100	4	10	7	100	9	100	4	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa opini yang mengkritik hasil dari larangan menara masjid di Swiss tersebut paling banyak mengaitkan referendum dengan isu diskriminasi dengan jumlah opini sebanyak 9 buah atau sebesar 100%. Sedangkan opini yang mendukung menyatakan bahwa referendum tersebut merupakan sebuah bentuk ketakutan terhadap hal asing dan merupakan hal yang benar untuk melakukan referendum. Opini terkait isu xenofobia yang mendukung referendum tersebut berjumlah 3 buah dengan persentase sebesar 42,8%. Sedangkan opini yang netral terhadap hasil referendum tersebut memiliki porsi berimbang untuk mengemukakan opininya terhadap hasil referendum yang berkaitan dengan isu hak asasi manusia dan xenofobia.

Selanjutnya akan disertakan tabel yang menunjukkan arah opini publik internasional mengenai referendum anti menara masjid di Swiss berdasarkan sumber opininya, sebagaimana yang ada dalam tabel XII berikut:

Tabel 12. Arah Opini Publik Internasional Mengenai Larangan Menara Masjid di Swiss berdasarkan Sumber Opini

Arah Opini	Presiden		Menteri		Pejabat OI		Institusi Media	
	f	%	f	%	f	%	f	%
<i>Favorable</i>	1	33,3	1	14,3	0	0	2	40
<i>Unfavorable</i>	2	66,7	5	71,4	15	100	2	40
Netral	0	0	1	14,3	0	0	1	20
Jumlah	3	100	7	100	15	100	5	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa arah opini paling banyak merupakan *unfavorable* terhadap referendum anti-menara masjid di Swiss tersebut. Bahkan seluruh opini yang berasal dari pejabat organisasi internasional yang berjumlah 15 buah atau sebesar 100% semuanya berupa kritik dan kecaman terhadap referendum anti-menara masjid di Swiss tersebut. Sedangkan mengenai opini yang mendukung paling banyak berasal dari opini institusi media yang berjumlah 2 buah

atau sebesar 40%, yang kemudian diikuti dengan opini dari presiden dan menteri. Sedangkan opini netral disampaikan dalam opini oleh institusi media dan menteri dalam porsi yang sama.

#### **4.5 Analisis Keseluruhan Opini Publik Internasional Mengenai Larangan Menara Masjid di Swiss**

Ketika hasil referendum dinyatakan valid dan aturan terkait larangan menara masjid telah siap untuk dilaksanakan, masyarakat internasional tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka mengenai aturan tersebut. Opini publik internasional mengenai referendum anti-menara masjid di Swiss sangatlah banyak dan beragam. Dalam upaya mengetahui kecenderungan opini publik internasional mengenai larangan menara masjid di Swiss tersebut, maka dalam penelitian ini telah dipilih 30 data opini untuk dianalisa lebih lanjut. Berdasarkan hasil analisis mengenai berbagai opini tersebut diketahui bahwa 80% opini publik internasional mengkritik atau tidak menyetujui referendum anti-menara masjid di Swiss. Sedangkan opini yang mendukung referendum tersebut hanya sebesar 13,3%, dan opini yang netral atau tidak menyatakan kritikan atau dukungan terhadap referendum tersebut hanya sebesar 6,7%.

##### **4.5.1 Opini Organisasi Internasional Mengenai Larangan Menara Masjid di Swiss**

Opini yang menentang ataupun mengkritisi referendum tersebut ternyata sangat banyak dan berasal dari berbagai pihak di lingkungan internasional. Opini *unfavorable* paling banyak berasal dari pejabat organisasi internasional yang disampaikan melalui *public statement* resmi, pemberitaan pada website resmi masing-masing organisasi, laporan resmi serta pernyataan yang disampaikan kepada media internasional. Sebagaimana pernyataan Amnesty Internasional yang sangat menyesalkan adanya pelaksanaan referendum anti menara masjid. Bahkan Amnesty Internasional telah mengeluarkan *public statement* sebelum pelaksanaan referendum

untuk menyatakan ketidak setujuan mereka mengenai referendum tersebut. Menurut Amnesty Internasional, referendum tersebut merupakan pelanggaran terhadap larangan diskriminasi berdasarkan hak asasi manusia internasional yang mana Swiss terlibat dalam perjanjian tersebut. Amnesty internasional menyayangkan Swiss sebagai sebuah negara yang terkenal dengan toleransi beragama dan memberi perlindungan terhadap pengungsi, kini harus memiliki sebuah peraturan yang mendiskriminasi. Sebagaimana disampaikan oleh David Diaz Jogeix, Wakil Direktur Program Amnesti Internasional di kawasan Asia dan Eropa, sebagai berikut;

*"The yes vote comes as a surprise and a great disappointment. That Switzerland, a country with a long tradition of religious tolerance and the provision of refuge to the persecuted, should have accepted such a grotesquely discriminatory proposal is shocking indeed. The general prohibition of the construction of minarets violates the right of Muslims in Switzerland to manifest their religion. It can do lasting damage to their integration."<sup>221</sup>*

Respons lebih lengkap disampaikan oleh Nicola Duckworth, Direktur Program Amnesti Internasional di kawasan Asia dan Eropa, yang menyatakan bahwa referendum tersebut adalah pelanggaran terhadap hak masyarakat muslim Swiss untuk menunjukkan agama mereka, oleh karena itu harus ditolak demi mewujudkan kesetaraan bagi semua warga Swiss. Sebagaimana pernyataannya :

*"Contrary to the claims of the initiators of the referendum, a general prohibition of the construction of minarets would violate the right of Muslims in Switzerland to manifest their religion, ... While there may be legitimate reasons for measures which might in individual cases interfere with the construction of minarets, there is no legitimate public policy justification for a general prohibition on their construction. A change in the constitution which would provide for the blanket ban on the construction of minarets must be soundly rejected. Such a move is*

---

<sup>221</sup> Amnesty Internasional. 2009. "Switzerland Votes Against Religious Freedom". Dikutip dari <http://www.amnesty.org.uk/press-releases/switzerland-votes-against-religious-freedom> (20 November 2014).

*important as it will reinforce the equality of rights for all people living in Switzerland.*"<sup>222</sup>

Respons tidak setuju juga disampaikan oleh COJEP Internasional, sebuah organisasi internasional di bidang hak asasi manusia dan demokrasi di bawah naungan *United Nation Economic and Social Council*. Pada pertemuan mengenai kebebasan beragama dan kepercayaan di Vienna pada 2009, COJEP menyatakan bahwa larangan anti-menara merupakan sebuah kondisi yang menghawatirkan dari sebuah peraturan yang membatasi secara sewenang-wenang dan merupakan hal yang diskriminatif. Dalam hal ini COJEP Internasional mendesak Ketua OSCE untuk melakukan sesuatu dalam menangani tindakan intoleransi dan diskriminasi tersebut.<sup>223</sup>

OSCE telah menyatakan keberatannya terhadap larangan menara masjid tersebut sejak awal inisiatif tersebut diajukan. Amur Orhun, perwakilan dari ketua OSCE di Bidang Memerangi Intoleransi dan Diskriminasi terhadap Muslim, juga sangat menyayangkan adanya inisiatif semacam itu di negara yang mempromosikan hak asasi manusia seperti Swiss. *"I am astonished that such developments are taking place in a country like Switzerland, which has been an advocate of protection of human rights elsewhere in the world."*<sup>224</sup> Setelah pelaksanaan referendum pada tanggal 29 November 2009, Direktur Lembaga Demokrasi dan Hak Asasi Manusia OSCE, Janez Lenarcic, memberikan tanggapannya dengan menyatakan bahwa referendum anti-menara masjid tersebut melanggar prinsip non-diskriminasi berdasarkan agama. *"A blanket prohibition of minarets is not consistent with OSCE*

---

<sup>222</sup> Amnesty Internasional. 2009. "Switzerland minaret ban would breach freedom of religion obligations". Dikutip dari <http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/switzerland-minaret-ban-would-breach-freedom-religion-obligations-20091125> (20 November 2014).

<sup>223</sup> COJEP Internasional. 2009. *Recommendations for Supplementary Human Dimension Meeting: Freedom of Religion or Belief*. Halaman 1. Diakses dari <http://www.osce.org/odihr/38039?download=true> (pada tanggal 20 November 2014).

<sup>224</sup> OSCE. 2007. "OSCE Representative Calls Swiss Initiative to ban Minarets Unfortunate". Dikutip dari <http://www.osce.org/cio/48698> (21 November 2014).

*commitments on freedom of religion or belief and the principle of non-discrimination based on religion.*”<sup>225</sup>

Kritikan juga datang dari *Human Right Watch*. Menurut Judith Sunderland, pengamat senior di *Human Right Watch*, referendum tersebut telah menjadikan Islam sebagai pendatang yang berbahaya, yang mana isu tersebut sering diusung selama kampanye referendum sehingga akhirnya membentuk stigma terhadap Islam dan akan mendorong terhadap diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>226</sup> Lebih lanjut *Human Right Watch* menyatakan bahwa larangan terhadap menara masjid merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan menunjukkan sentimen anti-Muslim. Berdasarkan opini *Human Right Watch* larangan tersebut mengabaikan hak muslim Swiss untuk menunjukkan agama mereka di depan umum yang mana hal tersebut merupakan bagian dari hak kebebasan beragama yang dijamin dalam perjanjian-perjanjian internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *European Convention on Human Rights* yang mana Swiss telah meratifikasi kedua perjanjian tersebut. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa negara diijinkan untuk membatasi hak praktek atau menunjukkan keyakinan agamanya jika pembatasan tersebut dimaksudkan untuk melindungi keamanan publik, menjaga peraturan publik, melindungi kesehatan, melindungi moral atau jika melanggar hak dasar beragama umat lainnya. Pembeneran tersebut tidak satupun terdapat dalam kasus pelarangan anti-menara masjid di Swiss. Dengan tidak adanya dasar pembeneran dan hanya mengarah terhadap satu agama tertentu, yaitu Islam, maka larangan tersebut benar-benar merupakan bentuk dari diskriminasi.<sup>227</sup>

---

<sup>225</sup> OSCE. 2009. “Head of OSCE Human Rights Office Expresses Concern About Outcome of Swiss Minaret Ban Referendum”. Dikutip dari <http://www.osce.org/odihr/51680> (21 November 2014).

<sup>226</sup> Judith Sunderland. 2009. “The Minaret Vote, Europe’s Call to Show Bias”. Human Right Watch. Dikutip dari <http://www.hrw.org/news/2009/12/02/minaret-vote-europes-call-show-bias> (20 November 2014).

<sup>227</sup> Human Right Watch. 2009. “Switzerland: Minaret Ban Violates Rights”. Dikutip dari <http://www.hrw.org/news/2009/12/04/switzerland-minaret-ban-violates-rights> (21 November 2014).

Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menyatakan penyesalannya terhadap adanya larangan anti-menara masjid di Swiss tersebut dan mengatakan bahwa larangan tersebut merupakan sebuah diskriminasi terhadap muslim di Swiss. Asma Jahangir, seorang pakar senior dan pelapor khusus PBB mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan, menyatakan *“Indeed, a ban on minarets amounts to an undue restriction of the freedom to manifest one’s religion and constitutes a clear discrimination against members of the Muslim community in Switzerland.”*<sup>228</sup> Ketua Hak Asasi Manusia PBB, Navi Pillay, juga menyatakan larangan tersebut sebagai sebuah langkah yang diskriminatif dan bertentangan dengan perjanjian hak asasi manusia internasional. Navi Pillay menyatakan sebagai berikut;

*“Some of the politicians who proposed this motion argued that it wasn’t targeting Islam or Muslims, Others claimed that banning minarets would improve integration. These are extraordinary claims when the symbol of one religion is targeted. That such a ban is discriminatory, deeply divisive and a thoroughly unfortunate step for Switzerland to take, and risks putting the country on a collision course with its international human rights obligations.”*<sup>229</sup>

Selain itu direktur eksekutif Hak Asasi Manusia PBB, Hillel C. Neuer, menyatakan bahwa larangan tersebut merupakan sebuah tindakan yang menunjukkan tidak adanya toleransi masyarakat Swiss. Menurutnya larangan anti menara masjid oleh konstitusi merupakan sebuah tindakan bodoh yang akan mengurangi ekspresi keagamaan oleh individu dan merupakan sebuah diskriminasi.<sup>230</sup> Bahkan lebih lanjut PBB menunjukkan kekecewaan dan kekhawatirannya mengenai larangan menara tersebut dalam UNHCR Report tahun 2010 dengan menyatakan bahwa larangan tersebut menunjukkan ketakutan di kalangan masyarakat terhadap suatu agama. PBB menyayangkan penggunaan kampanye politik yang mengandalkan ketakutan di masyarakat yang diatur sedemikian rupa untuk mencapai keuntungan politik.

---

<sup>228</sup> Asma Jahangir. 2009. “Swiss Minaret Ban Discriminate Against Muslims, Says UN Expert”. PBB. Dikutip dari <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33089#.VIVWkSxsJYU> (21 November 2014).

<sup>229</sup> PBB. 2009. “UN Rights Chief Says Swiss Ban on Minarets ‘Clearly Discriminatory’”. Dikutip dari <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33104#.VIVWmixsJYU> (21 November 2015).

<sup>230</sup> Hillel C. Neuer. 2009. “A Swiss Ban on Minarets”. The New York Times. Dikutip dari <http://www.nytimes.com/2009/12/19/opinion/19minaret.html> (21 November 2014).

Kampanye politik tersebut memperkuat stereotip negatif tentang kelompok atau individu muslim di Swiss yang pada akhirnya mendorong sikap intoleransi dan kesalah pahaman di kalangan masyarakat.<sup>231</sup>

Organisasi Kerjasama Islam (OKI), sebagai sebuah organisasi yang terdiri dari berbagai negara-negara Islam, juga mengutuk adanya larangan terhadap menara masjid tersebut. Sebagai respons OKI mengirimkan surat tertulis kepada pemerintah Swiss yang mendesak pemerintah Swiss untuk membatalkan hasil referendum tersebut. Atas permintaan dari Wakil Swiss untuk PBB-Jenewa, OKI mengadakan pertemuan khusus pada tanggal 10 Desember 2009 untuk mendengar penjelasan pemerintah Swiss mengenai hasil referendum tersebut. Setelah diadakannya pertemuan, seluruh negara anggota OKI sepakat mengutuk hasil referendum tersebut sebagai tindakan Islamofobia. OKI menyatakan kekecewaan mereka dan meminta kesediaan Pemerintah Swiss untuk membatalkan implementasi aturan tersebut dengan alasan bahwa partai haluan kanan yang mengusung inisiatif tersebut, SVP dan EDU, selama masa kampanye menggunakan cara yang tidak sesuai hukum dengan menggunakan beberapa ancaman menakutkan untuk meyakinkan penduduk Swiss agar mendukung inisiatif tersebut. Akan tetapi tanggapan pemerintah hanya menyatakan bahwa mereka juga turut kecewa dan menyatakan bahwa hasil referendum tersebut juga merupakan kekalahan bagi pemerintah Swiss.<sup>232</sup>

Kemudian pada tanggal 31 Januari 2010 perwakilan negara anggota OKI berkumpul di Arab Saudi untuk membahas mengenai larangan anti-menara masjid di Swiss tersebut. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa larangan anti-menara masjid di Swiss merupakan sebuah dasar dimana Islamofobia mulai diresmikan secara kelembagaan negara. OKI juga menyatakan bahwa menara

---

<sup>231</sup> Bidang Hak Asasi Manusia PBB. 2010. *Report of the Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism, Racial Discrimination, Xenophobia, and Related Intolerance, Githu Muigai, on the Manifestations of Defamation of Religions, and in Particular on the Ongoing Serious Implications of Islamophobia, for the Enjoyment of All Rights by Their Follower*. Halaman 13. Diakses dari [http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.HRC.15.53\\_en.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.HRC.15.53_en.pdf) (pada tanggal 20 November 2014).

<sup>232</sup> OKI. *Op. Cit.* Halaman 57-58.

merupakan bagian dari identitas Muslim serta merupakan penghormatan terhadap budaya, arsitektur, dan warisan peradaban Islam, sehingga membatasinya merupakan pelanggaran untuk menunjukkan agama dan warisan Islam kepada publik.<sup>233</sup> Menurut OKI larangan tersebut melanggar hak-hak dasar kaum muslim di Swiss dan akan memberi efek domino yang akan menimbulkan dampak yang merugikan.<sup>234</sup> Hal tersebut terbukti benar dengan kemudian pada tanggal 27 Maret 2010 dilaksanakan sebuah konferensi Anti-Menara masjid yang dilaksanakan oleh seluruh anggota partai haluan kanan di wilayah Eropa.<sup>235</sup> Bahkan lebih lanjut pada tahun 2010 terdapat kampanye untuk mengumpulkan satu juta tanda tangan guna menyerukan larangan menara masjid di Jerman<sup>236</sup> yang kemudian lebih lanjut memicu berbagai tindakan agresif terhadap masjid seperti yang terjadi di Swedia, Prancis dan Polandia. Oleh karena itu OKI kemudian menyatakan bahwa infrastruktur hukum internasional yang ada telah gagal untuk menangani masalah ini, sehingga berbagai bentuk Islamofobia semakin berkembang.<sup>237</sup>

Kritikan tidak hanya datang dari pihak muslim, ungkapan senada juga diungkapkan oleh *International Religious Liberty Association* (IRLA), sebuah organisasi yang didirikan oleh para pemimpin gereja pada tahun 1983 yang mengkampanyekan kebebasan beragama bagi semua manusia. John Graz, sekretaris umum IRLA, menyatakan bahwa larangan anti-menara masjid tersebut merupakan sebuah tindakan yang menunjukkan intoleransi masyarakat Swiss melalui pelaksanaan sistem demokrasi langsung. Menurutnya larangan menara masjid menunjukkan betapa masih banyak hal yang harus dilakukan untuk mencapai

---

<sup>233</sup> *Ibid.* Halaman 65.

<sup>234</sup> *Ibid.* Halaman 7.

<sup>235</sup> *Ibid.* Halaman 39.

<sup>236</sup> *Ibid.* Halaman 12.

<sup>237</sup> *Ibid.* Halaman 23.

kebebasan beragama, bahkan oleh Swiss sebagai sebuah negara yang terkenal bebas dan multikultural.<sup>238</sup>

#### **4.5.2 Opini Institusi Media Internasional Mengenai Larangan Menara Masjid di Swiss**

Selain organisasi internasional, berbagai media internasional tidak hanya melaporkan pemberitaan mengenai larangan anti-menara masjid di Swiss namun juga menyampaikan opininya terkait larangan tersebut. Semakin besarnya peranan media di era global seperti saat ini membuat opini media juga menjadi penting, mengingat kemampuan media untuk mempengaruhi opini publik. Opini media sendiri tidaklah sama. Setiap media menyampaikan opininya masing-masing, ada yang mengkritisi, ada yang mendukung dan ada pula yang bersifat netral.

*The Wall Street Journal* menunjukkan ketidak setujuannya dengan menggunakan kata-kata yang keras terkait larangan tersebut. Dalam editorialnya dikatakan bahwa hasil referendum anti-menara masjid tidak mengancam kebebasan beribadah siapapun, akan tetapi sebuah pesan simbolik telah disampaikan melalui referendum tersebut. Pesan tersebut menunjukkan ketakutan yang dirasakan masyarakat terhadap tindakan radikal dan teroris Islam. Akan tetapi jika diperhatikan larangan menara tersebut justru tidak menjawab ketakutan yang diungkapkan, yang terjadi justru membuat Swiss melawan eksistensi sebuah simbol Islam yang berada di langit negara mereka. Hal ini memang merupakan kebenaran politik dan hal yang pengecut. Referendum tersebut bukan mengatasi ketakutan justru semakin menambah ketakutan dalam masyarakat. Larangan menara-masjid tidak akan bisa mengasimilasi muslim di Swiss. Larangan ini dapat dikatakan sebagai sebuah isu yang terlalu berlebihan ataupun terlalu kecil. Terlalu berlebihan karena larangan tersebut menunjukkan tanda intoleransi di kawasan Eropa, dan isu yang terlalu kecil karena

---

<sup>238</sup> John Graz. 2009. *International Religious Liberty Association (IRLA) Answers the Swiss Ban on Minarets*. Halaman 1 – 2. Diakses dari [http://www.inforel.ch/fileadmin/user\\_upload/dateien/3958.IRLA\\_Minarets.Tx.5284.pdf](http://www.inforel.ch/fileadmin/user_upload/dateien/3958.IRLA_Minarets.Tx.5284.pdf) (pada tanggal 18 November 2014).

tidak menyentuh kepada ketakutan mendasar dari keberadaan menara yaitu ketakutan akan ekstrimis ataupun terorisme.<sup>239</sup>

*The New York Times* juga menyatakan ketidak setujuannya terhadap larangan menara masjid tersebut dengan menyatakan dalam editorialnya bahwa referendum tersebut merupakan suatu hal yang kejam dan memalukan. Referendum tersebut memberikan tanda bahwa meningkatnya jumlah minoritas muslim juga ditandai dengan meningkatnya ketakutan dan kebencian terhadap imigran muslim dan Islam. Akan tetapi aturan tentang larangan menara masjid tidak dapat menyelesaikan masalah terkait ketakutan terhadap Islam, justru yang terjadi adalah mengasingkan muslim dan menimbulkan kemarahan mereka. Jika yang menjadi alasan adalah takutnya akan ekstremisme Islam, tidak ada bukti dari ekstremisme Islam di Swiss. Hal tersebut menunjukkan bagaimana masyarakat Swiss dapat dengan mudah menerima propaganda mengenai xenofobia terhadap menara masjid yang dilakukan oleh partai kanan Swiss. Pengabaian terhadap hal tersebut membuat xenofobia menyebar semakin cepat.<sup>240</sup>

Sedangkan *British Broadcasting Corporation* (BBC) menyatakan kesetujuannya terhadap larangan menara dan menganjurkannya untuk mewujudkan integrasi. Dalam editorialnya dijelaskan bahwa larangan menara masjid di Swiss didasarkan pada rasa takut masyarakat terhadap hal asing. Masyarakat muslim di Swiss semakin bertambah dan semakin percaya diri untuk menunjukkan identitas mereka. Hal tersebut membuat masyarakat asli Swiss takut akan hilangnya identitas asli Swiss. Selain itu juga adanya rasa takut terhadap munculnya ekstrimis dan teroris. Oleh karena itu kemudian editorial BBC menyarankan komunitas muslim

---

<sup>239</sup>The Wall Street Journal. 2009. "Switzerland and the Minaret". Dikutip dari <http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703939404574565674154159110> (20 November 2014).

<sup>240</sup>The New York Times. 2009. "A Vote for Intolerance". Dikutip dari [http://www.nytimes.com/2009/12/01/opinion/01Tue3.html?\\_r=0.nnya](http://www.nytimes.com/2009/12/01/opinion/01Tue3.html?_r=0.nnya) (20 November 2014).

untuk secara sadar mengintegrasikan diri mereka ke dalam kondisi negara yang mereka datangi.<sup>241</sup>

*The Guardian* juga menyatakan dukungannya terhadap larangan anti menara masjid tersebut. Dalam editorialnya dijelaskan bahwa larangan tersebut merupakan sebuah sikap Islamofobia yang dilakukan untuk menekan peran agama dalam negara sekuler modern, mengingat Swiss merupakan negara sekuler. Hak asasi manusia internasional memang menjamin hak individu untuk mempraktekkan agama mereka, akan tetapi tidak bisa diabaikan bahwa agama dapat memecah belah dan akan berusaha untuk menjalankan kekuasaannya. Oleh karena itu sangatlah masuk akal untuk meminimiliasir simbol agama di publik dan perlu untuk mendengarkan argumen dari pihak sekuler.<sup>242</sup>

Namun berbeda dengan yang lain, opini yang diberikan *The Jakarta Post* tidak mengandung unsur mengkritik ataupun mendukung. Meskipun dikatakan bahwa referendum tersebut merupakan sebuah refleksi dari berkembangnya sentimen anti Islam, namun *The Jakarta Post* berusaha memberikan opini netral dengan tidak mendukung ataupun mengkritik. Dalam editorialnya disampaikan bahwa Swiss hanya melarang menara masjid tetapi masih mengizinkan untuk memiliki masjid, oleh karena itu dibandingkan mengkritik toleransi Swiss dan menyesali hasil dari referendum di Swiss yang melarang pembangunan menara masjid baru akan lebih baik untuk memperbaiki sikap toleransi di negara masing-masing.<sup>243</sup>

---

<sup>241</sup>Gavin Hewitt. 2009. "The Fear of Minarets". BBC. Dikutip dari [http://www.bbc.co.uk/blogs/legacy/thereporters/gavinhewitt/2009/11/the\\_fear\\_of\\_minarets.html](http://www.bbc.co.uk/blogs/legacy/thereporters/gavinhewitt/2009/11/the_fear_of_minarets.html) (20 November 2014).

<sup>242</sup>Joan Smith. 2009. "Switzerland's Flawed Minaret Vote". The Guardian. Dikutip dari <http://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2009/nov/30/switzerland-minaret-ban-islam> (20 November 2014).

<sup>243</sup>The Jakarta Post. 2009. "Thanking The Swiss Vote". Dikutip dari <http://www.thejakartapost.com/news/2009/12/02/thanking-swiss-vote.html> (20 November 2014).

### 4.5.3 Opini Berbagai Negara Mengenai Larangan Menara Masjid di Swiss

Opini publik yang sangat penting diungkapkan oleh pemerintahan berbagai negara. Pemerintah Turki menyatakan kemarahannya terhadap larangan anti menara masjid di Swiss mengingat lebih dari 100.000 warga Turki tinggal di Swiss. Ekspresi kemarahan disampaikan oleh Presiden Turki 2009, Abdullah Gul, yang menyatakan hal tersebut adalah hal yang memalukan bagi Swiss dan merupakan bukti dari berkembangnya Islamofobia. Sebagaimana pernyataan Gul *"This is a shame for the Swiss. This issue should be monitored seriously. It is a striking way to show how Islamophobia develops in the Western world."*<sup>244</sup> Menteri Budaya dan Pariwisata Turki 2009, Ertugrul Gunay, juga menyampaikan opini ketidaksetujuannya dengan menyatakan bahwa referendum tersebut berkaitan dengan hak asasi manusia tentang kebebasan beragama. Menurutnya setiap bangunan memiliki simbol masing-masing yang harus dihormati, sebagaimana perkataannya *"Every religious structure has its symbol. A minaret or a church tower is an inseparable part of such a structure."* Oleh karena itu dia mengharapkan sikap yang lebih toleran dari Swiss. Bahkan lebih lanjut Gunay mengharapkan respons dan tindakan yang lebih dari negara-negara Muslim terutama di bidang ekonomi untuk menyatakan ketidaksetujuannya dengan larangan menara masjid tersebut.<sup>245</sup> Hal tersebut juga disetujui oleh salah seorang politisi Turki, Egemen Bagis, yang juga menyerukan agar masyarakat muslim menarik uang mereka dari bank Swiss sebagai protes terhadap larangan menara masjid tersebut.<sup>246</sup>

Menteri Luar Negeri Swedia 2009, Carl Bildt, juga mengecam referendum Swiss yang menghasilkan larangan pembangunan menara masjid di di negara Swiss. Menurut Bildt itu merupakan ekspresi dari ketakutan yang berlebihan dan merupakan sebuah sinyal negatif. *"It's an expression of quite a bit of prejudice and maybe even*

---

<sup>244</sup> The News.AZ. 2009. "Turkish President, Foreign Minister Criticize Swiss Minaret Referendum". Dikutip dari <http://news.az/articles/3579> (20 November 2014).

<sup>245</sup> Thomas Seibert. 2009. "Turkey Angry over Swiss ban on Minarets". The National. Dikutip dari <http://www.thenational.ae/news/world/europe/turkey-angry-over-swiss-ban-on-minarets> (20 November 2014).

<sup>246</sup> Ria Novosti. 2009. "Turkey Calls on Muslims to withdraw Money From Swiss". Sputnik News. Dikutip dari <http://sputniknews.com/world/20091202/157066779.html> (21 November 2014).

*fear, but it is clear that it is a negative signal in every way, there's no doubt about it."* Bahkan lebih lanjut Bildt mengatakan ia merasa aneh bahwa terdapat keputusan seperti yang dilaksanakan melalui referendum, *"Normally Sweden and other countries have city planners that decide this kind of issue. To decide this kind of issue in a referendum seems very strange to me."*<sup>247</sup>

Opini yang menunjukkan keterkejutan dan kekecewaan juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Prancis 2009, Bernard Kouchner. Menurutnya larangan tersebut merupakan sebuah tindakan intoleransi, sebagaimana dikatakannya *"I am a bit shocked by this decision. it is an expression of intolerance. I hope the Swiss come back on this decision."*<sup>248</sup> Namun terjadi perbedaan opini antara menteri luar negeri dengan Presiden Prancis saat itu, Nicholas Sarkozy, yang justru mendukung hasil referendum yang menghasilkan larangan menara masjid tersebut. Sarkozy menyampaikan keterkejutannya mengenai banyaknya kritik yang diberikan kepada Swiss dan merasa bersimpati kepada Swiss. Ia mengatakan bahwa larangan tersebut tidak berhubungan dengan kebebasan beragama melainkan lebih kepada upaya masyarakat Swiss untuk menjaga identitas budayanya, sebagaimana opininya yang ia tulis dalam surat kabar *La Monde* sebagai berikut:

*"What happened has nothing to do with the freedom of religious practise, or freedom of conscience. ... The peoples of Europe are welcoming and tolerant: it's in their nature and in their culture. But they don't want their way of life, their mode of thinking and their social relations distorted."*<sup>249</sup>

---

<sup>247</sup> AFP. 2009. "Bildt Blasts 'Prejudice' of Swiss Minaret Ban". The Local Se. Dikutip dari <http://www.thelocal.se/20091130/23562> (20 November 2014).

<sup>248</sup> Nick Cumming. 2009. "Swiss Ban on Minaret Building Meets Widespread Criticism". The New York Times. Dikutip dari <http://www.nytimes.com/2009/12/01/world/europe/01iht-swiss.html> (21 November 2014)

<sup>249</sup> Henry Samuel. 2009. "Nicolas Sarkozy Defends Swiss Minaret Ban". The Telegraph. Dikutip dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/6761632/Nicolas-Sarkozy-defends-Swiss-minaret-ban.html> (20 November 2014).

Opini mendukung dari Sarkozy tidaklah mengherankan karena pada saat itu Prancis juga sedang dalam menghadapi perdebatan yang sama mengenai identitas nasional yang berkaitan dengan pengajuan proposal untuk melarang burka.

Dukungan terhadap Swiss juga datang dari Menteri Luar Negeri Jerman saat itu, Guido Westerwelle, yang menyatakan bahwa tidaklah benar untuk mengatakan Swiss tidak toleran karena adanya larangan ini. Sebagaimana yang disampaikannya *“it’s wrong to come to the conclusion that Switzerland is an intolerant or undemocratic country because of this vote.”*<sup>250</sup>

Berbagai respons tidak hanya berasal dari pemerintahan Eropa, berbagai negara di belahan dunia lainnya juga menyampaikan opininya terhadap larangan menara masjid di Swiss tersebut. Seperti opini yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2009, yang mengeluarkan laporan khusus mengenai larangan anti-menara masjid di Swiss. Namun dalam laporan tersebut opini yang disampaikan bersifat netral, tidak mendukung ataupun mengkritik larangan tersebut. Pemerintah Amerika Serikat hanya menyampaikan bahwa pemerintahan Amerika Serikat akan melakukan dialog bersama pemerintahan Swiss mengenai hal tersebut.<sup>251</sup>

Sementara Menteri Luar Negeri Indonesia 2009, Marty Natalegawa, secara resmi juga menyampaikan opininya yang bersifat mengkritisi dengan menyatakan bahwa larangan tersebut merupakan hal yang diskriminatif dan melanggar hak kebebasan beragama. Ia menyatakan kekecewaannya dan menganggap larangan tersebut sebagai sebuah ketidaktahuan terhadap toleransi beragama, sebagaimana disampaikannya *“We are deeply disappointed by the Swiss decision, which is contradictory to its image as an inclusive and tolerant nation. We cannot afford to appreciate a policy that is based on ignorance.”*<sup>252</sup>

---

<sup>250</sup> AFP. 2009. “Westerwelle Defends Swiss After Minaret Ban”. The Local De. Dikutip dari <http://www.thelocal.de/20091205/23745> (20 November 2014).

<sup>251</sup> State of America Department of State. 2010. *Switzerland*. Halaman 7. Diakses dari <http://www.state.gov/documents/organization/171724.pdf> (pada tanggal 18 Desember 2014).

<sup>252</sup> Ary Hermawan. 2009. “Swiss Minaret Ban Reflects ‘Ignorance’: Indonesia”. The JakartaPost. Dikutip dari <http://www.thejakartapost.com/news/2009/12/01/swiss-minaret-ban-reflects-%E2%80%98ignorance%E2%80%99-indonesia.html> (20 November 2014).

Iran juga menyatakan ketidaksetujuannya dengan memperingatkan Swiss mengenai "konsekuensi" atas referendum pelarangan pembangunan menara masjid baru dan mendesak Swiss untuk tidak mengimplementasikan larangan tersebut. Menteri Luar Negeri Iran saat itu, Manouchehr Mottaki, menyatakan bahwa referendum anti-menara tersebut bertentangan dengan wibawa Swiss yang mengklaim negaranya sebagai pembela demokrasi dan hak asasi manusia namun pada kenyataannya justru merusak citra Swiss sendiri sebagai pelopor hak asasi manusia di mata publik Muslim khususnya. Selanjutnya Mottaki menyatakan dengan tegas bahwa *"Values such as tolerance, dialogue and respecting others' religions should never be put to referendum."*<sup>253</sup>

Bahkan respons yang keras juga disampaikan oleh President Libya 2009, Moammar Gaddafi, yang menyatakan kecamannya terhadap larangan menara masjid di Swiss tersebut dengan mengajak muslim seluruh dunia untuk melakukan jihad melawan Swiss. Sebagaimana yang Gaddafi dalam pidatonya yang ditayangkan di televisi lokal Libya sebagai berikut:

*"It is against unbelieving and apostate Switzerland that jihad (holy war) ought to be proclaimed by all means. Any Muslim around the world who has dealings with Switzerland is an infidel (and is) against Islam, against Mohammed, against God, against the Quran."*<sup>254</sup>

Bahkan lebih lanjut Libya menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk melakukan embargo ekonomi total terhadap Swiss sebagai respons terhadap larangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan mengenai analisa opini publik internasional terhadap larangan menara masjid di Swiss tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas opini publik tidak menyetujui larangan tersebut dan memberikan kritik keras kepada Swiss. Besarnya resistensi publik internasional terhadap larangan tersebut dapat dipahami, karena selama ini Swiss merupakan sebuah negara yang sangat menghormati

---

<sup>253</sup>AFP. 2009. "Iran Warns Switzerland Over Minaret Ban". YnetNews. Dikutip dari <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3815375,00.html> (20 November 2014).

<sup>254</sup>TRIPOLI. 2009. "Libya Imposes Economic Embargo on Switzerland". Alarabiya. Dikutip dari <http://www.alarabiya.net/articles/2010/03/03/102109.html> (20 November 2014).

keberagaman. Swiss juga dikenal dengan komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi terkait hak asasi manusia, toleransi dan keadilan bagi setiap manusia. Oleh karena itu ketika hukum berupa larangan menara masjid sebagai hasil dari referendum yang diadakan pada tanggal 29 November 2009 tersebut dinyatakan berlaku secara sah, publik internasional merasa terkejut dan sebagian besar merespons negatif peraturan tersebut.

Penambahan larangan untuk membangun menara masjid bagi muslim Swiss ke dalam hukum Swiss pada dasarnya merupakan sebuah aturan yang sangat tidak biasa di dalam hukum federal Swiss. Aturan ini tidaklah normal dan juga sangat spesifik dalam konteks standar umum konstitusional Swiss. Aturan ini hanya mempengaruhi sebagian kecil dari populasi di Swiss dan juga hanya fokus kepada bangunan jenis tertentu yang pada dasarnya merupakan kerangka arsitektur umum. Hukum baru ini menghasilkan ketentuan yang sangat baru dalam urusan agama pada Konstitusi Federal Swiss dan juga bertentangan dengan Pasal 72 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala urusan terkait agama merupakan tanggung jawab kanton.<sup>255</sup>

Pada pasal 72 ayat 1 menegaskan pengalokasian aturan terkait hubungan kelembagaan antara konfederasi dan kanton mengenai relasi negara dan agama. Ayat 2 menjelaskan bahwa negara hukum berhak untuk mengatur hubungan antar umat beragama agar dapat saling hidup berdampingan. Berdasarkan perspektif sistematika hukum, dengan adanya penambahan mengenai larangan pembangunan menara masjid dalam Pasal 72 ayat 3, maka dibentuknya Pasal 72 yang mengatur antara negara dan agama mulai kehilangan tujuannya.<sup>256</sup>

Dan jika dipahami secara rinci, para pendukung larangan tersebut pada dasarnya mengalami kesulitan dalam membuat dasar pemikiran mereka dalam memberikan pengertian yang tepat mengenai menara. Mereka menyatakan menara bukanlah simbol religious melainkan simbol politik Islam, namun mereka juga

---

<sup>255</sup> Erwin Tanner. *Loc. Cit.*

<sup>256</sup> *Ibid.* Halaman 59.

menyatakan bahwa menara juga berfungsi untuk menyebarkan agama Islam dan hukum syariah.<sup>257</sup> Hal tersebut tentu saja membingungkan. Pendukung larangan menara masjid tersebut tidak menjelaskan secara jelas mengenai bagaimana eksistensi menara, baik sebagai simbol religious atau tidak, dapat mengancam perdamaian publik dan keamanan masyarakat Swiss. Sehingga pada dasarnya sejak awal pengajuan inisiatif dapat dilihat bahwa larangan tersebut jelas memiliki kekurangan. Namun yang jelas dalam kasus ini adalah bagaimana partai kanan Swiss, dalam hal ini SVP dan UDC memanfaatkan sistem politik yang telah diterapkan Swiss selama ini demi mencapai kepentingan mereka.

Oleh karena itu aturan mengenai larangan menara masjid di Swiss adalah sebuah aturan yang tidak tepat dan tidak masuk akal. Hal tersebut dikarenakan larangan ini menunjukkan sebuah sikap intoleransi karena hanya diarahkan kepada masyarakat muslim di Swiss. Aturan tersebut menimbulkan kekecewaan dan memojokkan populasi Muslim di Swiss. Maka tidak mengherankan jika kemudian opini publik internasional menyatakan bahwa tindakan dari larangan tersebut merupakan sebuah tindakan diskriminasi karena memang hanya mengarah pada suatu kelompok tertentu yang mana dalam hal ini adalah muslim Swiss. Larangan tersebut juga justru mengekspresikan radikalisme di Swiss. Swiss seharusnya mampu untuk menangani ketegangan dan konflik dalam masyarakat serta mempertimbangkan ancaman ataupun gangguan dari peraturan tersebut. Seharusnya masalah mengenai menara di tengah masyarakat yang pluralistik dan demokratis harus dilakukan dengan benar dan lebih moderat dengan dicapainya kesepakatan bersama, seperti harus memenuhi syarat bentuk ataupun ukuran tertentu yang ditetapkan.

Berbagai opini publik mengaitkan larangan tersebut dengan hak asasi manusia terkait kebebasan beragama, meskipun secara esensial peraturan baru tersebut tidaklah mempengaruhi kebebasan beragama di Swiss. Hal tersebut dikarenakan tanpa pembangunan menara, umat muslim di Swiss masih memiliki kebebasan untuk

---

<sup>257</sup> Lorenz Langer. *Op. Cit.* Halaman 879.

beragama serta memiliki tempat ibadah meskipun tanpa menara. Namun yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah bagaimana melalui penerapan peraturan ini justru mempengaruhi kehidupan sosial politik di Swiss. Meskipun menara bukanlah bagian konstituen dari spesifikasi utama kaum Muslim, tetapi menara merupakan sarana untuk menunjukkan kemajuan Islam dalam sebuah masyarakat yang berkaitan dengan identitas agama budaya mereka.

Maka dapat dipahami jika inisiatif tersebut telah membuat resah kaum muslim di Swiss karena mampu menimbulkan distorsi mengenai Islam di tengah masyarakat Swiss. Larangan tersebut juga memperlambat proses integrasi masyarakat muslim di Swiss. Mengingat dulu sebelum adanya larangan ini masyarakat Swiss dapat berinteraksi dengan masyarakat Swiss dengan baik, namun sejak pelaksanaan referendum tersebut sampai saat ini masyarakat Swiss masih merasakan tekanan dalam masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan di publikasikannya sebuah video yang berjudul '*Five Years after the Minaret Ban: The Muslims of Switzerland rise up against Islamophobia*' pada tanggal 26 November 2014 mengenai kelompok muslim Swiss yang masih terluka perasaannya dan berusaha untuk mengatasi ketidakadilan dalam masyarakat setelah lima tahun referendum tersebut dilaksanakan.<sup>258</sup>

Oleh karena itu perlu kiranya sebuah perbaikan terhadap konstitusi Swiss terkait agama pada pasal 72. Seharusnya Swiss sebagai sebuah negara dengan sistem demokrasi langsung yang telah berlangsung lama dan memiliki sistem politik yang stabil dapat mengatasi gesekan dalam masyarakat dengan baik. Bagaimanapun masalah tersebut telah menodai wibawa Swiss di lingkungan internasional. Oleh karena itu seharusnya Swiss mampu untuk menerima keberagaman dengan baik untuk mewujudkan kestabilan dalam masyarakat, sebagaimana komitmennya selama ini terhadap prinsip demokrasi.

---

<sup>258</sup> Video mengenai upaya muslim menghadapi larangan menara masjid 5 tahun setelah referendum dapat dilihat melalui <https://www.youtube.com/watch?v=46DVrVGP9nw>.

## BAB 5. KESIMPULAN

Swiss sebagai negara yang selama ini dikenal menjunjung tinggi komitmennya terhadap prinsip demokrasi dan multikulturalisme harus menghadapi polemik mengenai larangan membangun menara masjid. Berdasarkan penelitian yang menggunakan metode triangulasi ini (*library research* kualitatif dan *content analysis* kuantitatif) dapat dikatakan bahwa larangan pembangunan menara baru masjid di Swiss tersebut merupakan bentuk dari xenofobia yang secara lebih serius mengarah kepada Islamofobia. Hal itu dikarenakan larangan tersebut merupakan wujud dari ketakutan sebagian masyarakat Swiss yang berlebihan terhadap Islam. Bentuk dari gejala Islamofobia tersebut membuat Swiss memiliki sebuah peraturan baru yang berisi larangan pembangunan menara masjid. Padahal larangan tersebut justru memperoleh penolakan keras baik dari sebagian masyarakat Swiss sendiri maupun dari opini publik internasional karena praktik larangan itu dinilai sebagai sebuah larangan yang diskriminatif dan melanggar prinsip demokrasi.

Membahas opini publik internasional mengenai larangan menara di Swiss di tengah maraknya fenomena anti-Islam dunia menjadi sebuah hal yang penting di tengah spirit setiap bangsa dan negara, dalam konteks hubungan internasional, dalam menjaga tegaknya prinsip-prinsip demokrasi. Spirit untuk saling menghormati keberagaman dan multikulturalisme serta mengedepankan persamaan kedudukan dalam kerangka egalitarian jelas merupakan bagian dari prinsip demokrasi yang seharusnya dipatuhi dalam praktik hubungan internasional. Namun faktanya, setelah serangan pada 11 September 2001 terhadap menara kembar WTC di Amerika Serikat, fenomena Islamofobia cenderung kian marak terjadi di berbagai penjuru dunia. Sebut saja seperti stereotip radikal bagi muslim Swedia yang mempraktikkan agamanya, penyerangan masjid di Prancis dan Inggris, diterbitkannya karikatur Nabi Muhammad SAW di surat kabar *Jylland Posten* di Denmark dan munculnya kontroversi larangan niqab dan burqa di Prancis dan Belgia, dan sebagainya. Banyaknya fenomena

Islamofobia ini seringkali membuat negara-negara Barat dan berbagai pihak internasional dinilai telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan mengabaikan prinsip demokrasi. Namun ketika Swiss, sebagai sebuah negara yang sering kali menjadi *role model* negara demokratis, menentang pembangunan menara masjid ternyata resonansi penolakan dari publik internasional sangatlah besar.

Melalui penelitian ini terdapat fakta atau bukti bahwa di tengah gencarnya fenomena Islamofobia global, publik internasional justru mengecam larangan menara masjid di Swiss. Publik internasional menilai bahwa politisasi anti-menara masjid yang cenderung mengandung unsur Islamofobia secara esensial berpotensi menyurutkan demokrasi. Hal tersebut dikarenakan larangan tersebut dinilai melanggar prinsip demokrasi khususnya dalam prinsip penghormatan terhadap perbedaan dan keragaman. Dalam kasus Swiss ditemukan bahwa instrumen demokrasi langsung, berupa inisiatif populer dan referendum, yang pada dasarnya berfungsi untuk menjaga martabat setiap individu dan mewujudkan kesetaraan dalam masyarakat mulai kehilangan esensi dari tujuan mulianya. Dalam penelitian ini setidaknya memberikan sinyal adanya potensi pemanfaatan instrumen referendum yang digunakan untuk melegitimasi kehendak sebagian masyarakat Swiss yang menolak dibangunnya menara baru masjid.

Oleh karena itu, banyaknya kecaman dari publik internasional mengenai kasus di Swiss tersebut menunjukkan bahwa di satu pihak, prinsip demokrasi masih dipegang teguh oleh publik internasional, di lain pihak Swiss sebagai negara yang dinilai demokratis ini justru potensial menggerus prinsip demokrasi. Larangan diskriminatif terhadap muslim di sebuah negara dengan sejarah demokrasi yang panjang seperti Swiss ini jelas tidak dapat diterima. Maka, berdasarkan penelitian ini terdapat fakta bahwa citra Swiss di kalangan opini publik internasional yang semula baik kemudian dinilai menurun akibat larangan anti-menara masjid di Swiss tersebut. Jadi berdasarkan analisa kasus larangan menara masjid di Swiss, bisa diajukan sebuah proposisi bahwa ditengah meluasnya Islamofobia di dunia setelah peristiwa 2001, ternyata publik internasional cenderung masih kuat mempertahankan prinsip

demokrasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan luasnya kecaman terhadap Islamofobia di Swiss yang dianggap melanggar prinsip-prinsip demokrasi.

Pada akhirnya, penelitian ini secara proposisional menyimpulkan bahwa negara yang menganut sistem demokrasi seharusnya menjunjung tinggi komitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi seperti persamaan kedudukan secara egaliter, menghormati keragaman dan multikulturalisme. Ketika terjadi satu atau beberapa masalah yang sensitif terhadap prinsip demokrasi, misalnya xenofobia atau bahkan Islamofobia, seharusnya suatu negara yang demokratis tetap berkomitmen menyelesaikan masalah tersebut dalam koridor yang seharusnya demi tegaknya prinsip demokrasi sesuai dengan mekanisme dan instrumen demokrasi yang dianut negara tersebut. Proses berlangsungnya komitmen tersebut tentu tidak boleh diselenggarakan dengan nuansa politisasi apalagi secara sewenang-wenang dan otoriter. Praktik pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi baik satu atau lebih oleh suatu negara jelas akan merusak harmonisasi hubungan internasional. Ketika sebuah negara penganut sistem demokrasi melanggar komitmen dan prinsip demokrasi tersebut, maka publik internasional tentu akan bersuara lantang menentang setiap adanya praktik pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Demikianlah, sekurang-kurangnya penelitian ini telah berupaya untuk membaca dan membahas adanya praktik larangan menara di Swiss ini, yang penulis yakini telah mencederai spirit dan prinsip demokrasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

- Alsa, Asmadi. 2004. *Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bernays, Edward L. 1923. *Crystallizing Public Opinion*. New York: Liveright Publishing Corporation.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi*. Jakarta: Prenada Media.
- Federal Chancellery. 2014. *The Swiss Confederation a Brief Guide 2014*. Bern: Federal Palace West Wing.
- Federal Chancellery. 2010. *The Swiss Confederation a Brief Guide 2010*. Bern: Federal Palace West Wing.
- Federal Chancellery. 2014. *The Swiss Confederation a Brief Guide 2014*. Bern: Federal Palace West Wing.
- Federal Department of Home Affairs (FDHA). 2014. *Statistical Data on Switzerland 2014*. Swiss: Federal Statistic Office (FSO).
- Fossedal, Grogery A. 2002. *Direct Democracy in Switzerland*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Ginneken, Jaap Van. 2003. *Collective Behavior and Public Opinion*. London: Lawrence Erlbaum Associates Publisher.
- Haenni, Patrick & Lathion, Stephane (Ed). 2011. *The Swiss Minaret Ban: Islam in Question*. Swiss: Religioscope Institute.
- Inter-parliamentary Union. 1998. *Democracy: Its Principles and Achievement*. Jenewa: The Inter-Parliamentary Union.

- Klinghoffer, Arthur Jay & Judith Apter. 2002. *International Citizens' Tribunals: Mobilizing Public Opinion to Advance Human Rights*. New York: Palgrave Macmillan Press.
- Linder, Wolf & Iff, Andrea. 2011. *Swiss Political System*. Swiss: Federal Department of Foreign Affairs (FDFA).
- Matyassy, Johannes & Flury, Seraina. 2011. *Challenges for Switzerland's Public Diplomacy: Referendum on Banning Minarets*. Los Angeles: Figueroa Press.
- Mendelson, Matthew & Parkin, Andrew (Ed). 2000. *Referendum Democracy: Citizens, Elites and Deliberation in Referendum Campaigns*. New York: Palgrave Macmillan.
- Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sarwono, Jonathan. 2011. *Mix Methods: Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Riset Kualitatif Secara Benar*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Scheinin, Martin & Toivanen, Reetta (Ed). 2004. *Rethinking Non-Discrimination and Minority Rights*. Berlin: Institute for Human Rights.
- Taras, Ray. 2009. *Europe Old and New: Transnationalism, Belonging, Xenophobia*. Amerika Serikat: Rowman & Littlefield Publisher.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Vreese, Claes H. de. 2007. *The Dynamics of Referendum Campaigns*. New York: Palgrave Macmillan.
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori – Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Halaman 92.

**Thesis :**

- Barbali, Silvana Claudia. 2009. *Coping with Xenophobia: Senegalese Migrants in Port Elizabeth*. Afrika Selatan: Rhodes University.

**Jurnal dan Working Paper :**

- Christmann, Anna. 2009. "Do Voters Care About Rights? Protection of Rights and the Rule of Law in a (semi-) Direct Democracy". *Working paper for presentation at the ECPR General Conference. Center for International and Comparative Studies Institute for Political Science*. Swiss: University of Zurich.
- Faliq, Abdullah. 2010. "Editorial; Islamophobia and Anti-Muslim Hatred: Causes & Remedies". *Arches Quarterly*. Vol. 4. Winter Edition 7. London: The Cordoba Foundation.
- Helbling, Marc. 2008. "Islamophobia in Switzerland: A New Phenomenon or a New Name for Xenophobia?". *Working paper for Annual Conference of the Midwest Political Science Association (MPSA)*. Swiss: Department of Political Science University of Zurich.
- Josi, Claudia. 2014. "Direct Democracy: What if There is A Conflict Between The Will of The People and Fundamental Rights? – A Comparative Analysis Between Switzerland and California". *Working paper for IX World Congress Constitutional Challenges: Global and Local Workshop 16 Direct Democracy*. Oslo: Universitas Santa Clara.
- Langer, Lorenz. 2010. "Panacea or Pathetic Fallacy? The Swiss Ban on Minarets". *Vanderbilt Journal of Transnational Law*. Volume 43. Oktober No. 4. Tennessee: Vanderbilt University.
- Mayer, Kurt. "Cultural Pluralisme and Linguistic Equilibrium in Switzerland". *American Sociological Review*. Vol. 16. No. 2. Rhode Island: Brown University.
- Moeckli, Daniel. 2011. "Of Minarets and Foreign Criminals: Swiss Direct Democracy and Human Rights". *Human Rights Law Review*. Vol. 11 No. 4. Inggris: Oxford University Press.
- Nuad, Ismatillah N. 2010. "Bukan Sentimen Atau Diskriminasi". *Reformata*. Edisi 122 Tahun VII.
- OKI. 2010. "Third OIC Observatory Report on Islamophobia". *Report presented to The 37<sup>th</sup> Council of Foreign Ministers*. Tajikistan: Organisasi Kerjasama Islam.
- Sinaga, Martin. 2010. "Dipicu Sentimen Politik". *Reformata*. Edisi 122 Tahun VII.

**Artikel :**

Antonish, Marco & Jones, Phil I. 2010. *Mapping the Swiss Referendum on the Minaret Ban*. Inggris: Loughborough University.

Baumann, Martin. 2009. *Anxieties, Banning Minarets and Populist Politics in Switzerland – a Preliminary Analysis*. Swiss: University of Lucerne.

Erdogan, Emre. 1997. *An Exploration of the “Politicization Concept of Putnam: Determinants of Attitudes of Citizens About Foreign Policies*. Turki: Bogazici University.

International Helsinki Federation for Human Rights. 2005. *Intolerance and Discrimination against Muslims in the EU, Developments since September 11*. Wickenburg: IHF.

Institute of Race Relations. 2010. *The Swiss Referendum on Minarets: Background and Aftermath*. London: European Race Audit.

Yakushko, Oksana. 2009. *Xenophobia: Understanding the Roots and Consequences of Negative Attitudes toward Immigrants*. Lincoln: University of Nebraska.

**Internet:**

Ammann, Daniel. 2011. “The Real Reasons Why the Swiss Voted to Ban Minarets”. The World Post. Dikutip dari <http://www.huffingtonpost.com/daniel-ammann/the-real-reasons-why-the-b-373947.html> (18 Oktober 2014).

AFP. 2009. “Bildt Blasts ‘Prejudice’ of Swiss Minaret Ban”. The Local Se. Dikutip dari <http://www.thelocal.se/20091130/23562> (20 November 2014).

AFP. 2009. “Westerwelle Defends Swiss After Minaret Ban”. The Local De. Dikutip dari <http://www.thelocal.de/20091205/23745> (20 November 2014).

AFP. 2009. “Iran Warns Switzerland Over Minaret Ban”. YnetNews. Dikutip dari <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3815375,00.html> (20 November 2014).

Amnesti Internasional. 2009. “Switzerland Votes Against Religious Freedom”. Dikutip dari <http://www.amnesty.org.uk/press-releases/switzerland-votes-against-religious-freedom> (20 November 2014).

- Amnesti Internasional. 2009. "Switzerland minaret ban would breach freedom of religion obligations". Dikutip dari <http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/switzerland-minaret-ban-would-breach-freedom-religion-obligations-20091125> (20 November 2014).
- AlSulaiti, Fatema. 2013. "Minaret". Ancient History Encyclopedia. Dikutip dari <http://www.ancient.eu/Minaret/> (25 Februari 2015).
- Altug, Kerim. 2010. "Origins and Evolution of Minarets". World Bulletin. Dikutip dari <http://www.worldbulletin.net/art-culture/56881/origins-and-evolution-of-minarets> (25 Februari 2015).
- BAPENNAS. 2013. "Demokrasi Langsung ala Swiss". Dikutip dari <http://bappenas.go.id/blog/demokrasi-langsung-ala-swiss/> (20 Januari 2015).
- BBC. 2005. "Muslims in Europe: Country Guide". BBC. Dikutip dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4385768.stm> (18 Februari 2015).
- BBC. 2009. "Zurich allows Anti-Minaret Poster". BBC. Dikutip dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8297826.stm> (31 Maret 2015).
- BBC. 2009. "Swiss Voters Back Ban on Minarets". BBC. Dikutip dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8385069.stm> (31 Maret 2015).
- BBC. 2009. "Swiss Muslim Open Mosque Doors". BBC. Dikutip dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8348279.stm> (31 Maret 2015).
- Bidang Hak Asasi Manusia PBB. 2010. "Report of the Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism, Racial Discrimination, Xenophobia, and Related Intolerance, Githu Muigai, on the Manifestations of Defamation of Religions, and in Particular on the Ongoing Serious Implications of Islamophobia, for the Enjoyment of All Rights by Their Follower". Diakses dari [http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.HRC.15.53\\_en.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.HRC.15.53_en.pdf) (20 November 2014).
- Christine. 2008. "Country Profiles Switzerland". Euro-Islam Info. Diakses dari [http://www.muslimpopulation.com/pdf/Switzerland\\_countryprofiles.pdf](http://www.muslimpopulation.com/pdf/Switzerland_countryprofiles.pdf) (18 Februari 2015).
- COJEP Internasional. 2009. "Recommendations for Supplementary Human Dimension Meeting: Freedom of Religion or Belief". Diakses dari <http://www.osce.org/odihr/38039?download=true> (20 November 2014).

- Cumming, Nick. 2009. "Swiss Ban on Minaret Building Meets Widespread Criticism". The New York Times. Dikutip dari <http://www.nytimes.com/2009/12/01/world/europe/01iht-swiss.html> (21 November 2014).
- Esposito, John L. (Ed). 2003. "The Oxford Dictionary of Islam". Oxford University Press. Dikutip dari <http://www.oxfordislamicstudies.com/print/opr/t125/e188> (02 Maret 2015).
- Fathurroji. 2014. "Menara Simbol Peradaban Islam". Majalah Gontor. Dikutip dari <http://majalahgontor.net/menara-simbol-peradaban-islam/> (25 Februari 2015).
- Federasi Gereja Protestan Swiss. 2009. "Background Paper on Switzerland's Vote on Minarets, November 2009; Report of The Federation of Swiss Protestant Churches FSPC". Swiss. Diakses dari [http://www.kirchenbund.ch/sites/default/files/media/pdf/themen/minarett/110929\\_Backgroundpaper\\_Minaret-final\\_update.pdf](http://www.kirchenbund.ch/sites/default/files/media/pdf/themen/minarett/110929_Backgroundpaper_Minaret-final_update.pdf) (18 November 2014).
- Fischer, Nicole. 2009. "Comments: Swiss Vote to Ban New Minarets, Nov 29, Online". The Jakarta Post. Diakses dari <http://www.thejakartapost.com/news/2009/12/08/comments-swiss-vote-ban-new-minarets-nov-29-online.html> (08 Maret 2015).
- Fisher, Alan. 2009. "Swiss Brace for Minaret Backlash". Aljazeera. Dikutip dari <http://www.aljazeera.com/focus/2009/11/200911304239627876.html> (28 Maret 2015).
- Fooulkes, Imogen. 2009. "Switzerland to Vote on Plan to Ban Minarets". BBC. Dikutip dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8381274.stm> (31 Maret 2015).
- Graz, John. 2009. "International Religious Liberty Association (IRLA) Answers the Swiss Ban on Minarets". Diakses dari [http://www.inforel.ch/fileadmin/user\\_upload/dateien/3958.IRLA\\_Minarets.Tx.5284.pdf](http://www.inforel.ch/fileadmin/user_upload/dateien/3958.IRLA_Minarets.Tx.5284.pdf) (18 November 2014).
- Hermawan, Ary. 2009. "Swiss Minaret Ban Reflects 'Ignorance': Indonesia". The JakartaPost. Dikutip dari <http://www.thejakartapost.com/news/2009/12/01/swiss-minaret-ban-reflects-%E2%80%98ignorance%E2%80%99-indonesia.html> (20 November 2014).
- Hewitt, Gavin. 2009. "The Fear of Minarets". BBC. Dikutip dari [http://www.bbc.co.uk/blogs/legacy/thereporters/gavinhewitt/2009/11/the\\_fear\\_of\\_minarets.html](http://www.bbc.co.uk/blogs/legacy/thereporters/gavinhewitt/2009/11/the_fear_of_minarets.html) (20 November 2014).

- Higgins, Alexander G. 2009. "Swiss vote on anti-Islam move to ban new minarets". The Jakarta Post. Dikutip dari <http://m.thejakartapost.com/news/2009/11/29/swiss-vote-antiislam-move-ban-new-minarets.html> (08 Maret 2015).
- Human Right Watch. 2009. "Switzerland: Minaret Ban Violates Rights". Dikutip dari <http://www.hrw.org/news/2009/12/04/switzerland-minaret-ban-violates-rights> (21 November 2014).
- Jahangir, Asma. 2009. "Swiss Minaret Ban Discriminate Against Muslims, Says UN Expert". PBB. Dikutip dari <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33089#.VIVWkSxsJYU> (21 November 2014).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia online. (Tanpa Tahun). "Referendum". Dikutip dari <http://kbbi.web.id/referendum> (01 Desember 2014).
- Kamus Cambridge online. (Tanpa Tahun). "Referendum". Dikutip dari <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/referendum> (01 Desember 2014).
- Kamus Merriam-Webster online. (Tanpa Tahun). "Politicize". Dikutip dari <http://www.merriam-webster.com/dictionary/politicize> (29 November 2014).
- Kamus Oxford online. (Tanpa Tahun). "Politicize". Dikutip dari <http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/politicize> (29 November 2014).
- Kamus Oxford online. (Tanpa Tahun). "Referendum". Dikutip dari <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/referendum> (01 Desember 2014).
- Kamus Oxford online. (Tanpa Tahun). "Proxy War". Dikutip dari <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/proxy-war> (03 Maret 2015).
- Kanselir Federal Swiss. 2009. "Bundesbeschluss über die Volksinitiative (Gegen den Bau von Minaretten)". diakses dari <http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2009/4381.pdf> (01 Maret 2015).
- Kanselir Federal Swiss. 2009. "Volksinitiative vom 08.07.2008 'Gegen den Bau von Minaretten'". diakses dari <http://www.admin.ch/ch/d/pore/va/20091129/det547.html> (01 Maret 2015).

- Kanselir Federal Swiss. 2009. “‘Yes’ to Popular Initiative against The Construction of Minarets”. Federal Chancellery. Dikutip dari <http://www.bk.admin.ch/aktuell/media/03238/index.html?lang=en&msg-id=30430> (15 April 2015).
- Mader, Luzius. 2008. “Federal Council Opposes Building Ban on Minarets; Opinion on the Popular Initiative Against the Construction of Minarets”. Konfederasi Swiss. Diakses melalui <https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=en&msg-id=20878> (01 Maret 2015).
- Mayfield, James. 2013. “Explaining the Rapid Rise of the Xenophobic Right in Contemporary Europe”. GeoCurrents. Dikutip dari <http://www.geocurrents.info/cultural-geography/the-rapid-rise-of-the-xenophobic-right-in-contemporary-europe> (29 November 2014).
- Momin, A. R. 2009. “Ban on Minarets in Switzerland”. India: The IOS Minaret Vol. 4, Isu 15, 16-31 Desember 2009. Dikutip dari <http://iosminaret.org/vol-4/issue15/Ban-on-Minarets.php> (20 April 2015).
- Neuer, Hillel C. 2009. “A Swiss Ban on Minarets”. The New York Times. Dikutip dari <http://www.nytimes.com/2009/12/19/opinion/119minaret.html> (21 November 2014).
- Novosti, Ria. 2009. “Turkey Calls on Muslims to withdraw Money From Swiss”. Sputnik News. Dikutip dari <http://sputniknews.com/world/20091202/157066779.html> (21 November 2014).
- OSCE. 2007. “OSCE Representative Calls Swiss Initiative to ban Minarets Unfortunate”. Dikutip dari <http://www.osce.org/cio/48698> (21 November 2014).
- OSCE. 2009. “Head of OSCE Human Rights Office Expresses Concern About Outcome of Swiss Minaret Ban Referendum”. Dikutip dari <http://www.osce.org/odihr/51680> (21 November 2014).
- Parlemen Federal Swiss. 2008. “Gegen den Bau von Minaretten”. Volksinitiative. Diakses dari [http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/legislaturrueckblick.aspx?rb\\_id=20080061](http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/legislaturrueckblick.aspx?rb_id=20080061) (03 Maret 2015).
- Parlemen Swiss. 2009. “Contre la construction de minarets, Initiative populaire”. Dikutip dari [http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4807/290457/d\\_n\\_4807\\_290457\\_290626.htm?DisplayTextOid=290627](http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4807/290457/d_n_4807_290457_290626.htm?DisplayTextOid=290627) (05 Maret 2015).
- Parlemen Federal Swiss. 2008. “Contre la construction de minarets. Initiative Populaire”. Diakses dari [http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4807/290457/d\\_n\\_4807\\_290457\\_290626.htm?DisplayTextOid=290627](http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4807/290457/d_n_4807_290457_290626.htm?DisplayTextOid=290627) (03 Maret 2015).

- PBB. 2009. "UN Rights Chief Says Swiss Ban on Minarets 'Clearly Discriminatory'". Dikutip dari <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33104#.VIVWmixsJYU> (21 November 2015).
- PBB. (Tanpa Tahun). "Democracy and the United Nations". Dikutip dari [http://www.un.org/en/globalissues/democracy/democracy\\_and\\_un.shtml](http://www.un.org/en/globalissues/democracy/democracy_and_un.shtml) (19 Desember 2014).
- PBB. (Tanpa Tahun). "Democracy and the United Nations". Dikutip dari <http://www.un.org/en/events/democracyday/pdf/presskit.pdf> (05 Juni 2014).
- PewResearch Center. 2011. "Table: Muslim Population by Country". Dikutip dari <http://www.pewforum.org/2011/01/27/table-muslim-population-by-country/> (03 Juni 2015).
- Religion facts. (Tanpa Tahun). "What is Minaret". Religion Facts. Dikutip dari <http://www.religionfacts.com/islam/things/minaret.htm> (25 Februari 2015).
- Republika. 2009. "Menara: Simbol Peradaban Islam". Republika Online. Dikutip dari <http://www.republika.co.id/berita/shortlink/34664> (25 Februari 2015).
- Salam, Kawther. 2009. "Swiss Govt Unhappy With Minaret Referendum". Europe & Middle East News. Dikutip dari <http://www.kawther.info/wpr/2009/12/08/swiss-govt-unhappy-with-minaret-referendum> (30 Maret 2015).
- Samuel, Henry. 2009. "Nicolas Sarkozy Defends Swiss Minaret Ban". The Telegraph. Dikutip dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/6761632/Nicolas-Sarkozy-defends-Swiss-minaret-ban.html> (20 November 2014).
- Schindall, Julie. 2009. "Switzerland's Non-EU Immigrants: Their Integration and Swiss Attitudes, Migration Information Source". Dikutip dari <http://www.migrationpolicy.org/article/switzerlands-non-eu-immigrants-their-integration-and-swiss-attitudes> (01 Desember 2014).
- Seibert, Thomas. 2009. "Turkey Angry over Swiss ban on Minarets". The National. Dikutip dari <http://www.thenational.ae/news/world/europe/turkey-angry-over-swiss-ban-on-minarets> (20 November 2014).
- Smith, Joan. 2009. "Switzerland's Flawed Minaret Vote". The Guardian. Dikutip dari <http://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2009/nov/30/switzerland-minaret-ban-islam> (20 November 2014).

- Sunderland, Judith. 2009. "The Minaret Vote, Europe's Call to Show Bias". Human Right Watch. Dikutip dari <http://www.hrw.org/news/2009/12/02/minaret-vote-europes-call-show-bias> (20 November 2014).
- Swiss Info. 2009. "Minaret Result Seen as "Turning Point"". SWI. Dikutip dari <http://www.swissinfo.ch/eng/minaret-result-seen-as--turning-point-/7793740> (20 November 2014).
- Swiss Info. 2009. "Government Seeks to Limit Impact of Minaret Ban". Swiss Info. Dikutip dari <http://www.swissinfo.ch/eng/government-seeks-to-limit-impact-of-minaret-ban/7794180> (15 April 2015).
- Tagliabue, John. 2010. "Baking Swiss Treats Amid Acid Debate". The New York Times. Dikutip dari <http://www.nytimes.com/2010/01/27/world/europe/27swiss.html?pagewanted=all> (08 Maret 2015).
- The Jakarta Post. 2009. "Thanking The Swiss Vote". Dikutip dari <http://www.thejakartapost.com/news/2009/12/02/thanking-swiss-vote.html> (20 November 2014).
- The News.AZ. 2009. "Turkish President, Foreign Minister Criticize Swiss Minaret Referendum". Dikutip dari <http://news.az/articles/3579> (20 November 2014).
- The New York Times. 2009. "A Vote for Intolerance". Dikutip dari [http://www.nytimes.com/2009/12/01/opinion/01Tue3.html?\\_r=0.mnya](http://www.nytimes.com/2009/12/01/opinion/01Tue3.html?_r=0.mnya) (20 November 2014).
- The Swiss Authorities Online. (Tanpa Tahun). "Swiss Federalism". Dikutip dari <https://www.ch.ch/en/swiss-federalism/> (12 Desember 2014).
- The Swiss Authorities Online. (Tanpa Tahun). "Federal Council Election". dikutip dari <https://www.ch.ch/en/federal-council-election/> (20 Desember 2014).
- The Swiss Authorities Online. (Tanpa Tahun). "The Work of The Federal Council". Dikutip dari <https://www.ch.ch/en/work-federal-council/> (12 Desember 2014).
- The Wall Street Journal. 2009. "Switzerland and the Minaret". Dikutip dari <http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703939404574565674154159110> (20 November 2014).
- TRIPOLI. 2009. "Libya Imposes Economic Embargo on Switzerland". Alarabiya. Dikutip dari <http://www.alarabiya.net/articles/2010/03/03/102109.html> (20 November 2014).

- UNESCO. (Tanpa Tahun). "Xenophobia". UNESCO. Dikutip dari <http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/xenophobia/> (29 November 2014).
- United State of America Department of State. 2010. "Switzerland". Diakses dari <http://www.state.gov/documents/organization/171724.pdf> (18 Desember 2014).
- University of Portsmouth. 2012. "What is Secondary Data Analysis?". Secondary Data Analysis – Documentary and Content Analysis. Dikutip dari [http://compass.port.ac.uk/UoP/file/ef9dd79a-2a94-4795-be23-f75eb40c8a11/1/Documentary%20and%20Content%20Analysis\\_IMSLRN.zip/page\\_01.htm](http://compass.port.ac.uk/UoP/file/ef9dd79a-2a94-4795-be23-f75eb40c8a11/1/Documentary%20and%20Content%20Analysis_IMSLRN.zip/page_01.htm) (07 Mei 2015).
- Walker, Bill. 2005. "They Didn't Attack Switzerland". Civil Liberties Bureaucracy. dikutip dari <http://www.strike-the-root.com/51/walker/walker1.html> (05 November 2014).
- William, Alexandra. 2009. "Switzerland faces backlash over minaret ban". The Telegraph. Dikutip dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/switzerland/6692584/Switzerland-faces-backlash-over-minaret-ban.html> (31 Maret 2015).
- William, Alexandra. 2009. "Switzerland risks Muslim backlash after minarets vote". The Telegraph. Dikutip dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/switzerland/6685719/Switzerland-risks-Muslim-backlash-after-minarets-vote.html> (01 April 2015).
- Williams, Philip. 2009. "The Swiss to vote on ban of minarets on mosques". ABC. Dikutip dari <http://www.abc.net.au/pm/content/2009/s2755831.htm> (08 Maret 2015).

## LAMPIRAN I

### Hasil Uji Keterandalan

Uji keterandalan dilakukan dengan menggunakan rumus *Coefficient Reliability* (CR) dan Formula Scott seperti yang ada di dalam buku *Content Analysis for The Social Sciences and Humanities* karangan Oleh R. Holsty. Rumus-rumus ini seringkali dipakai oleh banyak peneliti dalam melakukan suatu uji keterandalan.

Rumus CR adalah :

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

Keterangan :

CR : *Coefficient Reliability*

M : Jumlah pernyataan yang disetujui oleh pengkode (peneliti dan hakim)

N1, N2 : Jumlah pernyataan yang dikode oleh dua pengkode (peneliti dan hakim)

Kemudian untuk menambah kepastian perhitungan nilai uji keterandalan atas sebuah kategorisasi juga dilakukan dengan menggunakan rumus Formula Scott, yaitu :

$$Pi = \frac{\% \text{ Observed Agreement} - \% \text{ Expected Agreement}}{1 - \% \text{ Expected Agreement}}$$

Keterangan :

Pi : Nilai Keterandalan

OA : Prosentase Persetujuan yang ditemukan dari pernyataan yang disetujui antar pengkode, yaitu nilai CR)

EA : Prosentase persetujuan yang diharapkan, yaitu proporsi dari jumlah pesan yang dikuadratkan

Sebelumnya berkenaan dengan reliabilitas untuk kepentingan keterpercayaan, maka peneliti dibantu oleh seorang pengkoding kedua. Peneliti terlebih dahulu memberikan pengarahan kepada pengkoding kedua mengenai prosedur yang

digunakan dan selanjutnya melakukan percobaan pengkodean. Dalam penelitian ini jumlah sampel opini publik internasional mengenai referendum anti-menara masjid di Swiss berjumlah 30 sampel. Uji keterandalan dilakukan pada keseluruhan jumlah sampel opini publik internasional. Kedua rumus di atas akan digunakan untuk menguji keterandalan kategorisasi-kategorisasi yang dipakai dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Kategori Sumber Opini :

- A. Presiden
- B. Menteri
- C. Pejabat Organisasi
- D. Institusi Media

Keterangan :

P : Peneliti

H : Hakim

+ : Hakim setuju dengan kategorisasi pesan yang ditemukan peneliti.

- : Hakim tidak setuju dengan kategorisasi pesan yang ditemukan peneliti

No.	P	H	No.	P	H
1	D	+	16	C	+
2	D	+	17	C	+
3	D	+	18	C	+
4	D	+	19	C	+
5	D	+	20	C	+
6	C	+	21	B	+
7	C	+	22	A	-
8	C	+	23	B	+
9	C	+	24	B	+
10	C	+	25	A	+
11	C	+	26	B	+
12	C	+	27	A	+
13	C	+	28	B	+
14	C	+	29	B	+
15	C	+	30	B	-

Jumlah pesan (N1, N2) : 30

(+) atau ( M) : 28

(-) : 2

Maka angka reliabilitas diketahui dengan rumus  $CR = \frac{2M}{N1+N2}$

$$\text{Jadi, } CR = \frac{2(28)}{30+30}$$

$$= \frac{56}{60}$$

$$= 0,93$$

Jadi nilai keterandalan berdasarkan rumus CR adalah sebesar 0,93 dan nilai keterandalan berdasarkan rumus Formula Scott diperoleh, dengan menjumlah proporsi dari jumlah pesan pada kategori, yakni sebagai berikut :

Kategori	f	Proporsi dari jumlah pesan	(X) <sup>2</sup>
A +	2	0,066	0,004356
A -	1	0,033	0,001089
B +	6	0,2	0,04
B -	1	0,033	0,001089
C +	15	0,5	0,25
C -	0	0	0
D +	5	0,166	0,027556
D -	0	0	0
	30		0,32409

maka nilai Pi diperoleh :

$$Pi = \frac{\% \text{ Observed Agreement} - \% \text{ Expected Agreement}}{1 - \% \text{ Expected Agreement}}$$

$$= \frac{0,93 - 0,32409}{1 - 0,32409}$$

$$= \frac{0,60591}{0,67591}$$

$$= 0,89$$

jadi nilai keterandalan berdasarkan Formula Scott adalah sebesar 0,89. Jika hasil dari rumus CR dan Formula Scott itu dipersentasekan maka, diperoleh nilai keterandalan CR sebesar 93 % sedangkan nilai Formula Scott sebesar 89 %.

2. Kategori Isu Opini :

- A. *Human Right*
- B. Islamofobia
- C. Xenofobia
- D. Diskriminasi
- E. Intoleransi

**Hasil Koding**

No.	P	H	No.	P	H
1	C	+	16	D	+
2	B	+	17	E	+
3	B	-	18	B	+
4	C	+	19	D	+
5	C	+	20	E	+
6	D	+	21	A	+
7	A	+	22	B	+
8	A	+	23	D	+
9	D	+	24	E	+
10	D	-	25	C	+
11	A	-	26	E	+
12	D	+	27	D	-
13	A	+	28	C	+
14	C	+	29	C	+
15	D	+	30	A	-

Jumlah pesan (N1, N2) : 30  
 (+) atau ( M) : 25  
 (-) : 5

Maka angka reliabilitas diketahui dengan rumus  $CR = \frac{2M}{N1+N2}$

$$\begin{aligned} \text{Jadi, CR} &= \frac{2(25)}{30+30} \\ &= \frac{50}{60} \\ &= 0,83 \end{aligned}$$

Jadi nilai keterandalan berdasarkan rumus CR adalah sebesar 0,83 dan nilai keterandalan berdasarkan rumus Formula Scott diperoleh, dengan menjumlah proporsi dari jumlah pesan pada kategori, yakni sebagai berikut :

Kategori	f	Proporsi dari jumlah pesan	(X) <sup>2</sup>
A +	4	0,133	0,017689
A -	2	0,066	0,004356
B +	3	0,1	0,01
B -	1	0,033	0,001089
C +	7	0,233	0,054289
C -	0	0	0
D +	7	0,233	0,054289
D -	2	0,066	0,004356
E +	4	0,133	0,017689
E -	0	0	0
	30		0,163757

maka nilai Pi diperoleh :

$$Pi = \frac{\% \text{ Observed Agreement} - \% \text{ Expected Agreement}}{1 - \% \text{ Expected Agreement}}$$

$$= \frac{0,83 - 0,163757}{1 - 0,163757}$$

$$= \frac{0,666243}{0,836243}$$

$$= 0,79$$

Jadi nilai keterandalan berdasarkan Formula Scott adalah sebesar 0,79. Jika hasil dari rumus CR dan Formula Scott itu dipersentasekan maka, diperoleh nilai keterandalan CR sebesar 83 % sedangkan nilai Formula Scott sebesar 79 %.

3. Kategori Arah Opini :

A. Mendukung

B. Mengkritik

C. Netral

No.	P	H	No.	P	H
1	A	+	16	B	+
2	A	-	17	B	+
3	C	+	18	B	+
4	B	+	19	B	+
5	B	-	20	B	+
6	B	+	21	B	+
7	B	+	22	B	+
8	B	+	23	B	+
9	B	+	24	B	-
10	B	+	25	A	+
11	B	+	26	B	+
12	B	+	27	B	+
13	B	+	28	A	+
14	B	+	29	B	+
15	B	+	30	C	+

Jumlah pesan (N1, N2) : 30

(+) atau ( M) : 27

(-) : 3

Maka angka reliabilitas diketahui dengan rumus  $CR = \frac{2M}{N1+N2}$

$$\begin{aligned} \text{Jadi, CR} &= \frac{2(27)}{30+30} \\ &= \frac{54}{60} \\ &= 0,90 \end{aligned}$$

Jadi nilai CR adalah 0,90. Sedangkan nilai keterandalan berdasarkan Formula Scott adalah sebagai berikut :

Kategori	f	Proporsi dari jumlah pesan	(X) <sup>2</sup>
A +	3	0,1	0,01
A -	1	0,033	0,001089
B +	22	0,733	0,537289
B -	2	0,066	0,004356
C +	2	0,066	0,004356
C -	0	0	0
	30		0,55709

maka nilai Pi diperoleh :

$$Pi = \frac{\% \text{ Observed Agreement} - \% \text{ Expected Agreement}}{1 - \% \text{ Expected Agreement}}$$

$$= \frac{0,90 - 0,55709}{1 - 0,55709}$$

$$= \frac{0,34291}{0,44291}$$

$$= 0,77$$

Jadi nilai keterandalan berdasarkan Formula Scott adalah sebesar 0,77. Jika hasil dari rumus CR dan Formula Scott itu dipersentasekan maka, diperoleh nilai keterandalan CR sebesar 90 % sedangkan nilai Formula Scott sebesar 77 %.

Maka secara keseluruhan nilai keterandalan dari kategorisasi dalam penelitian ini yang didapat dari rumus *Coefficient Reliability* dan Formula Scott adalah sebagai berikut :

<b>Kategori</b>	<b>Nilai Keterandalan</b>	
	<b><i>Coefficient Reliability</i></b>	<b>Formula Scott</b>
Kategori 1	93 %	89 %
Kategori 2	83 %	79 %
Kategori 3	90 %	77 %

Jadi nilai keterandalan dari rumus *Coefficient Reliability* paling sedikit diperoleh sebesar 83 %, sedangkan berdasarkan Formula Scott diperoleh nilai keterandalan sebesar 77 %. Menurut studi yang dilakukan oleh Laswell, menunjukkan bahwa hasil-hasil yang mempunyai kesesuaian sebanyak 70 sampai 80 persen antara atau di kalangan para pengkoding independen, dapat diterima sebagai data yang serasi dan dapat dipercaya. (Fluornoy, 1989 : 165).

## LAMPIRAN II

### DATA OPINI PUBLIK INTERNASIONAL

Pada lampiran ini akan dicantumkan data berisi opini publik internasional yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini. Data yang disertakan berupa 15 opini yang merupakan 50% dari 30 data yang penulis teliti. Alasan penulis untuk tidak mencantumkan semua data ialah karena terdapat beberapa data berupa *report* yang terdiri dari banyak halaman. Sehingga kemudian dipilihlah 15 data opini ini yang dinilai mewakili dari keseluruhan data yang diteliti penulis.

1. Amnesty Internasional; Switzerland minaret ban would breach freedom of religion obligations
2. OSCE; Head of OSCE human rights office expresses concern about outcome of Swiss minaret ban referendum
3. PBB; Switzerland; UN expert on religious freedom regrets outcome of vote to ban construction of minarets
4. PBB; UN rights chief says Swiss ban on minarets 'clearly discriminatory'
5. Human Rights Watch; Switzerland: Minaret Ban Violates Rights
6. BBC; The fear of minarets
7. The Guardian; Switzerland's flawed minaret vote
8. The Jakarta Post; Thanking the Swiss vote
9. The Now York Times; A Vote for Intolerance
10. The Wall Street Journal; Switzerland and the Minaret
11. Turki; Turkish president, foreign minister criticize Swiss minaret referendum
12. Indonesia; Swiss minaret ban reflects 'ignorance': Indonesia
13. Prancis; Nicolas Sarkozy defends Swiss minaret ban
14. Swedia; Bildt blasts 'prejudice' of Swiss minaret ban
15. Iran; Iran warns Switzerland over minaret ban.

## **OPINI ORGANISASI INTERNASIONAL**

### **1. Amnesty International**

#### **Switzerland minaret ban would breach freedom of religion obligations**

25 November 2009 - A ban on the construction of minarets would breach Switzerland's obligations to uphold freedom of religion, Amnesty International said ahead of a referendum next Sunday on a constitutional amendment.

The proposal, which was initiated by members of two Swiss parties, will ask Swiss voters if they wish to add the sentence "The construction of minarets is forbidden" to Article 72 of the Constitution.

"Contrary to the claims of the initiators of the referendum, a general prohibition of the construction of minarets would violate the right of Muslims in Switzerland to manifest their religion," said Nicola Duckworth, Europe and Central Asia Programme Director at Amnesty International.

"A ban on the construction of minarets while, for example, allowing those of church spires would constitute discrimination on the basis of religion."

The initiators of the referendum claim that the construction of minarets is not protected by the freedom of religion as they have "no religious significance". They assert that minarets are "symbols of a religious-political claim to power and dominance which threatens - in the name of alleged freedom of religion - the constitutional rights of others."

Islam is the second largest religion in Switzerland after Christianity, and Muslims make up over four per cent of the country's population.

There are hundreds of places of worship (mostly in commercial buildings or private residences) in the country but only four minarets have been built.

The Swiss government and all the other major political parties are recommending a "no" vote. Local Christian, Jewish and Muslim leaders have also joined forces to reject a ban on minarets. They say that the referendum also poses a threat to peaceful relations between religions and inhibits the integration efforts of Muslims in Switzerland.

"While there may be legitimate reasons for measures which might in individual cases interfere with the construction of minarets, there is no legitimate public policy justification for a general prohibition on their construction," Nicola Duckworth said.

"A change in the constitution which would provide for the blanket ban on the construction of minarets must be soundly rejected. Such a move is important as it will reinforce the equality of rights for all people living in Switzerland."

Sumber : <http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/switzerland-minaret-ban-would-breach-freedom-religion-obligations-20091125>

## 2. OSCE

### **Head of OSCE human rights office expresses concern about outcome of Swiss minaret ban referendum**

ATHENS 30 November 2009

ATHENS, 30 November 2009 - The director of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Ambassador Janez Lenarcic, expressed concern today at the outcome of the referendum held in Switzerland on Sunday on the ban of the construction of minarets.

"A blanket prohibition of minarets is not consistent with OSCE commitments on freedom of religion or belief and the principle of non-discrimination based on religion," Lenarcic said in Athens, where he will participate in the OSCE Ministerial Council, to be held tomorrow and Wednesday.

The referendum, launched by the Swiss People's Party and the Federal Democratic Union, was backed by 57.5 per cent of voters and a majority of cantons.

Members of the Advisory Council of ODIHR's Advisory Panel of Experts on Freedom of Religion or Belief also expressed concern.

"The claim that the approved constitutional amendment does not limit freedom of religion or belief because it only affects the construction of minarets rather than mosques, and that minarets have no religious significance, is seriously flawed," said Jakob Finci, President of Jewish Community in Bosnia and Herzegovina and a member of the ODIHR Advisory Council.

Gerhard Robbers, another member of the Council and Professor of Law at Trier University in Germany said religious buildings must conform to planning laws, like all buildings.

"However, such laws must be non-discriminatory and it is difficult to see how banning the construction of minarets is compatible with this," he said. "According to international norms on freedom of religion or belief, the contents of a religion and its manifestation, including the question of minarets, should be defined by the worshippers themselves and not by states."

Lenarcic added:

"By singling out a specific community, the outcome of this referendum has the potential to create tensions and generate a climate of intolerance against Muslims. OSCE commitments call for fostering mutual understanding and respect between believers of different communities."

The Advisory Council is a consultative body of OSCE/ODIHR with acknowledged expertise on freedom of religion or belief, consisting of members from many OSCE participating States and from diverse backgrounds. The Advisory Council advises ODIHR and participating States on pertinent issues and provides legislative reviews and expert opinions.

Sumber: <http://www.osce.org/odihr/51680>

### 3. PBB

#### **Switzerland: UN expert on religious freedom regrets outcome of vote to ban construction of minarets**

GENEVA (30 November 2009) -- The Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Ms. Asma Jahangir, regrets the outcome of the vote on the initiative to prohibit the construction of minarets in Switzerland.

“I have deep concerns at the negative consequences that the outcome of the vote will have on the freedom of religion or belief of members of the Muslim community in Switzerland,” Ms. Jahangir said. “Indeed, a ban on minarets amounts to an undue restriction of the freedom to manifest one’s religion and constitutes a clear discrimination against members of the Muslim community in Switzerland.”

As also stated by the United Nations Human Rights Committee a month ago, such a ban is contrary to Switzerland’s obligations under international human rights law.

“This vote reminds us that no societies are immune to religious intolerance,” stressed Ms. Jahangir, adding that “it is therefore more than ever necessary to continue raising awareness and educating people about religious diversity, enabling all societies to adopt an enlightened and progressive attitude towards the beliefs of other communities.”

“Doing so will help to eliminate the grounds for irrational fears towards Muslims. Unfortunately, these fears have been largely exploited in Switzerland for political purposes,” warned the UN expert.

The Special Rapporteur emphasized that Switzerland, which has ratified the International Covenant on Civil and Political Rights, must protect and ensure respect for freedom of thought, conscience and religion. “I therefore urge the Swiss authorities to abide by all its international obligations and to take the necessary measures to fully protect the right to freedom of religion or belief of members of the Muslim community,” concluded the UN expert on religious freedom.

Sumber:

<http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=9649&LangID=e>

## 4. UN rights chief says Swiss ban on minarets ‘clearly discriminatory’

1 December 2009 – The United Nations human rights chief spoke out today against the Swiss ban on the building of new minarets, calling it a discriminatory and deeply divisive step which risks putting the country on a “collision course” with its international rights obligations.

“I hesitate to condemn a democratic vote, but I have no hesitation at all in condemning the anti-foreigner scare-mongering that has characterized political campaigns in a number of countries, including Switzerland, which helps produce results like this,” High Commissioner for Human Rights Navi Pillay stated.

The ban results from a referendum held on Sunday on the subject, which was not supported by the Government of Switzerland, she noted in a news release.

Ms. Pillay said that banning an architectural structure that is associated with one religion only is clearly discriminatory.

“Some of the politicians who proposed this motion argued that it wasn’t targeting Islam or Muslims,” she said. “Others claimed that banning minarets would improve integration. These are extraordinary claims when the symbol of one religion is targeted.”

The High Commissioner added that such a ban is “discriminatory, deeply divisive and a thoroughly unfortunate step for Switzerland to take, and risks putting the country on a collision course with its international human rights obligations.”

Yesterday Asma Jahangir, the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, voiced her regret at the vote and its negative consequences for Muslims in Switzerland.

“Indeed, a ban on minarets amounts to an undue restriction of the freedom to manifest one’s religion and constitutes a clear discrimination against members of the Muslim community in Switzerland,” she stated.

Sumber: <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33104#.VIVWmixsJYU>

## 5. HUMAN RIGHTS WATCH

### **Switzerland: Minaret Ban Violates Rights**

*December 4, 2009*

(Geneva) - The recent vote in Switzerland to ban minaret construction violates the rights of observant Muslims to manifest their religion in public and reflects mounting anti-Muslim sentiment in Western Europe, Human Rights Watch said today.

On November 29, 57 percent of those voting in a national referendum endorsed a constitutional amendment to ban the future construction of minarets in Switzerland. The campaign for the yes vote, led by the Swiss People's Party, was marked by rhetoric against Islam and Muslims. A campaign poster showed minarets appearing to launch, like missiles, off the Swiss flag behind a woman wearing the niqab (a full-face veil leaving only the eyes visible). The Swiss government, which opposed the referendum, is required by Swiss law to draft legislation to amend the Constitution in line with the popular vote.

A ban on minarets denies Muslims the right to manifest their religion and is discriminatory. The right to manifest one's religion in public, through worship, teaching, practice, and observance, is an integral part of the right to religious freedom, guaranteed by international human rights treaties, such as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the European Convention on Human Rights, both of which Switzerland has ratified. Both treaties also prohibit discrimination on the grounds of religion.

States are permitted to limit the right to practice or display religious belief only if they can demonstrate a need to do so to protect public safety, public order, health, or morals, or the fundamental rights or freedoms of others. None of these justifications apply to the Swiss ban on minarets, Human Rights Watch said. By targeting one religion, without any legitimate justification, the ban is clearly discriminatory.

The UN High Commissioner for Human Rights and the UN expert on religious freedom have condemned the vote as discriminatory and a violation of the fundamental right to manifest one's religion. The UN Human Rights Committee, which monitors compliance with the ICCPR, warned Switzerland in October that a minaret ban would violate the treaty. The ban is likely to face legal challenges in Switzerland and could eventually be examined by the European Court of Human Rights.

The vote is a deeply worrisome expression of growing intolerance toward Muslims across Europe, Human Rights Watch said. The vote has already galvanized far-right parties across Europe. The Danish People's Party, Vlaams Belang in Belgium, Italian Northern League, and the Dutch Party for Freedom immediately praised the vote and pledged to pursue similar initiatives in their own countries.

Conflicts over mosques also do a deep disservice to the important goals of combating discrimination and encouraging integration of Europe's newer communities, Human Rights Watch said. While in some cases there may be legitimate local dynamics and regulations to consider concerning the construction of religious buildings, the most vocal opponents often cast the issue in terms of defending Europe's Christian heritage or preventing Islamic radicalism. By presenting Islam as a dangerous interloper, these arguments stigmatize Muslims and feed into routine discrimination against Muslims.

A major survey commissioned by the European Union's Fundamental Rights Agency in 14 European countries found that one in three Muslims had experienced some kind of discrimination over the past 12 months. One in 10 said they had suffered a racially motivated assault, threat, or serious harassment at least once during that time. The vast majority never reported the incidents, lacking confidence that they would get help.

All European countries, including Switzerland, should uphold their values of human rights and tolerance, Human Rights Watch said, and in particular their commitment to freedom of religion and to ending all forms of discrimination on the grounds of religion.

Sumber: <http://www.hrw.org/news/2009/12/04/switzerland-minaret-ban-violates-rights>

## **OPINI INSTITUSI MEDIA INTERNASIONAL**

### **6. BBC**

#### **The fear of minarets**

[Gavin Hewitt](#) | 10:28 UK time, Monday, 30 November 2009

Until the results emerged, few expected that the Swiss would actually vote to ban minarets. There had been warnings of economic damage or even a backlash. Even though the voters had been told they would be singling out the architecture of one religion they went ahead and said "no".

Debates about identity are happening across Europe. In Marseille there is a bitter battle over planning permission for a 20m-euro Grand Mosque. Some argue it will dwarf the Notre Dame de la Garde. In Italy the Northern League, an anti-immigrant party, says "yes to bell-towers, no to minarets". In France they are debating the burqa and what it means to be French. In Cologne a large mosque capable of holding 2,000 people should be finished by next year, but only after fierce argument.

So why is this happening? Firstly, Muslims have higher visibility. Secondly, as their numbers have increased so has their confidence. Thirdly, they are more assertive with their identity. There are more headscarves on the streets. It is prompting a debate, sometimes hidden, about where European societies are heading.

Much of the concern is based on fear. After all, there are only four minarets in Switzerland but there are widely-held concerns of society dividing into "parallel communities".

Perhaps the greatest fear is of the known world is disappearing. For many people this is unsettling. One of the Swiss papers said people were concerned "it was all going too fast".

Then there is the fear of extremism, of terror carried out in the name of religion. Swiss Justice Minister Eveline Widmer-Schlumpf said the vote "reflected fears among the population of Islamic fundamentalist tendencies".

Then in Switzerland there was a feminist fear. Julia Onken, a prominent feminist, called for women to support the ban. "Mosques are male houses, minarets are male power symbols," she said. She went on to describe the minaret as a "visible signal... of the oppression of women." Some on the left believe that support for multi-culturalism should not trump upholding basic values like women's rights.

In some European cities the mosques are seen as "symbols of non-assimilation". It was pointed out in Cologne that much of the space would be used for social activities. Children would go there after school rather than playing with others and learning to live and enjoy other traditions.

Some of these concerns are summed up in the views of the new president of the European Council, Herman Van Rompuy. Over Turkey joining the EU, he said "the universal values which are in force in Europe and which are fundamental values of Christianity, will lose vigour with the entry of a large Islamic country such as Turkey".

There are choices here for all communities. One Swiss paper this morning said that the choice was to cling to a "traditional and nationalist" society or to embrace a "modern and international" approach.

For the Muslim communities there are other choices. They can assert their own identity and largely live within their own culture, or they can consciously integrate into the countries they join.

Sumber: [http://www.bbc.co.uk/blogs/legacy/thereporters/gavinhewitt/2009/11/the\\_fear\\_of\\_minarets.html](http://www.bbc.co.uk/blogs/legacy/thereporters/gavinhewitt/2009/11/the_fear_of_minarets.html)

## 7. THE GUARDIAN

### Switzerland's flawed minaret vote

Monday 30 November 2009 - The cheering thing about the Swiss decision to ban minarets is that it demonstrates the idiocy of referendums. What should have been dealt with as a series of local planning decisions turned into a fierce national debate in which only two responses were permitted: either you could vote with the right, some feminists and parts of the left to outlaw minarets in Switzerland, or you could vote with a coalition of government ministers, business leaders and churches to allow them. If you want to make a statement that you don't like conspicuous religious symbols of any sort, Muslim, Christian or anything else, but also dislike the notion of one group being singled out, how on earth would you have voted? I'm sure this conundrum influenced at least some of the 47% of the Swiss electorate who didn't use their vote, producing a relatively low turnout by Swiss standards.

In the aftermath of the referendum, Swiss politicians are expressing astonishment and dismay over the decision, no doubt with an eye on trade relations with countries with Muslim majorities. They don't seem to have grasped that an argument about ideas has been displaced onto inanimate objects, which is why something most Swiss rarely see in their everyday lives – there are only four mosques with minarets in Switzerland – has become such a contested issue. I don't doubt that some people voted for the ban for racist reasons, but damning them all as "Islamophobes" is an attempt to suppress entirely reasonable arguments about the role of religion in secular modern societies. Tariq Ramadan doesn't use the word in his polemic but he does claim without qualification that "voters were drawn to the cause by a manipulative appeal to popular fears and emotions". Corraling a wide range of people, many of whom disagree profoundly with each other, under one great Islamophobic umbrella is a familiar tactic but it's not conducive to civilised discussion. If the debate about the powers demanded and enjoyed by religion – all of them, not just Islam – pops up in distorted forms in European countries, it is as much the responsibility of religious apologists such as Ramadan as it is the racist right.

Switzerland is by tradition a Christian country, but many of its citizens are secular in outlook and the church has lost much of its influence over everyday life. The UK I grew up in was (and is) nominally Christian but I never believed in God and made a point of challenging Christian attitudes to gay people and women who had sex outside marriage. Bizarrely, people like me have no place in the current debate about the role of religion in public life, where we are excluded by another false choice: uncritically welcoming Islam or being accused of joining forces with the BNP. This is ridiculous, absurd and a slur on a great number of decent people, but it's what happens when humane principles which challenge a set of ideologies – which is what "faith" is to non-believers – are regularly caricatured as racism.

Any notion of universal human rights recognises the right of individuals to practise their religion, but that isn't incompatible with believing that religion is divisive and seeks to exercise unelected power. (Look at last week's revelations about the way in which the Catholic church in Ireland protected priests who abused children for decades.) If you take that position, it's perfectly reasonable to believe that public displays of religious symbols should be kept to a minimum, whether they take the form of crucifixes or hijabs. As Ian Traynor reports in today's Guardian, the proposed ban on minarets in Switzerland received "substantial support on the left and among secularists worried about the status of women in Islamic cultures". In other words, the referendum was a proxy for a much wider argument which doesn't divide easily into "for" and "against" camps. Somewhere in all this noisy rhetoric of racists and religious apologists, the reasonable voice of secularism urgently needs to be heard.

Sumber: <http://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2009/nov/30/switzerland-minaret-ban-islam>

## 8. THE JAKARTA POST

### Thanking the Swiss vote

The Jakarta Post | Opinion | Wed, December 02 2009, 9:46 AM

Frankly speaking, we expected more from the Swiss in their vote whether to endorse a government ban on minarets.

Known as the most peaceful nation in the world, never engaged in war, one naturally presumes tolerance is part of the Swiss national character. Its vote supporting the ban shows we probably expected too much from them.

Rather than lamenting the outcome of a democratic process, we in Indonesia and in the Islam world must see the Swiss vote as a challenge to surmount.

If a nation as peaceful as Switzerland sees the minaret as a symbol of Islamic fundamentalism and radicalism, how do other nations who are less tolerant see this symbol of Islam?

As a democracy with the largest Muslim population worldwide, Indonesia must take the lead in the global campaign to change the perception in the West, formed largely by the 9/11 terrorist attacks on the US in 2001, which associated Islam with violence and terrorism. The ensuing terrorist attacks in Jakarta, Bali, the Philippines, Madrid, London, Mumbai and other places have only widened the gap between the West and the Islamic world. The Swiss vote is a reflection of the growing anti-Islam sentiment.

Indonesia has already initiated many interfaith dialogues, including one between Asia and Europe.

This is now very much part of the country's foreign policy. Only through greater dialogue can people of different faiths understand one another and coexist peacefully together.

The Swiss vote means we need to do much more.

But Indonesia can only make a significant contribution to a more peaceful and tolerant world by starting at home.

The Swiss vote is only a ban against minarets. Muslims there can still have mosques, just without symbols that many Swiss find offensive. This is already much more than what many religious minorities have in a predominantly Muslim Indonesia.

Before we can preach the message of tolerance, we need to practice it at home.

Sumber: <http://www.thejakartapost.com/news/2009/12/02/thanking-swiss-vote.html>

## 9. THE NEW YORK TIMES

### A Vote for Intolerance

Editorial Published: November 30, 2009

Disgraceful. That is the only way to describe the success of a right-wing initiative to ban the construction of minarets in Switzerland, where 57 percent of voters cast ballots for a bigoted and mean-spirited measure.

Under Switzerland's system of direct rule, the referendum is binding. Switzerland's 400,000 or so Muslims, most of whom come from Kosovo and Turkey, are legally barred from building minarets as of now. We can only hope that the ban is quickly challenged, and that the Swiss courts will find a way to get rid of it.

But the vote also carries a strong and urgent message for all Europe, and for all Western nations where Islamic minorities have been growing in numbers and visibility, and where fear and resentment of Muslim immigrants and their religion have become increasingly strident and widespread. The warning signs have been there: the irrational fierceness of official French resistance to the shawls and burkas worn by some Muslim women; the growing opposition in many European quarters to Turkish membership in the European Union.

Terrorist attacks by Islamic militants, notably 9/11 and the attacks on London, Madrid and Mumbai, have played a role in the perception of Muslims as a security threat. But the worst response to extremism and intolerance is extremism and intolerance. Banning minarets does not address any of the problems with Muslim immigrants, but it is certain to alienate and anger them.

In Switzerland, Muslims amount to barely 6 percent of the population and there is no evidence of Islamic extremism. If its residents can succumb so easily to the propaganda of a xenophobic right-wing party, then countries with far greater Muslim populations and far more virulent strains of xenophobia best quickly start thinking about how to counter the trend.

If left unchecked, xenophobia spreads fast. Already right-wingers in the Netherlands and Denmark have called for similar measures, and others are bound to be encouraged by the success of the Swiss People's Party.

Sumber : [http://www.nytimes.com/2009/12/01/opinion/01Tue3.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/2009/12/01/opinion/01Tue3.html?_r=0)

## 10. THE WALL STREET JOURNAL

### Switzerland and the Minaret

Updated Nov. 30, 2009 8:36 a.m. ET

Nearly 58% of Swiss voters Sunday cast their ballots in favor of banning the construction of new minarets in the Alpine republic, a surprise result that led at least one Swiss member of parliament to declare that "the foundations of Switzerland's direct democracy have failed."

That is clearly wrong. Swiss direct democracy shows its mettle when Swiss voters use it to stand up to their political elites, as happened here. Having said that, Sunday's vote, for all the hand-wringing leading up to it, was a decidedly mild-mannered sort of protest. The construction of new minarets is banned, but the building of mosques is unaffected, and the vote does not affect the four existing minarets in the country. Nobody's freedom of worship is threatened, but a symbolic message has been sent.

But what message, exactly? The vote betrays an undercurrent of fear among the Swiss—a fear that is not without cause. There is no denying the connection between radical imams and terrorist acts. Nor should anyone look away from the fact that too many European Muslims flatly reject the norms of their host countries, sometimes in ways that are criminal: honor killings, child brides and the like.

Yet banning minarets does nothing to address that fear. It merely makes it less likely that the average Swiss will be confronted by a visible symbol of Islam upon his skyline. Thus, even as a symbolic gesture, it seems to encourage a head-in-the-sand approach toward the 5% of Swiss who are Muslim. In much of Europe, this is the norm anyway, the result of political correctness and cowardice.

Rather than being a blow against that attitude, Sunday's vote seems only to reinforce it. Banning minarets won't do anything to assimilate Switzerland's or Europe's Muslims, or to ensure that economic opportunity is available to everyone of whatever creed, or to deal with Western Europe's demographic problem of too few newborns.

The ban, in other words, does too much and too little at once. Too much because it becomes a very visible and easily exploited symbol of supposed European intolerance. But it accomplishes too little because it seeks merely to hide from view the problems that gave rise to the fear of the minaret in the first place.

Sumber:

<http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703939404574565674154159110>

**OPINI PEJABAT NEGARA INTERNASIONAL**

**11. TURKI**

**Turkish president, foreign minister criticize Swiss minaret referendum**

Tue 01 December 2009 16:36 GMT | 23:36 Local Time

Turkish President Abdullah Gul has described Sunday's referendum banning the construction of new minarets in Switzerland as contrary to fundamental rights and freedoms.

"This is a shame for the Swiss," President Gul told reporters on Tuesday before leaving for Jordan on an official visit.

"This issue should be monitored seriously. It is a striking way to show how Islamophobia develops in the Western world," Gul said.

The Turkish Ministry of Foreign Affairs expressed its "disappointment" on Tuesday at the referendum.

The ministry said both Turkey and the international community expected Switzerland to take steps to correct the situation which was not in line with the traditions of Switzerland.

More than 57.5% of Swiss voters and 22 out of 26 cantons voted in favour of the ban on the construction of new minarets. The proposal had been put forward by the Swiss People's Party, the largest party in parliament, which described minarets as a sign of Islamisation.

Sumber: <http://news.az/articles/3579>

## 12. INDONESIA

### **Swiss minaret ban reflects ‘ignorance’: Indonesia**

Ary Hermawan, The Jakarta Post, Jakarta | World | Tue, December 01 2009, 3:40 PM

Indonesian Foreign Minister Marty Natalegawa Tuesday decried Switzerland’s referendum vote to ban the construction of new mosque minarets in the country, saying it was “discriminatory” and “violated the right to freedom of religion.”

“We are deeply disappointed by the Swiss decision, which is contradictory to its image as an inclusive and tolerant nation,” Marty told reporters after hosting an interfaith dialogue between Indonesian prominent religious leaders and Cardinal Jean-Louis Tauran, the President of the Pontifical Council for Inter-religious Dialogue at his office.

The new foreign minister said the controversial referendum in the European country reflected the need for more interfaith dialogues between religious communities as prejudice against Islam persists in Western countries. “We cannot afford to appreciate a policy that is based on ignorance,” he said.

He stopped short of saying, however, whether he feared the new cultural disharmony between Islam and liberal Europe would spark violent protests in the Muslim world, with Indonesia having the biggest population, as happened in 2006 over the Danish cartoon controversy.

The Swiss government, Marty said, had already informed Indonesia about the referendum vote a month ago and made clear that they were against it. “We have to remain clear-headed...Our task is to build a bridge of understanding to resolve the differences.”

Sumber: <http://www.thejakartapost.com/news/2009/12/01/swiss-minaret-ban-reflects-%E2%80%98ignorance%E2%80%99-indonesia.html>

### 13. FRANCIS

#### **Nicolas Sarkozy defends Swiss minaret ban**

By Henry Samuel in Paris, 6:35PM GMT 08 Dec 2009

The French president made the remarks as he sought to justify his own, controversial, "great debate" on France's national identity, which critics say is alienating mainly Muslim immigrants.

In an opinion piece in *Le Monde*, the president said that while he regretted the "painful misunderstandings" created by the referendum, the vote should be respected.

"Instead of irrevocably condemning the Swiss people, let's also try to understand what it sought to express and what so many peoples in Europe, including the French, feel," he said.

"What happened has nothing to do with the freedom of religious practise, or freedom of conscience," he wrote.

He asked all believers to avoid "ostentation and provocation" and instead show "humble discretion".

"The peoples of Europe are welcoming and tolerant: it's in their nature and in their culture. But they don't want their way of life, their mode of thinking and their social relations distorted," he added.

His comments came as Eric Cantona, the French footballer, joined the debate, deriding "stupid" nationalist approaches to the issue of national identity.

"Being French, does that mean having to speak French, sing the Marseillaise? That's just stupid," said the retired France and Manchester United striker who is a son of Spanish and Italian immigrants.

"Being French means being revolutionary."

France is home to Europe's largest Muslim minority and where Islam now ranks as the nation's second religion.

Next month, a parliamentary inquiry will produce a much-awaited report on whether to ban the burka, or full Islamic veil, which Mr Sarkozy has said "has no place in France".

Despite several local campaigns by the French far right, dozens of mosques are due to be built in France, including a Grand Mosque in Marseille that will have an 82ft minaret.

The government has ruled out a minaret construction ban but says that mayors have the final word on building new mosques with towers, which is a matter for "urban planning".

France's six million Muslims congregate in fewer than 2,500 mosques and prayer houses, many in basements. France has 64 mosques with minarets.

Mr Sarkozy's words were published hours before the French parliament began a debate on national identity, after weeks of town hall meetings on the issue.

A government website on the subject has received 40,000 comments, though up to 10 per cent have been removed for being "racist or xenophobic".

The French Left has accused the president of igniting the issue to woo far-right voters ahead of regional elections next March.

Although Mr Sarkozy has called it a "noble debate", detractors – some from within his own camp – warn he is playing into the National Front's hands.

"How can one be surprised at the success of extremists when one doesn't take into account the suffering of voters?" he asked yesterday.

Sumber: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/6761632/Nicolas-Sarkozy-defends-Swiss-minaret-ban.html>

#### 14. SWEDIA

##### **Bildt blasts 'prejudice' of Swiss minaret ban**

Published: 30 Nov 2009

Swedish Foreign Minister Carl Bildt on Monday slammed Switzerland's referendum to ban the construction of minarets on mosques in the Alpine country.

"It's an expression of quite a bit of prejudice and maybe even fear, but it is clear that it is a negative signal in every way, there's no doubt about it," Bildt, whose country holds the current European Union presidency, told Svergies Radio (SR).

Swiss voters on Sunday approved by a majority of 57.5 percent a ban on minarets in a referendum.

Bildt said he found it odd that such a decision was put to a referendum.

"Normally Sweden and other countries have city planners that decide this kind of issue. To decide this kind of issue in a referendum seems very strange to me," he said.

Sumber: <http://www.thelocal.se/20091130/23562>

15. **IRAN**

**Iran warns Switzerland over minaret ban**

Published: 12.05.09, 18:10 / [Israel News](#)

Iran warned Switzerland on Saturday of “consequences” over a referendum banning the building of new mosque minarets and urged Bern not to enforce the ban, the official IRNA news agency reported.

The vote went “against the prestige of a country which claims to be an advocate of democracy and human rights,” Foreign Minister Manouchehr Mottaki told Swiss counterpart Micheline Calmy-Rey in a telephone call, quoted by IRNA.

Mottaki said last week’s referendum would “damage Switzerland’s image as a pioneer of respecting human rights among Muslims’ public opinion.”

“Values such as tolerance, dialogue and respecting others’ religions should never be put to referendum,” he argued, warning Switzerland of the “consequences” of anti-Islamic acts, IRNA reported.

The foreign minister hoped the Bern government would soon “take necessary steps and find a constitutional way to prevent imposition of the ban.”

**'Support Muslim rights'**

IRNA said Switzerland’s ambassador in Tehran was summoned on Saturday before the foreign ministry, which protested against the minaret ban which was backed by more than 57% of voters who cast their ballot on November 29.

Calmy-Rey said the referendum was carried out against the will of the Swiss government, which would “use all its means to support Muslims rights,” the IRNA report added.

The referendum on a constitutional ban on minarets was proposed by a rightwing Swiss party and had not been expected to succeed.

Besides the government, the ban was opposed by the bulk of Switzerland’s political parties as well as the economic establishment.

It drew widespread criticism from the United Nations, Muslim states, fellow European countries and the Vatican.

Sumber: <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3815375,00.html>

**LAMPIRAN III**

**Nama hakim : Muthi Fatihah**  
**Jurusan : Hubungan Internasional**

**1. Tabel Sumber Opini Publik Internasional**

**P: Presiden PO: Pejabat organisasi internasional**  
**M: Menteri IM : Institusi media internasional**

NO	DATA OPINI	SUMBER OPINI			
		P	M	PO	IM
1	The fear of minarets (30 November 2009)				✓
2	Switzerland's flawed minaret vote (30 November 2009)				✓
3	Thanking The Swiss vote (2 December 2009)				✓
4	A Vote for Intolerance (30 November 2009)				✓
5	Switzerland an the minaret (30 November 2009)				✓
6	Switzerland votes against religious freedom (30 November 2009)			✓	
7	Switzerland minaret ban would breach freedom of religion obligations (25 November 2009)			✓	
8	Public statement from Amnesti International "banning minarets violate international human rights law" (21 oktober 2009)			✓	
9	Amnesty international report 2010			✓	
10	Head of OSCE human rights office expresses concern about outcome of Swiss minaret ban referendum (30 November 2009)			✓	
11	OSCE representative calls Swiss initiative to ban minarets unfortunate (21 Juni 2007)			✓	
12	The minaret vote, Europe's call to show bias (2 desember 2009)			✓	
13	Switzerland: minaret ban violates right (4 desember 2009)			✓	
14	UNHCR report on 2010			✓	
15	Swiss minaret ban discriminates against muslims (30 november 2009)			✓	
16	UN rights chief says Swiss ban on minarets 'clearly discriminatory' (1 desember 2009)			✓	
17	A Swiss Ban on Minarets (18 December 2009)			✓	

NO	DATA OPINI	P	M	PO	IM
18	Third OIC observatory report			✓	
19	Suplementary Human Dimension Meeting: Freedom of religion or belief			✓	
20	IRLA Answers the Swiss Ban on Minarets (30 November 2009)			✓	
21	<b>TURKI</b> : Turkey angry over Swiss ban on minarets (01 December 2009)		✓		
22	Turkish president, foreign minister criticize Swiss minaret referendum (01 December 2009)	-	-		
23	<b>INDONESIA</b> : Swiss minaret ban reflects ignorance: Indonesia (01 December 2009)		✓		
24	<b>PRANCIS</b> : Swiss Ban on Minaret Building Meets Widspread Criticism (01 December 2009)		✓		
25	Nicolas Sarkozy defends Switzerland minaret ban (8 December 2009)	✓			
26	<b>IRAN</b> : Iran warns Switzerland over minaret ban (05 December 2009)		✓		
27	<b>LIBYA</b> : Libya imposes economic embargo on Switzerland (03 Maret 2010)	✓			
28	<b>JERMAN</b> : Westerwelle defends Swiss after minaret ban (05 December 2009)		✓		
29	<b>SWEDIA</b> : Bildt blasts prejudice of Swiss minaret ban (30 November 2009)		✓		
30	<b>AS</b> : Switzerland – US Departmen of State	-	-		

2. Tabel Isu Opini Publik Internasional

**HR: Human Right**  
**ISP: Islamophobia**  
**XP: xenophobia**

**D: diskriminasi**  
**I: intolerance**

NO	OPINI PEMBERITAAN MEDIA	ISU OPINI				
		HR	ISP	XP	D	I
	<b>BBC</b>					
1	The fear of minarets (30 November 2009)			✓		
	<b>THE GUARDIAN</b>	HR	ISP	XP	D	I
2	Switzerland's flawed minaret vote (30 November 2009)		✓			
	<b>ASIA: THE JAKARTA POST</b>	HR	ISP	XP	D	I
3	Thanking The Swiss vote (2 December 2009)					✓
	<b>NYT</b>	HR	ISP	XP	D	I
4	A Vote for Intolerance (30 November 2009)			✓		
	<b>THE WALL STREET JOURNAL</b>	HR	ISP	XP	D	I
5	Switzerland an the minaret (30 November 2009)			✓		
	<b>OPINI ORGANISASI INTERNASIONAL</b>					
	<b>AMNESTI INTERNASIONAL</b>	HR	ISP	XP	D	I
6	Switzerland votes against religious freedom (30 November 2009)				✓	
7	Switzerland minaret ban would breach freedom of religion obligations (25 November 2009)	✓				
8	Public statement from Amnesti International "banning minarets violate international human rights law" (21 oktober 2009)	✓				
9	Amnesty international report 2010				✓	
	<b>OSCE (Organization for Security &amp; Co-operation in Europe)</b>	HR	ISP	XP	D	I
10	Head of OSCE human rights office expresses concern about outcome of Swiss minaret ban referendum (30 November 2009)					✓
11	OSCE representative calls Swiss initiative to ban minarets unfortunate (21 Juni 2007)				✓	
	<b>Human Right Watch</b>	HR	ISP	XP	D	I
12	The minaret vote, Europe's call to show bias (2 desember 2009)				✓	
13	Switzerland: minaret ban violates right (4 desember 2009)	✓				

<b>NO</b>	<b>UN (Human Rights)</b>	<b>HR</b>	<b>ISP</b>	<b>XP</b>	<b>D</b>	<b>I</b>
14	UNHCR report on 2010			✓		
15	Swiss minaret ban discriminates against muslims (30 november 2009)				✓	
16	UN rights chief says Swiss ban on minarets 'clearly discriminatory' (1 desember 2009)				✓	
17	A Swiss Ban on Minarets (18 December 2009)					✓
	<b>OIC</b>	<b>HR</b>	<b>ISP</b>	<b>XP</b>	<b>D</b>	<b>I</b>
18	Third OIC observatory report		✓			
	<b>COJEP INTERNATIONAL</b>	<b>HR</b>	<b>ISP</b>	<b>XP</b>	<b>D</b>	<b>I</b>
19	Supplementary Human Dimension Meeting: Freedom of religion or belief				✓	
	<b>IRLA</b>	<b>HR</b>	<b>ISP</b>	<b>XP</b>	<b>D</b>	<b>I</b>
20	IRLA Answers the Swiss Ban on Minarets (30 November 2009)					✓
	<b>OPINI NEGARA</b>	<b>HR</b>	<b>ISP</b>	<b>XP</b>	<b>D</b>	<b>I</b>
21	<b>TURKI</b> : Turkey angry over Swiss ban on minarets (01 December 2009)	✓				
22	Turkish president, foreign minister criticize Swiss minaret referendum (01 December 2009)		✓			
23	<b>INDONESIA</b> : Swiss minaret ban reflects ignorance: Indonesia (01 December 2009)				✓	
24	<b>PRANCIS</b> : Swiss Ban on Minaret Building Meets Widspread Criticism (01 December 2009)					✓
25	Nicolas Sarkozy defends Switzerland minaret ban (8 December 2009)			✓		
26	<b>IRAN</b> : Iran warns Switzerland over minaret ban (05 December 2009)					✓
27	<b>LIBYA</b> : Libya imposes economic embargo on Switzerland (03 Maret 2010)					✓
28	<b>JERMAN</b> : Westerwelle defends Swiss after minaret ban (05 December 2009)			✓		
29	<b>SWEDIA</b> : Bildt blasts prejudice of Swiss minaret ban (30 November 2009)			✓		
30	<b>AS</b> : Switzerland – US Departmen of State					✓

**3. Tabel Arah Opini Publik Internasional**

+ = *favorable*  
 - = *unfavorable*  
 0 = *netral*

NO	DATA OPINI	ARAH OPINI		
		+	-	0
1	The fear of minarets (30 November 2009)	✓		
2	Switzerland's flawed minaret vote (30 November 2009)		✓	
3	Thanking The Swiss vote (2 December 2009)			✓
4	A Vote for Intolerance (30 November 2009)		✓	
5	Switzerland an the minaret (30 November 2009)	✓		
6	Switzerland votes against religious freedom (30 November 2009)		✓	
7	Switzerland minaret ban would breach freedom of religion obligations (25 November 2009)		✓	
8	Public statement from Amnesti International "banning minarets violate international human rights law" (21 oktober 2009)		✓	
9	Amnesty international report 2010		✓	
10	Head of OSCE human rights office expresses concern about outcome of Swiss minaret ban referendum (30 November 2009)		✓	
11	OSCE representative calls Swiss initiative to ban minarets unfortunate (21 Juni 2007)		✓	
12	The minaret vote, Europe's call to show bias (2 desember 2009)		✓	
13	Switzerland: minaret ban violates right (4 desember 2009)		✓	
14	UNHCR report on 2010		✓	
15	Swiss minaret ban discriminates against muslims (30 november 2009)		✓	
16	UN rights chief says Swiss ban on minarets 'clearly discriminatory' (1 desember 2009)		✓	
17	A Swiss Ban on Minarets (18 December 2009)		✓	
18	Third OIC observatory report		✓	
19	Suplementary Human Dimension Meeting: Freedom of religion or belief		✓	
20	IRLA Answers the Swiss Ban on Minarets (30 November 2009)		✓	
21	<b>TURKI</b> : Turkey angry over Swiss ban on minarets (01 December 2009)		✓	
22	Turkish president, foreign minister criticize Swiss minaret referendum (01 December 2009)		✓	

NO	DATA OPINI	+	-	0
23	<b>INDONESIA</b> : Swiss minaret ban reflects ignorance: Indonesia (01 December 2009)		✓	
24	<b>PRANCIS</b> : Swiss Ban on Minaret Building Meets Widspread Criticism (01 December 2009)	✓		
25	Nicolas Sarkozy defends Switzerland minaret ban (8 December 2009)	✓		
26	<b>IRAN</b> : Iran warns Switzerland over minaret ban (05 December 2009)		✓	
27	<b>LIBYA</b> : Libya imposes economic embargo on Switzerland (03 Maret 2010)		✓	
28	<b>JERMAN</b> : Westerwelle defends Swiss after minaret ban (05 December 2009)	✓		
29	<b>SWEDIA</b> : Bildt blasts prejudice of Swiss minaret ban (30 November 2009)		✓	
30	<b>AS</b> : Switzerland – US Departmen of State			✓

### **Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Gegen den Bau von Minaretten»**

vom 12. Juni 2009

---

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,  
gestützt auf Artikel 139 Absatz 3 der Bundesverfassung<sup>1</sup>,  
nach Prüfung der am 8. Juli 2008 eingereichten Volksinitiative «Gegen den Bau  
von Minaretten»<sup>2</sup>,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 27. August 2008<sup>3</sup>,  
beschliesst:*

#### **Art. 1**

<sup>1</sup> Die Volksinitiative vom 8. Juli 2008 «Gegen den Bau von Minaretten» ist gültig und wird Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet.

<sup>2</sup> Sie lautet:

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:

*Art. 72 Abs. 3 (neu)*

<sup>3</sup> Der Bau von Minaretten ist verboten.

#### **Art. 2**

Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die Initiative abzulehnen.

Nationalrat, 12. Juni 2009

Die Präsidentin: Chiara Simoneschi-Cortesi  
Der Sekretär: Pierre-Hervé Freléchoz

Ständerat, 12. Juni 2009

Der Präsident: Alain Berset  
Der Sekretär: Philippe Schwab

1 SR 101  
2 BBl 2008 6851  
3 BBl 2008 7603

**Bundesbeschluss  
über die Volksinitiative «Gegen den Bau von Minaretten»**

vom 12. Juni 2009<sup>1</sup>

---

Die Bundesverfassung<sup>2</sup> wird wie folgt geändert:

*Art. 72 Abs. 3*

<sup>3</sup> Der Bau von Minaretten ist verboten.

*Ergebnis der Volksabstimmung und Inkrafttreten*

<sup>1</sup> Diese Verfassungsänderung ist von Volk und Ständen am 29. November 2009<sup>3</sup> angenommen worden.

<sup>2</sup> Sie ist auf Grund von Artikel 15 Absatz 3 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1976<sup>4</sup> über die politischen Rechte am 29. November 2009 in Kraft getreten.

5. Mai 2010

Bundeskanzlei

1 BB1 2009 4381  
2 SR 101  
3 BB1 2010 3437  
4 SR 161.1